



JEJAK JOHNNY PLATE

Proyek pembangunan ribuan Base Transceiver Station (BTS) akan Alas...

Setengah berlari, Menteri Komun...

Johnny Gerard Plate berge...

eluar dari ruang pe...

ig pada Rabu sore, 15 M...

: bisa melakukan tanya...

angkut proses hukum y...

lum selesai," ujar Joh...

jawab pertanyaan...

udah menunggunya seja...

Johnny Plate, sejumlah p...

kegiatan proyek dan...

...k adik

JURNALIS INVESTIGASI
MELAWAN KORUPSI SERIES II

KOMPILASI LIPUTAN KLUB JURNALIS INVESTIGASI MENGUNGKAP DUGAAN KORUPSI DI PROYEK INFRASTRUKTUR



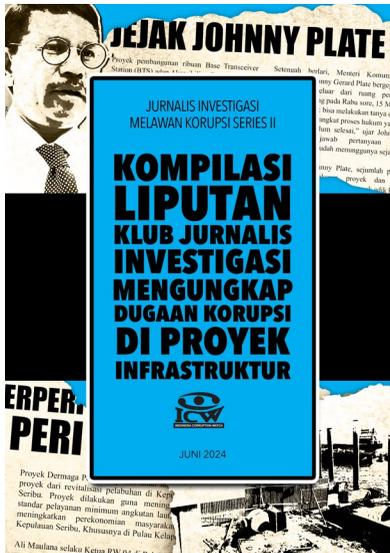
JUNI 2024

ERPER.
PERI

Proyek Dermaga P...
proyek dari revitalisasi pelabuhan di Kepu...
Seribu. Proyek dilakukan guna mening...
standar pelayanan minimum angkutan laut...
meningkatkan perekonomian masyarakat...
Kepulauan Seribu, Khususnya di Pulau Kelap...

Ali Maulana selaku Ketua PWG...





JURNALIS INVESTIGASI
MELAWAN KORUPSI SERIES II

KOMPILASI LIPUTAN KLUB JURNALIS INVESTIGASI MENGUNGKAP DUGAAN KORUPSI DI PROYEK INFRASTRUKTUR

MEDIA KOLABORASI

SUARA.COM, JARING.ID
TEMPO, NARASI TV
TIRTO.ID, LIPUTAN 6 SCTV
DETIK, MAHASISWAINDONESIA.ID
IDENERA.COM, BANTENNEWS.CO.ID

PENYUNTING

AGUNG SEDAYU
WANA ALAMSYAH

DIPUBLIKASIKAN OLEH



INDONESIA CORRUPTION WATCH
JALAN KALIBATA TIMUR IV/D NO.6,
JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA

2024

JURNALIS INVESTIGASI
MELAWAN KORUPSI
SERIES II

**KOMPILASI LIPUTAN
KLUB JURNALIS INVESTIGASI
MENGUNGKAP DUGAAN KORUPSI
DI PROYEK INFRASTRUKTUR**



INDONESIA CORRUPTION WATCH

2024

DAFTAR ISI

Daftar Isi	iv
Pengantar Koordinator ICW	1
Pengantar Umum	4
Seri I: Menteri Johnny di Pusaran Korupsi	7
• Jejak Johnny Plate di Pusaran Rasuah Proyek BTS BAKTI	9
• Sinyal di Pelosok Biarpet, Setoran Tetap Lancar sampai Jakarta	24
• Ada Nama Johnny G. Plate di Berkas Korupsi BTS BAKTI Kominfo	26
• Kisruh Proyek BTS 4G BAKTI Kominfo, Achsanul Qosasi: Ini Melayani Siapa?	37
• Sinyal Hilang, Uang Negara Melayang	43
• Achsanul Qosasi: Pembangunan BTS 4G Tak Lihat Kondisi di Lapangan	51
• Nama Petinggi Kominfo dalam Pusaran Korupsi Menara Sinyal	53
• Proyek BTS Rp28 Triliun Kominfo: Defisit Sinyal, Surplus Masalah	60
Seri II: Rasuah Proyek Infrastruktur Bermasalah	67
• Potensi Kecurangan dan Permainan Kontrak dalam PBJ SMK Negeri Maritim Lamongan Jawa Timur	70
• Renovasi Cak Durasim Dikebut Saat Pandemi Meninggi, Ada Apa?	81
• Tender Tak Terperi Dermaga Peri	95
• Deretan Masalah Berlabuh di Proyek Revitalisasi Dermaga Pulau Pramuka	104
• Sengkarut Revitalisasi Dermaga Kepulauan Seribu	110

PENGANTAR KOORDINATOR ICW

Terbongkarnya skandal *Panama Papers* yang memuat 11,5 juta dokumen rahasia dari firma hukum Mossack-Fonseca tahun 2016 telah menghebohkan dunia. Kehebohannya bukan saja dari sisi jumlah data yang melebihi kebocoran data era *Wikileaks* tahun 2010. Tetapi juga karena data yang termuat dalam *Panama Papers* mengandung informasi nama perusahaan maupun nama elit politik dan pemerintah, pengusaha bahkan atlet olahraga yang berupaya menyembunyikan aset dari jeratan pajak maupun upaya menyamarkan hasil pencucian uang dari berbagai tindak pidana.

Adalah ratusan jurnalis dari berbagai negara yang tergabung dalam konsorsium jurnalis investigasi atau *International Consortium Investigative Journalists* (ICIJ) yang bahu membahu membongkar skandal Panama tersebut. Efek pengungkapan itu menyebabkan beberapa nama yang tersangkut di dalamnya seperti Perdana Menteri Islandia dan Pakistan serta Pejabat Senior FIFA mengundurkan diri dari jabatan.

Tidak cukup itu saja, Konsorsium jurnalis ICIJ terus melanjutkan pengungkapan skandal yaitu *Paradise Papers* dan *Pandora Papers*. Keduanya hampir serupa, menyertakan jutaan dokumen yang berisi nama-nama politisi, pejabat publik dan pemimpin dari berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia serta daftar perusahaan yang telah dibentuk dengan struktur sedemikian rupa agar terhindar dari beban pajak.

Kolaborasi jurnalis investigasi dalam mengungkap data kepada publik merupakan fenomena yang secara global terus berkembang termasuk di Indonesia. Saat ini ICW juga terus mendorong pembentukan **Klub Jurnalis Investigasi (KJI)** di beberapa daerah di Indonesia.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pembentukan KJI. *Pertama*, karena adanya kesamaan tanggung jawab sebagai aktivis sosial dan insan pers untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara, memberikan informasi

yang tepat dan akurat kepada publik, menegakkan nilai-nilai demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia serta memperjuangkan keadilan kebenaran.

Faktor *kedua* adalah karena kerja-kerja jurnalis investigasi seringkali memakan waktu dan mahal karena kejahatan yang dilakukan melebihi batas-batas negara termasuk kecanggihan teknologi yang sering digunakan perusahaan, lembaga, dan konsultan untuk melindungi dari jeratan pidana atau pajak. Oleh karena itu dibutuhkan kerja-kerja kolaborasi dari berbagai latar belakang kompetensi Jurnalis untuk saling membantu menguak informasi dari data atau dokumen maupun sebuah peristiwa.

Faktor *ketiga* karena para jurnalis investigasi seringkali menghadapi situasi minimnya dukungan pendanaan dan pelatihan. Tidak jarang mereka juga menghadapi ancaman fisik, intimidasi, *hacking*, *doxing* serta kriminalisasi hukum. Sehingga, strategi membagi beban resiko mutlak dilakukan.

Hal ini setidaknya terkonfirmasi dari kondisi kebebasan pers tahun 2024 yang diterbitkan *Reporters Without Borders* (RSF) yang menjelaskan jika kebebasan pers di seluruh dunia tengah terancam oleh orang-orang yang seharusnya menjadi penjaminnya yaitu otoritas politik. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa, dari lima indikator yang digunakan untuk menyusun peringkat, indikator politik adalah yang paling banyak mengalami penurunan, dengan rata-rata penurunan global sebesar 7,6 poin.

Peringkat Indonesia dalam indeks kebebasan pers juga menurun dari peringkat 108 di tahun 2023 menjadi 111 di tahun 2024. RSF menempatkan Indonesia dalam kategori *difficult* berada di bawah Malaysia, Thailand dan Timor Leste. Kemudian RSF juga mencermati dua tantangan utama di Indonesia yaitu kekerasan terhadap jurnalis dan regulasi yang menghalangi kerja-kerja jurnalis.

Soal regulasi yang menghalangi kerja jurnalis tergambar dari revisi UU Penyiaran yang sempat digulirkan DPR. Menurut analisis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan LBH Pers, Pemerintah menggunakan kekuasaan secara eksekutif melalui pasal-pasal pemberangus demokrasi berdalih perlindungan terhadap penghinaan dan pencemaran nama baik yang semakin dilegitimasi melalui RUU Penyiaran. Alih-alih mempersempit ruang kriminalisasi bagi jurnalis maupun masyarakat namun pasal elastis justru semakin diperluas penggunaannya. Meskipun Revisi UU

Penyiaran akhirnya ditunda oleh Baleg DPR, namun potensi dihidupkan kembali pembahasannya selalu terbuka.

Situasi hari ini memang sedang tidak baik-baik saja, di mana hukum dijadikan instrumen untuk menekan lawan politik, bahkan demokrasi dan konstitusi telah dikangkangi oleh ambisi kekuasaan lewat politik dinasti. Oleh karena itu konsistensi, kolaborasi untuk mengontrol kekuasaan oleh pers dan masyarakat sipil harus terus dilakukan untuk mencegah adanya kekuasaan yang cenderung korup. Seperti yang *Lord Acton* sampaikan, kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut.

Sidang pembaca yang terhormat, buku yang Anda baca merupakan buku kedua dari rangkaian buku kompilasi liputan investigasi para jurnalis anggota KJI. Buku pertama berisi kompilasi liputan terkait kasus korupsi seputar penanganan Covid-19 dan dampaknya. Sedangkan buku kedua ini berisi kumpulan berita KJI membongkar dugaan korupsi di sejumlah proyek infrastruktur.

Selamat Membaca.

Agus Sunaryanto
Koordinator ICW

PENGANTAR UMUM

Membongkar Korupsi Infrastruktur

Infrastruktur menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi sekaligus penopang kesejahteraan masyarakat. Wajar jika infrastruktur menjadi salah satu fokus pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN bersanding dengan sektor kesehatan, ketahanan pangan, perlindungan sosial, dan pendidikan. Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, kebutuhan pembiayaan infrastruktur selama tahun tersebut mencapai Rp6.445 triliun.

Namun, saat ini infrastruktur menjadi salah satu sektor yang paling rentan dikorupsi. Besarnya alokasi anggaran yang tidak diiringi dengan transparansi dan tata kelola yang baik menjadikan proyek-proyek infrastruktur kerap menjadi bancakan para koruptor. Selama 10 tahun terakhir, sekitar 53 persen tender di Indonesia berkaitan dengan proyek-proyek konstruksi. Sementara itu sepanjang 2015 dan 2018 kasus korupsi di proyek infrastruktur meningkat 50 persen.

Korupsi di sektor infrastruktur terjadi di segala tahapan proyek sekaligus melibatkan berbagai aktor mulai dari pejabat pemerintah, pelaku usaha, hingga konsultan. Lokus kasusnya juga menyebar di pelbagai tempat, mulai dari perkotaan hingga pelosok desa, dengan berbagai modus yang rumit dan berbeda-beda. Sehingga membongkar kasus korupsi infrastruktur bukan perkara yang mudah.

Kondisi tersebut yang menjadi pertimbangan Klub Jurnalis Investigasi atau KJI menjadikan kasus rasuah di sektor infrastruktur sebagai salah satu fokus liputan. KJI adalah wadah kolaborasi liputan isu korupsi yang dibentuk oleh sejumlah jurnalis bekerja sama dengan *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Sejak 2020, KJI telah melakukan berbagai liputan investigasi yang membongkar kasus-kasus korupsi di berbagai sektor, termasuk korupsi infrastruktur.

Investigasi menjadi pilihan karena kasus korupsi yang kompleks serta melibatkan banyak aktor kekuasaan hampir mustahil bisa dibongkar menggunakan metode jurnalisisme biasa. Melalui jurnalisisme investigasi tim KJI menggali informasi dan mengumpulkan fakta dari berbagai sumber, termasuk dokumen-dokumen rahasia, untuk mengungkap berbagai skandal korupsi.

Kolaborasi dibutuhkan untuk meringankan kerja dan biaya, sebab liputan investigasi membutuhkan tenaga dan sumber daya yang lebih besar dibanding liputan biasa. Pun melalui kolaborasi, resonansi isu menjadi lebih luas karena diberitakan di sejumlah media sekaligus. Melalui kolaborasi daya dorong media untuk menciptakan kesadaran publik sekaligus perubahan kebijakan bisa berlipat ganda.

Pada Maret 2023, liputan KJI sempat menjadi sorotan. Publik heboh, lini masa media ramai membahas soal hasil investigasi KJI terkait kasus korupsi di proyek pembangunan ribuan *Base Transceiver Station* (BTS) di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Laporan investigasi ini mengungkap suap di balik proyek pembangunan BTS Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI).

Selama tiga bulan tim KJI menelusuri penyebab di balik mangkraknya proyek BTS BAKTI yang bernilai puluhan triliun rupiah. Dari penelusuran tersebut ditemukan berbagai dugaan pelanggaran mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Investigasi KJI juga menemukan adanya dugaan suap ke sejumlah petinggi Kementerian Komunikasi, termasuk ke Menteri Komunikasi Johnny Plate dan adik kandungnya, Gregorius Plate.

Investigasi tim KJI terbukti benar. Pada pertengahan Mei 2023 Kejaksaan Agung menetapkan Plate sebagai tersangka. Pada November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 15 tahun penjara terhadap Plate.

Pada 2024, KJI kembali melakukan sejumlah liputan tentang dugaan pelanggaran proyek infrastruktur di sejumlah daerah. Yaitu di Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Lamongan, dan Kota Surabaya. Kolaborasi liputan KJI kali ini tidak hanya melibatkan jurnalis media umum tapi juga melibatkan pers mahasiswa.

Liputan di Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta terkait persoalan pembangunan dermaga di tiga pulau yaitu Pulau Pramuka, Pulau Kelapa, dan Pulau Sebir. Dalam penelusuran, tim KJI menemukan banyak dugaan pelanggaran dalam proyek tersebut. Mulai dari dugaan permainan di proses tender, konflik kepentingan yang

mengarah pada monopoli proyek, pelaksanaan yang molor, hingga kerusakan lingkungan.

Di Jawa Timur, liputan KJI menemukan dugaan kecurangan dan permainan kontrak di proyek pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Maritim Lamongan. Sementara itu liputan KJI di Surabaya, mengungkap sejumlah persoalan dalam proyek renovasi Gedung Kesenian Cak Durasim di 2020. Sama seperti kasus di Kepulauan Seribu, pelanggaran di proyek tersebut juga sudah terjadi sejak proses lelang hingga pelaksanaan pembangunan.

SINYAL HILANG, UANG BARA MELAYANG



dapat Base kel
"Sebelum adanya tower Telkomsel BAKTI, kami sebagai pengusaha kecil di sini berusaha untuk jual pulsa... dengan adanya... Alasannya, ang menurut akses internet, dengan adanya... li saat ditemui tim...
ternyata tower
Jari...
N... DPR RI. "Terkait... hukum, pembangunan... er Station (BTS) 4G pada...
ummu

KOMINFO
PUSARA
RA SINYA
... pertama yang ditetapk...
adalah Direktur Utar...
s Telekomunikasi dan...
sebuah badan layanan...
Kementerian Kominfo...
Achmad Latif, Direktur Utama...
Telematika Indonesia Tbk (PT Mo...
Galumbang Menak Simanjuntak, c...
ahli dari Human Development...
...itas Indonesia, Yohan S...

BAGIAN 1

MENTERI JOHNNY DI PUSARAN KORUPSI

ADA NAMA JOHNNY G. PLATE DI BERKAS KORUPSI BTS BAKTI

Irwan terperangah. Berarti setiap bulan harus tersedia uang Rp500 juta. Menurut Anang, duit itu diminta Menteri Komunikasi dan Inform...
G. Plate. Selang dua ta...
persuaan itu, persis...
Anang ditetapkan...
kasus korupsi ole...
Republik Indone...
Utama Badan AI

Sebulan kemudian, 7 Februari, giliran Irwan yang merupakan bos PT Solitech Media Sinergy, ikut dijadikan tersangka dalam perkara sama. Irwan diduga memberi saran dan menguntungkan



EJAK JOHNNY PLATE DI PUSARAN RASUAH PROYEK BTS BAKTI

Proyek pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika tersendat. Proyek yang meliputi pembangunan 7.904 *tower* bernilai Rp28,3 triliun itu meleset jauh dari target.

Awalnya, proyek ini direncanakan dikerjakan dalam dua tahap. Tahap pertama, sebanyak 4.200 *site* pada 2021. Sementara 3.704 lainnya masuk tahap dua pada 2022. Faktanya, hingga September 2022 hanya 2.406 menara BTS yang terbangun. Bahkan sebagian pemancar tersebut tidak berfungsi.

Klub Jurnalis Investigasi menelisik apa yang terjadi di balik sengkabut pembangunan menara BTS BAKTI tersebut. Selama tiga bulan tim KJI melakukan liputan, mewawancarai puluhan sumber, dan mengumpulkan berbagai dokumen. Tim KJI juga melakukan liputan ke sejumlah daerah untuk melihat langsung pelaksanaan proyek tersebut. Dari penelusuran tersebut ditemukan berbagai dugaan pelanggaran mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek.

Di perencanaan, penentuan lokasi 7.904 titik pembangunan BTS ternyata dilakukan dengan serampangan, hanya berdasarkan analisis di balik meja, tidak berdasarkan hasil pengecekan lapangan. Akibatnya, pembangunan BTS banyak dilakukan di daerah yang tidak membutuhkan.

Proses pengadaan juga bermasalah. Sejumlah perusahaan pemenang proyek tidak memiliki kualifikasi sebagai pemilik teknologi sebagaimana dinyatakan dalam dokumen prakualifikasi. Pun juga ada perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan finansial yang semula tidak lolos tender, tiba-tiba diloloskan.

Tidak hanya itu, pelaksanaan proyek di lapangan juga penuh masalah. Sebagian besar pembangunan menara BTS mangkrak atau tidak sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Kerugian negara ditaksir mencapai triliunan rupiah.

Penelusuran tim KJI juga menemukan adanya suap di balik proyek tersebut. Aliran duit suap bahkan sampai ke Menteri Komunikasi Johnny Plate dan adik kandungnya, Gregorius Plate.

Media Kolaborasi:

Tempo, Suara.com, Jaring.id, Narasi TV, Tirto.id, Liputan6 SCTV, dan Detik.



JEJAK JOHNNY PLATE DI PUSARAN RASUAH PROYEK BTS BAKTI

Tempo edisi 30 Maret 2023.

Proyek pembangunan ribuan Base Transceiver Station (BTS) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika bermasalah sejak perencanaan hingga pelaksanaan. Tempo dan Klub Jurnalis Investigasi (KJI) menelisik rasuah di proyek senilai Rp28,3 triliun ini. Menteri Komunikasi Johnny Gerard Plate diduga pernah meminta setoran dana operasional proyek Rp500 juta per bulan.

Setengah berlari, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate bergegas masuk mobil usai keluar dari ruang pemeriksaan Kejaksaan Agung pada Rabu sore, 15 Maret 2023 lalu. "Saya tidak bisa melakukan tanya dan jawab karena ini menyangkut proses hukum yang masih panjang dan belum selesai," ujar Johnny Plate menolak menjawab pertanyaan puluhan wartawan yang sudah menunggunya sejak pagi.

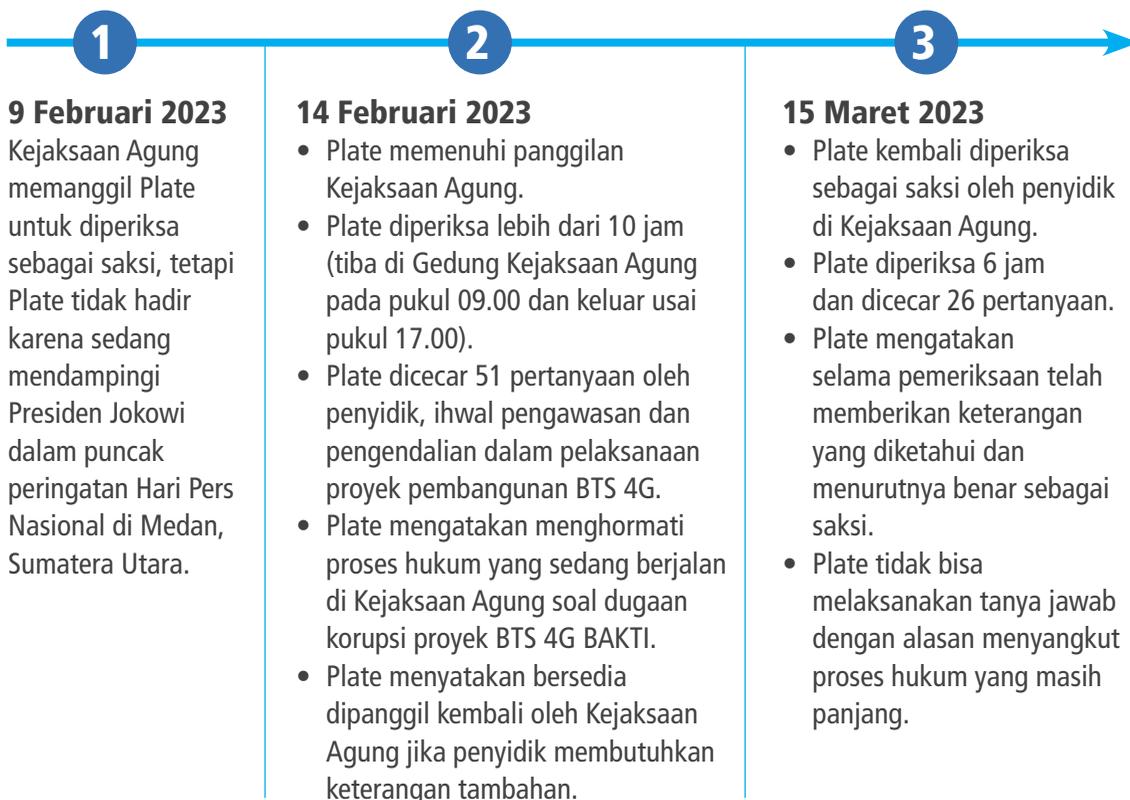
Hari itu adalah kali kedua Kejaksaan Agung memeriksa Johnny Plate terkait kasus dugaan korupsi di proyek pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) Badan

Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Komunikasi. Selama enam jam, Johnny Plate menjawab 26 pertanyaan penyidik. Sebelumnya, pada 14 Februari lalu, Johnny Plate sudah pernah diperiksa selama sembilan jam di gedung yang sama, penyidik mencecarnya dengan 51 pertanyaan.

Tidak hanya Johnny Plate, sejumlah pimpinan perusahaan pelaksana proyek dan pejabat Kementerian Komunikasi termasuk adik kandung Johnny Plate, Gregorius Alex Plate, ikut diperiksa. Gregorius Plate pertama kali diperiksa Kejaksaan Agung pada Kamis, 26 Januari 2023. Dia kembali diperiksa pada Senin, 13 Februari lalu.

Kejaksaan Agung menduga ada aliran duit dari proyek BTS BAKTI yang mengalir ke Gregorius Plate. Dugaan tersebut terbukti. Pada 13 Maret lalu, satu hari sebelum Johnny Plate diperiksa, Direktur Penyidikan Jaksa Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Kuntadi mengatakan Gregorius Plate mengembalikan Rp534 juta ke Kejaksaan. Duit tersebut merupakan fasilitas yang diterima Gregorius Plate dari proyek BTS BAKTI Kominfo. Kuntadi mengatakan, salah satu materi pemeriksaan Johnny Plate terkait aliran duit yang diterima Gregorius.

Pemeriksaan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate



Seiring dengan pemeriksaan Johnny Plate dan Gregorius Plate, Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka di proyek pembangunan BTS BAKTI Kominfo tersebut. Mereka adalah Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, tenaga ahli *Human Development* Universitas Indonesia (2020), Yohan Suryanto, *Account Director of Integrated* PT Huawei Investment, Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitechmedia Synergy, Irwan Hermawan.

Sedangkan Johnny Plate dan Gregorius Plate masih berstatus sebagai saksi. “Kita tunggu hasil gelar perkara,” ujar Kuntadi.

Akal-akalan dan Pemborosan Rp1,5 Triliun

Proyek *Base Transceiver Station* (BTS) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) meliputi pembangunan 7.904 *tower* di daerah yang masuk kategori terdepan, terluar, dan tertinggal atau yang biasa disingkat daerah 3T. Proyek bernilai Rp28,3 triliun itu rencananya dikerjakan dalam dua tahap. Tahap pertama, sebanyak 4.200 *site* dan dikerjakan pada 2021. Sementara 3.704 lainnya masuk tahap dua dan digarap pada 2022.

Tercatat ada tujuh perusahaan yang memenangi proyek ini. Kontrak paket 1 dan 2 telah ditandatangani pada 29 Januari 2021 antara Fiberhome, Telkominfra, dan Multitrans Data, dan BAKTI Kominfo, dengan nilai kontrak sebesar Rp9,5 triliun. Sedangkan paket 3, 4, dan 5 dimenangi oleh konsorsium PT Aplikanusa Lintasarta, Huawei, dan PT SEI serta IBS dan ZTE dengan total nilai kontrak Rp18,8 triliun.

Namun, pelaksanaan proyek tersebut meleset jauh dari rencana. Pada 2021, dari target pembangunan 4.200 BTS, hanya terealisasi 320 BTS. Walhasil, ribuan *tower* lainnya terkatung-katung nasibnya. Bahkan hingga September 2022, BTS yang siap beroperasi hanya mencapai 2.406 *site* atau sekitar 57 persen dari target proyek tahap pertama. Sebagian pemancar yang beroperasi tersebut juga tidak berfungsi dengan baik.

Dari hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2021 Kominfo yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan ditemukan setumpuk kejanggalan dalam perencanaan hingga pelaksanaan proyek tersebut. Mulai dari penentuan lokasi BTS, kontrak tender, hingga biaya yang, menurut BPK, boros anggaran.

RANCANGAN PROYEK BTS 4G BAKTI KOMINFO TAHUN ANGGARAN 2020 - 2022

Menyasar 7.904 Desa dengan Anggaran Rp28,3 triliun



KONSORSIUM & WILAYAH Pengerjaan Proyek

**Fiberhome,
Telkominfra, Multi
Data Trans (MTD):**
Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi, Nusa Tenggara,
Maluku.

**Lintasarta, Huawei,
Surya Energi
Indotama (SEI):**
Papua, Papua Barat.

**Infrastruktur
Bisnis Sejahtera
(IBS), Zhongxing
Telecommunication
Equipment (ZTE):**
Papua.

TAHAP PELAKSANAAN

Tahap I

- Digarap pada 2021.
- Proyek pembangunan 4.200 *site* BTS.

Tahap II

- Digarap pada 2022.
- Proyek pembangunan 3.704 *site* BTS.

Ditemui pada Senin, 6 Maret lalu, anggota BPK, Achsanul Qosasi, membeberkan sejumlah kejanggalan proyek pembangunan BTS BAKTI Kominfo. Salah satunya adalah penyusunan perencanaan proyek yang serampangan. Penentuan lokasi 7.904 titik pembangunan BTS tidak berdasarkan hasil pengecekan ke lapangan. "Mereka tidak turun ke lapangan. Sehingga saat pelaksanaan pembangunan, ada banyak titik yang ternyata tidak membutuhkan pembangunan BTS karena di sana sudah ada BTS milik Telkomsel," ujar Achsanul Qosasi.

Akibatnya, banyak pembangunan BTS yang tidak perlu. *Tower* BTS tetap dibangun di desa yang sudah memiliki pemancar. Padahal, konsep pembangunan BTS BAKTI ini adalah satu desa satu BTS, artinya harus dibangun di desa yang belum memiliki pemancar.

<p>Versi Dirut BAKTI, Anang Achmad Latif: Capaian per 15 April 2022:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rata-rata progres pembangunan BTS 4G tahap I sudah 86 persen.• Sebanyak 1900-an lokasi telah <i>on air</i> dari target 4.200 lokasi.	<p>Versi Sumber KJI: Capaian setelah perpanjangan proyek hingga September 2022 adalah sebanyak 2.406 <i>site</i>.</p>	<p>Realisasi tiap konsorsium:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fiberhome-Telkominfra MTD: 799 dari target 1.435 <i>site</i>.• Lintasarta-Huawei-SEI: 829 dari target 954 <i>site</i>.• IBS-ZTE: 778 <i>sites</i> dari target 1.811 <i>site</i>.
---	--	---

Realisasi Proyek BTS 4G Tahap 1

Proses pengadaan proyek penyediaan infrastruktur BTS juga menabrak aturan. Persyaratan kriteria prakualifikasi disusun tidak sesuai ketentuan di Perdirut BAKTI Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Infrastruktur BTS dan Pendukungnya dalam Rangka Transformasi Digital. Dokumen prakualifikasi tidak mencantumkan aturan ihwal lingkup dan batasan definisi pelaksana pembangunan. Termasuk, tidak adanya persyaratan pengalaman pembangunan BTS dan infrastruktur pendukungnya.

BPK juga menemukan kejanggalan dalam penentuan para pemenang proyek. Seperti pada konsorsium Fiberhome-Telkominfra-Multi Trans Data yang memenangi proyek pengerjaan BTS di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Dalam temuan BPK, disebutkan bahwa status Fiberhome Technologies Indonesia (FTI) tidak memenuhi kualifikasi sebagai *technology owner* atau pemilik teknologi sebagaimana dinyatakan dalam dokumen prakualifikasi.

Dalam dokumen pengajuan proyek, FTI memang menyampaikan pengalamannya dalam membangun BTS. Namun, berdasarkan hasil temuan BPK, pengalaman pembangunan BTS dalam dokumen tersebut bukan milik FTI. Melampirkan salinan kontrak pengalaman penggunaan teknologi BTS 4G milik perusahaan Datang Mobile Communications Equipment Co., Ltd. (DT).

Persoalan juga ada di konsorsium Lintasarta-Huawei-Surya Energi Indotama yang memegang proyek di wilayah Papua dan Papua Barat. Dari penelusuran BPK, terungkap bahwa dokumen salinan kontrak yang dilampirkan untuk pemenuhan persyaratan kualifikasi teknis tidak lengkap. Sebab, dokumen salinan kontrak yang disampaikan Lintasarta tidak dilengkapi lampiran atau rincian pekerjaan.

Selain itu, pengalaman yang disampaikan Huawei juga belum dapat dinilai memenuhi syarat. Sebab, informasi dalam lampiran dokumen kontrak dirahasiakan. Huawei juga tidak mencantumkan nama kontak dan penghubung lima kantor cabang perusahaan sebagaimana dipersyaratkan.

Begitu pula dengan konsorsium Indonesia Bisnis Sejahtera (IBS) dan ZTE yang memegang proyek di wilayah Papua. Temuan BPK menunjukkan bahwa dukungan pemegang saham ZTE tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2019, nilai kekayaan kemitraan IBS-ZTE tercatat sejumlah Rp2.083.762.939.890 yang terdiri dari kekayaan ZTE Indonesia sebesar Rp616.443.216.456 dan IBS senilai Rp1.467.319.723.434. "Nilai tersebut masih di bawah kekayaan bersih yang dipersyaratkan untuk mengikuti tiga paket pengadaan, yakni sebesar Rp8,1 triliun," tulis BPK dalam laporannya.

Selain itu, BPK menemukan dugaan permainan penentuan pemenang proyek. Awalnya, kemitraan IBS-ZTE tidak lolos sebagai pemenang proyek paket 4 dan 5 pembangunan BTS BAKTI karena dianggap tidak memenuhi persyaratan teknis dan finansial. Namun, pada 22 Januari 2021, Pokja Pemilihan Pengadaan mengubah ketentuan di dokumen tender.

Perubahan spesifikasi tersebut membuat konsorsium IBS-ZTE yang semula tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi aspek finansial dan teknis. Kemitraan IBS-ZTE lantas melenggang menjadi pemenang. "Perubahan spesifikasi teknis tersebut terindikasi bukan didasarkan kepada analisa kebutuhan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, akan tetapi karena spesifikasi teknis yang dimiliki atau dapat disediakan oleh Konsorsium IBS-ZTE," tulis laporan BPK.

BPK juga menemukan adanya pemborosan anggaran di proyek pembangunan BTS BAKTI Kominfo. Tidak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp1.550.604.887.030 atau Rp1,5 triliun.

Pemborosan anggaran yang sempat dicatat BPK tersebut mencakup dana komponen *capital expenditure* (*capex*) alias belanja modal. Antara lain biaya

SENGKARUT PROYEK BTS 4G BAKTI KOMINFO

Proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2020 - 2022 tidak beres. Proyek infrastruktur digital dengan total anggaran Rp28,3 triliun untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tersebut, dibumbui kongkalingkong sejumlah pihak. Kejaksaan Agung mengendus bau rasuah dalam proyek strategis nasional (PSN) ini dan telah menetapkan lima tersangka.



TEMUAN MASALAH OLEH BPK

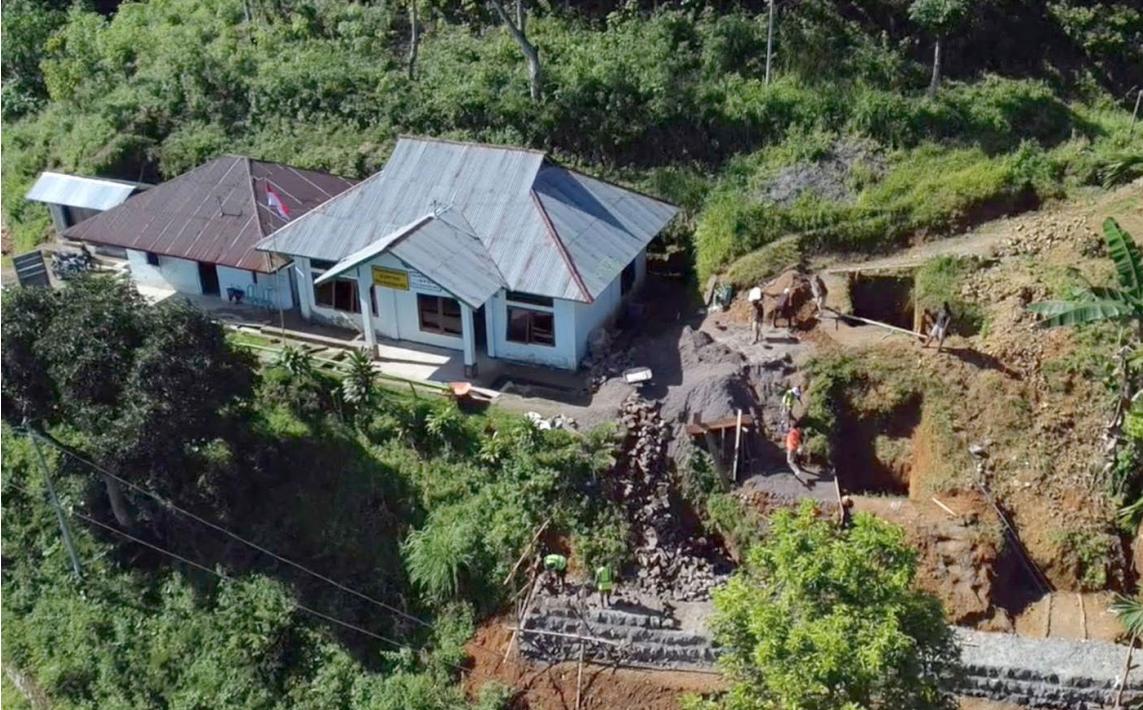
BAKTI tidak melakukan survei ke lapangan dalam menentukan 7.904 titik lokasi pembangunan BTS.

Proses pengadaan proyek penyediaan infrastruktur BTS dan pendukungnya yang tidak sesuai ketentuan.

Persyaratan dalam kriteria prakualifikasi disusun tidak sesuai ketentuan dalam peraturan dirut dan membatasi kesempatan patisipasi calon penyedia.

KASUS DUGAAN KORUPSI DUGAAN MARK UP ANGGARAN PROYEK TAHAP 1

Umumnya, biaya pembangunan satu tower BTS menelan ongkos **Rp1,5 - 1,8 miliar**. Dimahalkan jadi **Rp2,5 - 3 miliar per tower**, tergantung lokasi dan spesifikasi.



Potret dari atas proyek BTS 4G BAKTI di Desa Angkar Weli, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, pada Senin, 13 Maret 2023. Foto: Harfin Naqsyabandi/SCTV (Klub Jurnalis Investigasi).

penggunaan helikopter dan sejenisnya yang mencapai Rp1,4 triliun. Begitu pula dengan biaya *training* dan servis lainnya yang masing-masing senilai Rp30,9 miliar dan Rp60,6 miliar.

Komponen kedua yakni *operational expenditure (opex)* alias biaya operasional, berupa biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal atau *Universal Service Obligation (USO)* sebesar Rp52 miliar. Dana tersebut dikembalikan sesuai permintaan BPK.

Saat dikonfirmasi, *Legal Manager* PT Fiberhome Technologies Indonesia, Ronald Samuel Hunga tidak bersedia berkomentar. Menurut Ronald, perusahaannya tidak bersedia memberikan penjelasan karena kasus dugaan korupsi tersebut masih dalam proses penanganan di Kejaksaan Agung. "Apabila kami melakukan wawancara dengan pihak lain selain tim investigasi Kejaksaan Agung, maka hal tersebut menjadi tidak etis dan tidak patut untuk dilakukan oleh kami yang merupakan salah satu saksi kasus dimaksud," kata Ronald melalui surat yang disampaikan kepada KJI, Senin, 6 Maret 2023.

Hal senada disampaikan *Country PR and Editor in Chief* at Huawei Indonesia, Damar Harsanto. Perusahaan tidak bersedia melayani permintaan konfirmasi karena kasus

BTS BAKTI sudah memasuki ranah hukum di Kejaksaan Agung. “Harap maklum. Terima kasih,” kata Damar melalui pesan WhatsApp pada Rabu, 8 Maret lalu.

Hal senada juga disampaikan *General Affair and Finance Manager* PT Multi Trans Data, Triyono Hadi. Triyono lantas meminta *Tempo* dan KJI untuk meminta keterangan ke pihak Kejaksaan Agung yang saat ini masih melakukan proses penyidikan. “Kami sangat menghormati tim penyidik Kejaksaan Agung yang bekerja dengan profesional,” kata Triyono, Kamis, 16 Maret 2023. “Karenanya, menurut hemat kami, kurang elok sekiranya kami melaksanakan wawancara dan pemberian data dengan pihak di luar tim penyidik tersebut.”

Sedangkan permintaan konfirmasi ke PT Mora Telematika Indonesia (Moratelindo), PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (Telkominfra), Lintasarta, Surya Energi Indotama, Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS), dan Zhongxing Telecommunication Equipment (ZTE) tidak mendapat tanggapan. Hingga berita ini ditulis, surat permintaan konfirmasi yang disampaikan *Tempo* dan KJI belum dibalas.



Site BTS di Desa Ulu Wae, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Foto: Harfin Naqsyabandi/SCTV (Klub Jurnalis Investigasi).

Permintaan Dana Operasional Rp500 Juta Menteri Plate

Selain mengalir ke Gregorius Plate, duit proyek pembangunan BTS BAKTI Kementerian Komunikasi juga diduga mengucur ke Menteri Johnny Plate. Berdasarkan dokumen pemeriksaan, Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif mengaku pernah diminta Menteri Johnny Plate menyetorkan dana operasional Rp500 juta per bulan.

Permintaan tersebut disampaikan Menteri Johnny Plate saat Anang menemuinya di ruang kerja Plate, di lantai tujuh Gedung Kementerian Komunikasi sekitar Januari dan Februari 2021. Pada awal pertemuan, mereka membicarakan tentang rencana pengerjaan proyek BTS BAKTI. Namun, pada akhir pertemuan Plate bertanya apakah Happy Endah Palupy, Kepala Bagian Tata Usaha Kominfo yang merangkap sebagai asisten Plate, sudah menyampaikan sesuatu kepada Anang.

Anang lantas bertanya mengenai apa. Selanjutnya Johnny Plate mengatakan tentang dana operasional tim pendukung menteri. "Sebesar Rp500 juta setiap bulan untuk anak-anak kantor. Nanti Happy akan ngomong sama kamu," ujar Anang menirukan perkataan Johnny Plate.

Anang lantas menemui Komisaris PT Solitechmedia Synergy, Irwan Hermawan untuk dicarikan solusi sekaligus memberikan informasi kepada siapa duit disetorkan. Anang mengaku tidak tahu apakah permintaan dana operasional tersebut akhirnya dipenuhi atau tidak. Namun pada Februari 2021, Plate sempat bertanya mengenai duit operasional tersebut. "Ini penting untuk kerja anak-anak," ujar Anang menirukan Johnny Plate. Menurut Anang, sejak saat itu Johnny Plate tidak pernah bertanya lagi tentang uang setoran untuk operasional tersebut.

Sumber *Tempo* dan KJI yang mengetahui proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi BTS BAKTI Kominfo mengatakan, Irwan memang orang yang berperan untuk mengumpulkan duit dari pemenang proyek untuk selanjutnya menyetorkan ke para pejabat Kementerian Komunikasi. Setoran diberikan melalui banyak jalur, termasuk melalui sopir orang-orang dekat Johnny Plate.

Bahkan pada awal pelaksanaan proyek, menurut sumber tersebut, setoran diberikan per pekan setiap Rabu. Proses transaksi itu dilakukan melalui jalur-jalur tikus dengan melibatkan banyak orang di sekitar Johnny Plate.

Setoran ke para pejabat Kementerian Komunikasi itu diduga menjadi salah satu alasan membengkaknya biaya pembangunan menara BTS BAKTI. Berdasarkan



PERAN TERSANGKA

PENETAPAN TERSANGKA OLEH KEJAKSAAN AGUNG

- 1 4 JANUARI 2023**
 - Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif.
 - Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak.
 - Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (2020), Yohan Suryanto.
- 2 24 JANUARI 2023**

Account Director of Integrated PT Huawei Investment, Mukti Ali.
- 3 7 FEBRUARI 2023**

Komisaris PT Solitech Media Sinery, Irwan Hermawan.

1 ANANG ACHMAD LATIF
Diduga membuat peraturan teknis yang didesain untuk memenangkan vendor tertentu, demi mengamankan harga pengadaan yang sudah di mark-up sedemikian rupa.

2 GALUMBANG MENAK SIMANJUNTAK
Diduga berperan sebagai pemberi saran dan masukan kepada Anang yang menguntungkan vendor dan konsorsium tertentu.

3 YOHAN SURYANTO
Diduga memanfaatkan institusinya untuk membuat kajian teknis rencana pembangunan BTS di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Belakangan diketahui, kajian teknis itu digunakan untuk mewedahi kepentingan Anang, seperti melakukan mark-up harga barang.

**4 MUKTI ALI &
5 IRWAN HERMAWAN**
Disebut melawan hukum dengan dugaan melakukan permafakatan jahat dengan tersangka Anang untuk mengkondisikan pelaksanaan pengadaan BTS pada BAKTI Kominfo. Perencanaan disusun sedemikian rupa demi memenangkan perusahaan tertentu dalam tender proyek BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5.





Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate (tengah) bersama Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kuntadi (kedua dari kanan), Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Ketut Sumedana (kedua dari kiri) dan jajaran penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia memberikan keterangan pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 14 Februari 2023. Menkominfo Johnny G. Plate menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 9 jam terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo 2020-2022. Dalam keterangannya Johnny menyatakan siap diperiksa lagi jika dipanggil penyidik. Foto: TEMPO/Hilman Fathurrahman W.

perhitungan wajar, umumnya biaya pembangunan satu menara BTS membutuhkan dana sekitar Rp1,8 miliar. Namun anggaran membengkak menjadi Rp2,5 miliar hingga Rp3,3 miliar untuk satu menara BTS.

Saat dikonfirmasi mengenai dugaan keterlibatan Irwan, Direktur PT Solitechmedia Synergy, Ronald Abdi Nurhadi mengatakan perusahaannya tidak terkait dengan proyek pembangunan BTS BAKTI Kominfo. "Irwan bertindak dalam kapasitasnya secara pribadi dan tidak ada hubungannya dengan PT Solitechmedia Synergy," kata Ronald melalui keterangan tertulis, Selasa, 14 Maret lalu. Terkait dugaan rasuah yang menjerat Irwan, Ronald mengklaim pihaknya telah meminta Irwan untuk mundur sebagai komisaris perusahaan setelah penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung.

Sedangkan kuasa hukum Anang Latif, Kresna Hutauruk, enggan berkomentar ihwal materi perkara dugaan korupsi yang menimpa kliennya. Dia beralasan, proses penyidikan di Kejaksaan sedang berjalan. "Intinya, klien kami siap mengikuti segala proses hukum yang sedang dan akan berjalan," kata Kresna kepada *Tempo*, Sabtu, 25 Maret 2023.

Tempo dan KJI juga berupaya melakukan konfirmasi ke Johnny Plate dan Happy dengan menghubungi nomor telepon pribadi mereka serta melayangkan surat resmi

sejak Jumat, 9 Maret lalu. Namun permintaan konfirmasi ke Happy tidak mendapat tanggapan. Begitu pula Johnny Plate yang di sejumlah kesempatan menyatakan tidak bersedia berkomentar. "Saya sudah memberi keterangan sebagai saksi. Terkait substansi, itu wewenang Kejaksaan Agung," ujar Johnny Plate usai diperiksa Kejaksaan Agung pada 15 Maret lalu.

Sedangkan kuasa hukum Johnny Plate, Muhammad Ali Nurdin juga tutup mulut. Dia hanya membalas permintaan konfirmasi yang disampaikan ke nomor WhatsApp pribadinya dengan mengirim stiker gambar orang tengah berdoa. "Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT," tulis Ali, Sabtu, 18 Maret 2023.

Kepala Biro Humas Kominfo, Rhina Anita Ernita Martono juga tutup mulut. "Mohon maaf, Kominfo belum bisa memberikan keterangan," ujar Rhina saat ditemui *Tempo* di kantor Kementerian Komunikasi pada Jumat, 24 Maret lalu.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, mengatakan bahwa dia sudah menanyakan perkara dugaan korupsi di proyek BTS BAKTI Kominfo ke Johnny Plate. Johnny Plate adalah menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Menurut Ahmad Ali, saat itu Johnny Plate menjawab bahwa dia tidak memiliki hubungan dan kaitan dengan kasus tersebut. "Apa kami harus tidak mempercayai?" kata Ahmad Ali pada Sabtu, 18 Maret lalu. Namun, Ali mengatakan jika Plate terbukti bersalah secara hukum dan menjadi tersangka, Nasdem bersikap sesuai peraturan internal partai. "Sederhana saja, kalau dia tersangka, dipecat," ucapnya.

Kepala Subdit Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Haryoko Ari Prabowo, masih irit bicara. "Kalau ditanya benar atau enggak, kami belum bisa membenarkan maupun menyalahkan," kata Prabowo, Kamis, 23 Februari 2023. "Kami sedang mendalami. *Still going on.*"

Makin Susah Internet di Daerah Tertinggal

Rasuah di proyek pembangunan menara BTS BAKTI Kominfo menyebabkan masyarakat di berbagai daerah tertinggal kesulitan mendapat akses internet. Seperti yang dialami Willibrodus, 42 tahun, warga Desa Mokel Morid, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Keberadaan menara BTS BAKTI di desanya justru membuat sinyal internet di kampungnya semakin susah diakses.

Sebelumnya, Desa Mokel Morid tidak memiliki menara BTS. Meski begitu, warga masih bisa mendapatkan sinyal internet dari menara Desa Paan Leleng yang berjarak

sekitar lima kilometer sebelah selatan desa. Namun, setelah Kominfo membangun menara BTS BAKTI di Mokel Morid tahun lalu, sinyal internet di desanya justru hilang.

Warga desa yang ingin mendapatkan sinyal internet warga harus memanjat atau mengerek *handphone* mereka ke atas pohon di pinggir hutan untuk bisa menangkap sinyal internet dari menara Telkomsel di desa tetangga. "Dengan cara itu, kami bisa dapat jaringan internet dari Desa Paan Leleng dan terbunuhlah tulisan Telkomsel BAKTI (di layar *handphone*)," ujar Willibrodus. "Selama ada tulisan Telkomsel BAKTI di *handphone*, tidak ada internet."

Cerita serupa disampaikan Edky, seorang guru dari Desa Sipi, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur. Menara BTS BAKTI yang dibangun di desanya pada November 2022 justru membuyarkan jaringan internet di wilayahnya. Dia dan puluhan siswanya terpaksa mendaki gunung, masuk kawasan hutan, untuk bisa mendapat sinyal internet dari desa tetangga saat ujian Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). "Kalau tidak masuk hutan tidak dapat sinyal," ucap Edky, Kamis, 22 Maret 2023.

Cerita lain datang dari Elisabeth, warga Desa Compang Kantar, Manggarai Timur. Proyek pembangunan menara BTS BAKTI di desanya tidak kunjung rampung hingga



Elisabeth, warga Desa Compang Kantar, Manggarai Timur, NTT, yang belum mendapat bayaran atas sewa rumah bagi para pekerja proyek BTS BAKTI Kominfo di desanya. Elisabeth baru menerima Rp6 juta dari total Rp13,5 juta biaya sewa. Foto: Harfin Naqsyabandi/SCTV (Klub Jurnalis Investigasi).

sekarang. Di sekitar lokasi pembangunan hanya tampak lonjoran besi ditumpuk di tepi jalan. Hingga sekarang warga desanya masih susah mendapatkan internet. “Tumpukan besi itu sudah sejak 2021, sampai sekarang belum juga dibangun,” ujarnya.

Sekitar satu setengah tahun lalu truk pengangkut lonjoran besi datang ke desanya bersama sejumlah pekerja proyek. Beberapa pekerja proyek lantas menyewa rumah Elisabeth untuk tempat tinggal mereka. Namun hingga berbulan-bulan proyek tidak kunjung jalan. Para pekerja juga pergi begitu saja tanpa melunasi pembayaran sewa rumah. Dari biaya sewa Rp13,5 juta, baru Rp6 juta yang dibayar. “Saya tidak tahu menagih ke siapa,” ujarnya.

Peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Tibiko Zabar, mengatakan rasuah di proyek pembangunan BTS BAKTI Kementerian Komunikasi menyebabkan kerugian keuangan negara sekaligus membuat masyarakat menderita. Karena itu ICW mendesak Kejaksaan Agung untuk lebih serius mengusut dugaan korupsi tersebut.

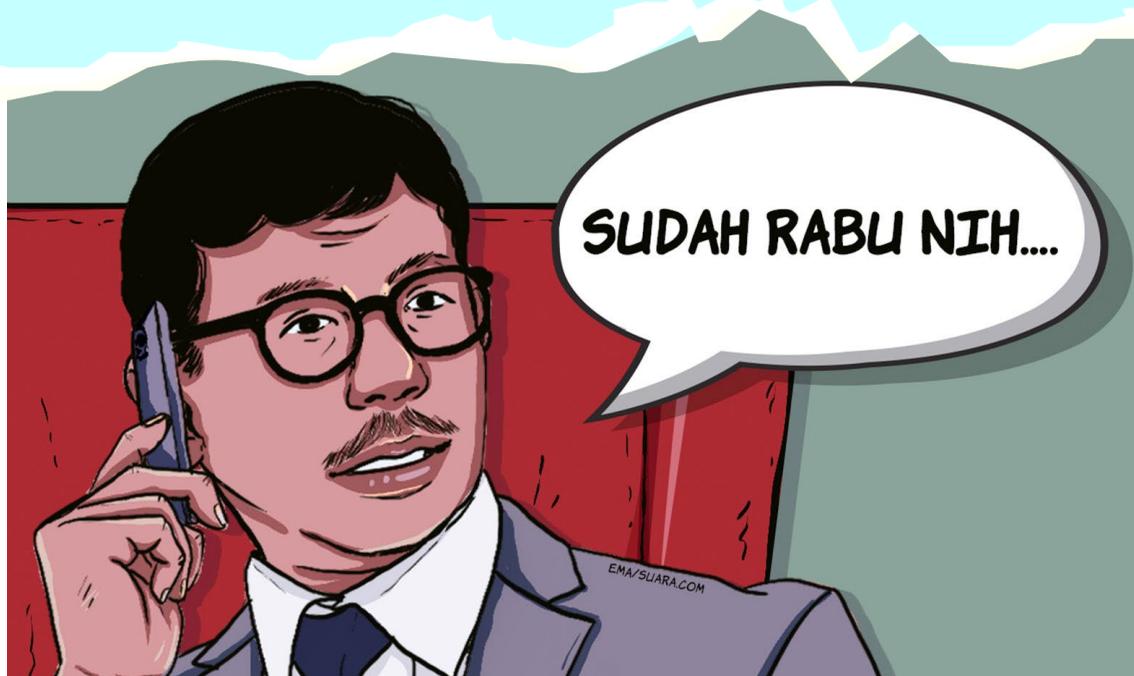
“Kejaksaan Agung mesti segera melakukan *asset tracing* terhadap pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana dari hasil korupsi dalam kasus ini,” ujarnya. Kejaksaan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga perlu memeriksa seluruh transaksi mencurigakan dalam kasus BTS BAKTI Kominfo ini. “Apa lagi kerugian negara akibat korupsi ini sangat besar, sekitar Rp1 triliun. Itu belum termasuk kerugian perekonomian yang dialami masyarakat yang terdampak proyek ini.”

Penulis: Riri Rahayu.

Sumber: <https://interaktif.tempo.co/proyek/johnny-plate-bts-BAKTI/>.

SINYAL DI PELOSOK BIARPET, SETORAN TETAP LANCAR SAMPAI JAKARTA

Suara.com edisi 20 Maret 2023.



Ambisi Presiden Jokowi untuk memasukkan semua daerah Indonesia dalam ekosistem digital - termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar - tampaknya masih jauh dari kata terwujud.

Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebenarnya sudah menyiapkan perangkat agar impian Jokowi di akhir masa jabatannya terakbul, yakni membangun ribuan *tower Base Transceiver Station* atau BTS 4G. Belakangan, instrumen itu dinamakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI.

Menteri Kominfo Johnny G. Plate lantas memasukkan program BAKTI dalam rencana strategis lembaganya, dengan model proyek *multiyear* yang dimulai tahun 2020 dan dipatok selesai tahun 2024. Namun, baru setahun pengerjaan, muncul masalah. Warga setempat, terutama di daerah timur Indonesia, mengakui tidak mendapat manfaat apa pun dari pembangunan *tower* BAKTI.

Transmisi sinyal internet *via tower* BAKTI seringkali biarpet. Tak jarang, mereka harus menggantungkan ponsel ke pohon tinggi agar mendapat layanan tersebut. Bahkan, anak-anak sekolah serta guru dibuat repot oleh keberadaan *tower* BAKTI saat harus mengikuti ujian berbasis internet. Ironis, para siswa dan guru justru terpaksa naik gunung demi menghindari sinyal BAKTI dan mendapatkan sinyal internet biasa, agar tak terganggu.

Proyek itu justru kuat diduga menjadi bahan bancakan banyak pihak. Nilai pengadaan barang dan jasa program BAKTI disinyalir digelembungkan sejak awal. Selain itu, ada dugaan patgulipat dalam proses tender proyek tersebut, sehingga biaya pembangunan *tower* bisa dicairkan bahkan sebelum program itu dilaksanakan.

Beragam kejanggalan dalam program itu membuat Kejaksaan Agung RI turun tangan. Hasilnya, sudah banyak pihak yang terlibat dalam proyek itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Suara.com bersama *Tempo.co*; *Jaring.id*, *Narasi TV*, *Tirto.id*, *Liputan6 SCTV*, dan *Detik.com*, yang berkolaborasi dalam Klub Jurnalis Investigasi (KJI), selama tiga bulan terakhir melakukan penelusuran terkait persoalan itu.

Kami menemukan adanya sejumlah kejanggalan dalam proyek BAKTI Kemenkominfo yang dimulai sejak 2020. Terutama, terdapat kesaksian yang mengarah pada adanya aliran uang proyek ke kantor pribadi sejumlah orang, termasuk petinggi Kementerian Kominfo, setiap hari Rabu.

Redaksi Suara.com.

Sumber: <https://liks.suara.com/specialreport/eb803e/sinyal-di-pelosok-biarpet-setoran-tetap-lancar-sampai-jakarta>.

ADA NAMA JOHNNY G. PLATE DI BERKAS KORUPSI BTS BAKTI KOMINFO

Suara.com edisi 30 Maret 2023.

Proyek pembangunan ribuan tower Base Transceiver Station BAKTI Kementerian Kominfo diduga menjadi bahan bancakan. Dalam berkas pemeriksaan seorang tersangka, nama Johnny G. Plate ikut disebut meminta kepeng.

Irwan Hermawan betul-betul terkejut ketika Anang Achmad Latif meminta bantuan dirinya dalam perjumpaan di kantor Moratelindo, di bilangan Tendea, Jakarta Selatan, awal 2021.

"Ini 500 sekali atau setiap bulan?" tanya Irwan.
"Setiap bulan," jawab Anang singkat.

Irwan terperangah. Berarti setiap bulan harus tersedia uang Rp500 juta. Menurut Anang, duit itu diminta Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G. Plate. Selang dua tahun setelah persuaan itu, persisnya 4 Januari 2023, Anang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sebagai Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika atau BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, ia diduga terlibat rasuah proyek infrastruktur BTS 4G serta prasarana pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 periode 2020-2022.

Sebulan kemudian, 7 Februari, giliran Irwan yang merupakan bos PT Solitechmedia Synergy, ikut dijadikan tersangka dalam perkara sama. Irwan diduga berperan sebagai pemberi saran dan masukan untuk menguntungkan perusahaan tertentu dalam lelang proyek tersebut.

Percakapan mengenai adanya permintaan sejumlah uang oleh Johnny G. Plate tersebut termaktub dalam berkas pemeriksaan Anang, yang didapat Klub Jurnalis Investigasi (KJI), Rabu, 29 Maret 2023.

Bila dirunut, isi pembicaraan Anang dan Irwan itu bermula pada 2020. Ketika itu, Anang menerima informasi dari Happy Endah Palupy - Kepala Bagian Tata Usaha Kominfo sekaligus sekretaris pribadi Plate - tentang kebutuhan 'biaya operasional'. Anang tidak merespons informasi yang disampaikan Happy di lantai 7 Gedung Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 7, Jakarta.

Tapi setahun kemudian, Anang mendengar langsung permintaan bantuan uang itu dari mulut Plate saat mereka bersua di ruangan menteri. Anang dalam berkas pemeriksaannya mengakui lupa hari dan tanggal perjumpaan dengan Plate. Ia hanya mengingat kejadiannya bulan Januari 2021. Tapi, Anang masih betul-betul mengingat isi percakapannya dengan Plate dalam pertemuan itu.

"Apakah Happy sudah menyampaikan sesuatu?" tanya Plate.

"Soal apa?" jawab Anang.

"Soal dana operasional tim pendukung menteri, sekitar 500 juta setiap bulan, untuk anak-anak kantor. Nanti Happy akan ngomong sama kamu," kata Plate.

Selepas pertemuan itu, Anang langsung menemui Happy. "Pak Menteri sudah menyampaikan soal dana operasional, tapi kasih saya waktu ya," pinta Anang. Tiga atau lima hari setelahnya, Anang kembali ditanya Happy mengenai setoran Rp500 juta per bulan tersebut. Anang menjawab, "Belum ketemu solusinya."

Beberapa hari kemudian, Anang bertandang ke kantor Moratelindo. Di sanalah ia bertemu dan meminta bantuan kepada Irwan. Setelah mendapat kesanggupan Irwan, beberapa hari kemudian, Anang kembali bertemu Happy. "Bila nanti ada dana operasional, kepada siapa diserahkan?" tanya Anang kepada Happy. Happy lalu memberikan nomor ponsel seseorang bernama Yunita, yang kemudian diserahkan Anang ke Irwan. "Ini kontak penerima kalau sudah ada solusi dana operasional tim pendukung pak menteri yang kemarin saya sampaikan," kata Anang.

Anang mengakui dalam berkas pemeriksaannya, setelah memberikan nomor kontak Yunita kepada Irwan, ia tak pernah lagi mengkonfirmasi apakah setoran Rp500 juta per bulan itu lancar.

Sebulan kemudian, Februari 2021, ketika Anang ke ruangan Plate untuk membahas pekerjaan, sang menteri sempat bertanya perihal realisasi setoran dana operasional itu. "Harusnya sudah pak menteri," jawab Anang. "Ini penting buat anak-anak kerja," timpal Plate.

Suara.com, bersama sejumlah media daring yang tergabung dalam KJI sudah berusaha mengonfirmasi dugaan aliran dana Rp500 juta tersebut melalui surat. Namun, surat yang ditujukan kepada Johnny G. Plate, Happy Endah Palupy, hingga Kepala Biro Humas Kominfo, Rhina Anita Ernita Martono, tak berbalas.

Padahal, Senin, 6 Maret 2023, *Suara.com* mendapat pemberitahuan dari Kominfo melalui pesan WhatsApp bahwa mereka sudah menerima surat permintaan konfirmasi itu dan teragendakan dengan nomor 557. Tim KJI kemudian sempat bertemu Rhina serta Usman Kansong—Dirjen Informasi dan Komunikasi Kominfo—di sela-sela acara konferensi pers di Kantor Kominfo, Jumat, 24 Maret. Baik Usman maupun Rhina mengakui tidak mengetahui adanya dugaan aliran uang yang disebut ‘dana operasional’ tersebut. “Mohon maaf, Kominfo belum bisa memberikan keterangan,” ujar Rhina.

Sabtu, 25 Maret akhir pekan lalu, tim KJI meminta keterangan dari Kresna Hutahuruk, kuasa hukum Anang Achmad Latif. Kresna hanya mengatakan proses penyelidikan terhadap kliennya serta pihak-pihak terkait perkara korupsi BTS BAKTI Kominfo itu masih diproses Kejaksaan Agung. “Klien kami siap mengikuti segala proses hukum yang sedang dan akan berjalan,” kata Kresna.

160. Agar saudara jelaskan pertemuan antara Menteri Kominfo (Johnny G Plate) dengan saudara antara bulan Januari s/d Pebruari 2021 di ruangan Menteri Kominfo dan apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Jelaskan!

160. Bahwa saya dipanggil oleh Pak menteri Kominfo Johny G plate antara bulan Januari s/d Pebruari di tahun 2021, saya lupa persis waktunya, di Ruang Menteri di Lantai 7 Kantor Kementerian Kominfo Jin Medan Merdeka Barat No.7 membicarakan tentang beberapa hal tentang masalah pekerjaan. Kemudian diakhir pertemuan Bapak Menteri menyampaikan "Apakah Happy sudah menyampaikan sesuatu" dan saya menjawab "Soal apa " dan Pak Menteri menjawab "Soal dana operasional tim pendukung Menteri sebesar 500 juta setiap bulan untuk anak-anak kantor. Nanti Happy akan ngomong sama kamu".

Cuplikan berkas pemeriksaan Anang Achmad Latif, Direktur Utama BAKTI Kominfo, yang menjadi tersangka kasus korupsi proyek pembangunan tower BTS. [Klub Jurnalis Investigasi].

Tiap Rabu

Johnny G. Plate, sebagai pucuk pemimpin lembaga yang menangani proyek itu, sudah dua kali diperiksa sebagai saksi, yakni 14 Februari dan 15 Maret 2023. Kali terakhir diperiksa, Plate didudukkan oleh penyidik sebagai pengguna anggaran (PA) perencanaan proyek BTS BAKTI. Plate diduga memanipulasi pertanggungjawaban kemajuan proyek BAKTI, sehingga 100 persen dana bisa dicairkan lebih dulu.

Sang menteri juga diperiksa terkait adik kandungnya, Gregorius Alex Plate, yang disebut menikmati fasilitas pemerintah berkat jabatan abangnya. Alex diketahui sudah mengembalikan sekitar Rp543 juta ke pemerintah dalam kasus ini. Jaksa mengatakan, uang lebih dari setengah miliar rupiah itu dikembalikan karena Alex mendapatkan fasilitas keuangan yang tidak seharusnya.

Tetapi menurut sejumlah sumber KJI yang mengetahui proses penegakkan hukum kasus ini, Plate juga diduga menerima setoran miliaran rupiah di beberapa bulan awal 2022, setelah dana proyek cair pada Desember 2021.

“Tiap Rabu disetornya,” ungkap sumber KJI, Kamis, 16 Februari lalu. Biasanya, uangnya disetor tunai melalui sopir Happy Endah Palupy. Uang yang diserahkan tersebut diduga berasal dari sejumlah pihak, termasuk Galumbang dan Irwan Hermawan. Duit yang diserahkan itu diduga berasal dari hasil pencairan anggaran proyek BTS BAKTI Kominfo.

Sumber KJI yang mengetahui proses pengerjaan proyek mengatakan, sejak awal dana pembangunan BTS 4G ini telah dinaikkan hingga lebih dari 40 persen. Ia mengungkapkan, untuk membangun satu *tower* BTS, menelan biaya Rp1,5 miliar hingga Rp1,8 miliar, tergantung spesifikasi serta lokasi. Namun, biaya itu justru digelembungkan menjadi Rp2,5 sampai Rp3,3 miliar per *tower*.

Tim KJI sudah menghubungi Plate dan Happy untuk mengkonfirmasi informasi ini. Telepon dan pesan pendek yang dikirim tidak ditanggapi. Surat permohonan wawancara juga sudah disampaikan, tetapi belum direspons. Muhammad Ali Nurdin, kuasa hukum Plate, hanya membalas memakai video bergambar anak-anak dan stiker orang sedang berdoa ketika dikonfirmasi Tim KJI via WhatsApp, Sabtu, 18 Maret. “Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT,” balas dia singkat.

Sementara Wakil Ketua Partai NasDem, Ahmad Ali mengatakan bahwa partai pernah bertanya kepada Plate soal keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi BTS

4G BAKTI. Plate menjawab, ia sama sekali tidak terkait kasus tersebut. “Ketika dia mengatakan tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya, apa kami harus tidak mempercayai?” kata Ahmad Ali, Sabtu, 18 Maret.

Di lain sisi, Kasubdit Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Haryoko Ari Prabowo yang saat KJI terkait setoran 'Rabu keramat' ini tidak membantah atau mengiyakan. “Kami belum bisa bilang ya atau tidak. Tapi kami masih mendalami,” kata Bowo sembari mengangguk-angguk saat diwawancarai KJI di Kantor Kejaksaan, Kamis, 23 Februari.

Bersiasat Sembari Main Kartu

Sebelum menjadi Menkominfo, Johnny G. Plate disebut sudah mengenal Jemy Sutjiawan, Direktur PT Sansaine Exindo - salah satu subkontraktor dalam proyek BTS BAKTI di wilayah Nusa Tenggara Timur. PT Sansaine Exindo mengerjakan proyek BTS jatah PT Fiberhome Technologies Indonesia (FTI), PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (Telkom Infra), dan PT Multi Trans Data—konsorsium yang memenangkan Paket I dari proyek yang dibelah menjadi lima bagian itu.

Sumber KJI dari penegak hukum membeberkan, Jemy memiliki kewenangan cukup besar di Kominfo. Jemy disebut terlibat dalam sejumlah pengadaan di Kementerian Kominfo, termasuk dalam perencanaan proyek BTS pada 2020. Jemy dan Plate disebutkan sering bermain kartu bareng di sejumlah hotel di Jakarta. “Di situ sambil mengatur proyek,” terang Sumber KJI.

Ia juga mengatakan, Jemy membeli sebuah pabrik di Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat yang digunakan untuk memberi cap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi material yang digunakan FTI, perusahaan asal Tiongkok. Jemy disinyalir membantu FTI mendapatkan proyek BTS 4G BAKTI, padahal perusahaan itu tak memenuhi sejumlah syarat kualifikasi soal kepemilikan teknologi BTS 4G – LTE.

Kesaksian sumber KJI tersebut diperkuat oleh Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, tentang dugaan patgulipat proyek tersebut. Dalam LHP BPK Nomor 40/LHP/XVI/01/2022 tertanggal 31 Januari 2022, disebutkan bahwa Fiberhome saat tender menggunakan kontrak milik perusahaan China yang lain, yakni Datang Mobile Communication Equipment Co. (DT)—untuk membuktikan kepemilikan teknologi BTS 4G-LTE. Padahal FTI hanya berperan sebagai *reseller* DT di Tanah Air.



KRONOLOGI KASUS BAKTI KOMINFO

2 NOVEMBER 2022

Kejagung meningkatkan status perkara dugaan korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo ke penyidikan.

4 JANUARI 2023

- Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka:
 - Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo, **Anang Achmad Latif**.
 - Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk (PT Moratelindo), **Galumbang Menak Simanjuntak**.
 - Tenaga ahli dari Human Development (Hudev) Universitas Indonesia, **Yohan Suryanto**.
- Anang diduga mengatur sedemikian rupa agar vendor tertentu bisa memenangkan proyek pembangunan BTS 4G.
- Anang mendapat masukan dari **Galumbang**.
- **Yohan diduga** merekayasa kajian teknis yang disusun lembaganya.

18 JANUARI 2022

Kejagung mencegah 23 orang yang diduga terlibat dalam kasus itu ke luar negeri.

25 JANUARI 2022

Direktur Akuntansi PT Huawei Tech Investment (PT HWI), **Mukti Ali ditetapkan sebagai tersangka ke-4**. Ia diduga berkongkalikong dengan Anang sampai akhirnya PT HWI dinyatakan menang tender.

7 FEBRUARI 2023

Komisaris PT Solitech Media Sinergy (PT SES) **Irwan Hermawan dijadikan tersangka**. Diduga juga berkongkalikong dengan Anang untuk mengarahkan ke perusahaan tertentu menjadi pemenang tender di semua paket proyek.

14 FEBRUARI 2023

- Plate diperiksa pertama kali sebagai saksi oleh Kejagung. Ia dicecar 51 pertanyaan selama lebih dari 10 jam.
- Plate ditanya soal pengawasan dan pengendalian proyek; peran menteri selaku pengguna anggaran, proses perencanaan hingga evaluasi.
- "Selaku pengguna anggaran, dia memiliki kewajiban melakukan evaluasi dan pengawasan penggunaan anggaran satuan kerja dibawahnya," Jaksa.

15 MARET 2023

- Plate kembali diperiksa Kejagung. Selama 6 jam, ia dicecar jaksa terkait peran sebagai Pengguna Anggaran, terutama soal tanggung jawabnya atas keuangan karena ada indikasi mark-up.
- Kebijakan yang bersangkutan terkait perencanaan pembangunan BTS yang seharusnya dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun, akan tetapi dilaksanakan dalam jangka waktu hanya 1 tahun.
- Adanya indikasi manipulasi pertanggungjawaban kemajuan atau progress proyek, sehingga seolah-olah pencairan 100% dapat dilaksanakan terlebih dahulu.
- Klarifikasi perihal adik kandung yang bersangkutan yaitu **GAP**, yang diduga menikmati fasilitas terkait dengan jabatan **JGP**, kakak kandungnya.
- Jaksa mengumumkan telah **menyita Rp543 juta dari GAP, adik Plate dalam kasus dengan tersangka Anang**.

"PT FTI adalah sebagai distributor yang ditunjuk DT untuk perdagangan produk DT di Indonesia," tulis BPK dalam laporannya, halaman 108.

BPK juga menemukan PT FTI tak memenuhi syarat tentang pengalaman pembangunan BTS seperti yang tercantum dalam dokumen prakualifikasi. Agar memenuhi syarat, setiap perusahaan peserta tender harus sudah pernah membangun BTS di Indonesia atau luar negeri dengan jumlah *site* minimal 50 persen dari jumlah paket yang diikuti dalam lelang. "Yang disampaikan bukan pengalaman dari PT FTI, melainkan pengalaman/kontrak antara DT dan China Mobile Communication Group."

Dalam syarat pengalaman pengoperasian dan perawatan BTS, FTI juga dinilai tak layak lolos karena lagi-lagi menggunakan dokumen pengalaman DT. "Fiberhome nurut ke Jemy, karena masuk (ke proyek BTS BAKTI) karena dorongan Jemy," kata sumber KJI. Dalam kasus BTS 4G BAKTI, Jemy termasuk saksi yang diperiksa pertama dan berkali-kali oleh Kejagung. Ia juga sudah dicegah pergi ke luar negeri.

KJI telah menghubungi Jemy untuk meminta konfirmasi. Ia menolak untuk menjawab pertanyaan dan mengatakan akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. "Mohon maaf sebelumnya kami belum bisa menjawab pertanyaannya," kata Jemy, yang pada 2002 pernah divonis 8 bulan penjara dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, saat dihubungi tanggal 2 Maret.

Tim KJI juga telah menghubungi konsorsium melalui PT FTI *via* WhatsApp, telepon, dan berkirim surat. Namun hingga tulisan ini tayang, belum ada jawaban yang diterima.

Sementara seusai memeriksa Plate pada Rabu, 15 Maret lalu, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung RI, Kuntadi mengatakan, gelar perkara akan dilakukan dalam waktu dekat. Salah satu tujuannya untuk menentukan status hukum Plate. "Sekaligus di dalamnya, termasuk juga terkait posisi JP," kata Kuntadi di kantor Kejagung pada Rabu, 15 Maret 2023.

Proyek Mangkrak

Patgulipat dalam proyek ini berujung pangkal pada ambisi Presiden Joko Widodo mempercepat transformasi digital seluruh daerah Indonesia. Instrumen utama untuk mewujudkan cita-cita sang presiden adalah membangun *Base Transceiver Station* (BTS) 4G BAKTI bagi wilayah 3T - tertinggal, terdepan dan terluar.

Berbekal perintah Jokowi, Kementerian Kominfo dalam rencana strategis 2020-2024, berambisi membangun lebih dari 9000 BTS di seluruh Indonesia. Sekitar 7.094 BTS akan dibangun BAKTI di wilayah 3T, sementara sisanya tanggung jawab operator telekomunikasi.

BTS 4G tanggung jawab BAKTI akan dibangun dalam dua tahap. Sebanyak 4.200 unit ditargetkan rampung tahun 2021. Sedangkan 3.704 unit sisanya tahun 2022. Awal 2021, BAKTI Kominfo mengumumkan pemenang tender proyek tahap satu. Dana proyeknya diestimasi menghabiskan Rp28,3 triliun.

Dana proyek tahap pertama itu bersumber dari *Universal Service Obligation* (USO) yang tak lain setoran para operator telekomunikasi, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan anggaran Kementerian Kominfo - dibagi juga dalam lima paket menurut wilayah. Pada Paket I, BTS 4G akan dibangun BAKTI di 725 desa di Sumatera, Nusa Tenggara, dan Kalimantan.

Sedangkan Paket II akan dibangun di 710 desa yang tersebar di Sulawesi serta Maluku. Dua paket proyek itu - dengan nilai sekitar Rp9,5 triliun - digarap oleh konsorsium PT FTI; PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom Infra); dan, PT Multi Trans Data (MTD).

Paket III - dikerjakan konsorsium PT Aplikasinusa Lintasarta (PT AL); PT Huawei Tech Investment (PT HWI); dan, PT Surya Energi Indotama (PT SEI)—membangun BTS 4G di 954 desa di Papua, Papua Barat, serta Papua Bagian Tengah-Barat. Proyek ini bernilai Rp6,8 triliun. Paket IV membangun BTS 4G di 966 desa di Papua Bagian Tengah-Utara. Sementara Paket V bertanggung jawab atas pembangunan 845 unit BTS di Papua Bagian Timur Selatan.

Dua paket yang disebut terakhir itu dimenangkan oleh konsorsium PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS) dan PT ZTE Indonesia (PT ZTEI). Nilai paketnya sekitar Rp11,8 triliun. Tapi, seluruh proyek tahap satu tak ada yang rampung sesuai target. Selain itu, sejumlah kejanggalan mulai bermunculan.

Mengutip LHP BPK yang diperoleh KJI, per 31 Oktober 2021 pengerjaan Paket I dan II baru rampung 63 persen dari target 93 persen. Sementara Paket III baru mencapai 79 persen dari target 86 persen. Paket IV dan V rampung 59 persen dari target 84 persen. "Dapat disimpulkan bahwa proyek BTS 4G pada 4.200 desa pada TA 2021 kemungkinan besar akan mengalami keterlambatan dari jadwal yang tertera dalam kontrak," tulis BPK dalam laporannya.

Tetapi sumber KJI yang terlibat dalam pembangunan BTS 4G BAKTI justru mengatakan hingga akhir 2021, hanya 320 unit yang sudah terbangun. “Bayangkan, dari 4.200 rencananya, di akhir 2021 baru selesai 320 BTS. Itu setahun kan?” kata dia.

Penelusuran KJI di lapangan pada pertengahan Maret, menguatkan hasil pemeriksaan BPK dan keterangan sumber tersebut. Di Desa Wangkar Weli, Kecamatan Poco Ranaka, Manggarai Timur, NTT, terlihat rangka menara BTS BAKTI bertuliskan Fiberhome teronggok di pinggir jalan. Damianus Jehadi, warga setempat, mengatakan rangka itu sudah tergeletak di lokasi tersebut sejak 2022. “Setahun lebih sudah,” kata Damianus saat ditemui tim KJI, Senin, 13 Maret.

Kondisi yang sama terjadi di Desa Compang Kantar, Kecamatan Rana Mese, Manggarai Timur. Elisabeth, warga lokal, menunjukkan kepada KJI menara BTS yang belum rampung dibangun sejak 2021. “Itu besi-besi *tower* yang belum dibangun. Buat menara. Sejak awal 2021. Padahal sudah lima kali pengerjaan dari lima perusahaan berbeda, tapi enggak jadi-jadi,” kata Elisabeth, Selasa, 14 Maret.

Survei dari Balik Meja

Selain adanya dugaan penyelewengan dana serta proyek mangkrak, terdapat persoalan ruwetnya tata kelola proyek pengadaan BTS 4G BAKTI Kementerian Kominfo. Dalam LHP BPK, lembaga itu menemukan masalah mulai dari perencanaan, lelang, serta implementasi proyek. Saat perencanaan, misalnya, survei lokasi dilakukan setelah penandatanganan kontrak pembelian.

Tak hanya itu, BPK juga menemukan adanya perbedaan komponen biaya dalam lingkup penawaran harga antara KAK, HPS, dan dokumen penawaran payung. “Bahkan terdapat pembangunan 2 BTS pada satu desa akibat adanya perubahan lokasi,” tertulis pada laporan BPK.

BAKTI disinyalir memperoleh data lokasi BTS 4G sebanyak 7.904 desa dari Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika (Ditdal PPI), alih-alih melakukan survei di lapangan. Alhasil ada BTS yang dibangun di lokasi yang sudah dilayani oleh *tower* Telkomsel, yang tidak lain adalah perusahaan milik Negara.

BPK menemukan jenis kontrak dan pelaksanaan kontrak tidak sesuai ketentuan. Ini diketahui dari perbedaan kontrak pembelian dengan kontrak payung pembangunan BTS paket 1, 2, dan 3. Perbedaan ini terjadi karena adanya perubahan spesifikasi pada kontrak pembelian dan kontrak payung. Sebab, BAKTI dan penyedia baru

melakukan survei setelah kontrak pembelian dan payung ditandatangani. Juga diketahui ada lahan BTS yang belum seluruhnya memperoleh izin mendirikan bangunan dan didukung dengan surat perjanjian pinjam pakai. "Akibatnya terdapat potensi pemborosan atas komponen biaya dalam kontrak sebesar Rp1,5 triliun," tulis BPK.

BPK juga menemukan proses pengadaan proyek BTS dan infrastruktur pendukungnya tidak sesuai ketentuan. Pada tahap kualifikasi, syarat dalam dokumen prakualifikasi disusun tidak sesuai ketentuan dan membatasi kesempatan partisipasi dari calon penyedia lain.

Pada tahap pelaksanaan tender, dokumen ternyata belum mengatur secara detail mekanisme dan aturan dalam pelaksanaan lelang. Bahkan, penyelenggara lelang tidak melakukan penilaian terhadap kewajaran harga satuan sehingga harganya membengkak.

BPK dalam pemeriksaannya juga menemukan masalah pada Peraturan Direktur BAKTI Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Infrastruktur BTS dan pendukungnya. Regulasi ini antara lain mengizinkan pembayaran dilakukan apabila barang atau perangkat telah berada di lokasi pekerjaan. Pembayaran di awal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Selain itu, tulis BPK, pembayaran sebelum proyek dilakukan ini melanggar Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Dua aturan ini melarang pembayaran di muka mencapai 80 persen, jika proyek belum dirampungkan.

KJI sudah mewawancarai juru bicara Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan terkait temuan BPK ini. Tapi Kemenkeu keberatan keterangan mereka dikutip. Sementara Achsanul Qosasi, Anggota III BPK, mengatakan semua laporan yang ditulis auditornya menyiratkan ada masalah dalam tata kelola proyek BTS 4G BAKTI Kominfo.

BPK, kata Achsanul, akan melakukan audit lanjutan untuk menindaklanjuti temuan baru terkait kerugian negara dan laporan keuangan kementerian dan BAKTI. "Kami belum bisa menyampaikan hasilnya karena masih dalam proses audit," ujarnya saat ditemui di Kantor BPK, Senin, 6 Maret 2023.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pun mengatakan hal serupa. Juru Bicara BPKP, Azwad Zamroodin Hakim mengaku, kerugian negara akibat korupsi BTS 4G yang dilakukan BAKTI Kominfo ini masih dalam proses perhitungan yang mereka lakukan sejak awal 2023.

Adapun ruang lingkup audit adalah Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2022 yang mencakup kegiatan yang berupa *capital expenditure*. "Kami masih dalam proses audit penghitungan keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyediaan Infrastruktur BTS," kata Azwad, Kamis, 2 Maret lalu.

Penulis: Liberty Jemadu dan Dicky Prastya.

Sumber: <https://liks.suara.com/read/2023/03/30/070000/nama-johnny-g-plate-di-berkas-kasus-bts-BAKTI-kominfo-minta-rp-500-juta-per-bulan>.



KISRUH PROYEK BTS 4G BAKTI KOMINFO, ACHSANUL QOSASI: INI MELAYANI SIAPA?

Suara.com edisi 20 Maret 2023.

Badan Pemeriksa Keuangan RI menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek penyediaan Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya, yang dibangun Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi alias BAKTI.

Pembangunan BTS 4G oleh BAKTI Kominfo ini menargetkan 7.904 lokasi di wilayah terluar, terdepan, dan terpencil (3T) yang dibagi dalam dua tahap, yakni 4.200 *site* di 2021 dan 3.704 *site* di 2022.

Khusus pada tahap 1, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp11 triliun, persisnya Rp11.042.168.261.000, yang bersumber dari Rupiah Murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Non Badan Layanan Umum (BLU). Hanya, temuan BPK mengungkap proyek tahap 1 itu bermasalah mulai dari perencanaan, prakualifikasi, tender, hingga pelaksanaan. Hal ini berujung pada tidak tercapainya

target pembangunan sekaligus ditetapkannya lima tersangka kasus korupsi BTS 4G oleh Kejaksaan Agung, salah satunya adalah Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif.

Suara.com yang tergabung dalam Klub Jurnalis Investigasi (KJI) bersama *Jaring.id*, *Tempo.co*, *Detik.com*, *Liputan6 SCTV*, *Tirto.id*, dan *Narasi TV* menemui Anggota III BPK, Achsanul Qosasi di kantornya pada Senin, 6 Maret 2023. Berikut penjelasan lebih lanjut dari Achsanul terkait temuan BPK dalam proyek BTS 4G yang dibangun BAKTI Kominfo pada 2021 lalu.

Bisa dijelaskan bagaimana awal mula adanya temuan BPK ini?

Saya harus ceritakan dulu bahwa BPK itu memeriksa di tahun 2021 dan tahun 2022 untuk BTS ini. Ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang sudah selesai memang, tahap perencanaan dan sebagian pada saat melakukan pembangunan BTS ini.

Ada hal yang terlambat dalam penyelesaiannya, yang pasti karena Covid-19 pada saat itu. Jadi BPK juga *fair* terhadap pembangunan-pembangunan di masa Covid-19, kami kurangi juga waktunya. Sehingga apa yang disajikan di laporan itu ya itulah adanya, tidak sesuai dengan target yang diputuskan. Targetnya itu sekitar 2000-4000, ternyata yang terselesaikan cuma 1.916 titik. Itulah yang terjadi faktanya. Alasannya karena Covid-19 ya kami terima. Cuma kan ada beberapa hal yang mestinya terselesaikan.

Ada beberapa syarat kualifikasi pemenang tender yang ditemukan bermasalah dalam temuan itu. Bapak bisa jelaskan?

Pada saat tender memang kami temukan beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Nah kita sampaikan di dalam LPH itu untuk dibaca. Mungkin penyidik juga bisa memanfaatkan laporan ini, saya persilakan.

Karena penyidik dari Kejaksaan Agung sudah berkoordinasi dengan BPK untuk melakukan hal tersebut, dan kami sajikan. Kami pernah ekspos juga di BPK dengan mereka. Kami sampaikan sejumlah temuan. Di dalam perjalanan memang ada sejumlah perbaikan yang dilakukan oleh Kemenkominfo. Jadi mereka cepat-cepat merespons karena dipanggil oleh aparat penegak hukum. Mereka cepat-cepat melakukan respons, menindaklanjuti temuan kami dengan membangun sejumlah *site* yang belum terbangun.

Kemudian memperbaiki yang menurut kami belum pas, tidak sesuai dengan spek. Sehingga mereka cepat mengejar waktu itu. Tapi proses hukum kan sedang berjalan.

Biar nanti penyidik dan para teman-teman di BAKTI ini untuk melakukan pembuktian tentang hal itu. BPK ada semua kertas kerjanya siap menyampaikan tentang itu.

Ada syarat kualifikasi harus mempunyai pengalaman, tapi ada beberapa PT yang ternyata tidak seperti itu. Apa komentar Anda?

Itu yang kami permasalahan juga, kami sampaikan. Artinya hal tersebut kan juga diakui oleh BAKTI, dan mereka terhadap laporan itu kan menerima dan akan menindaklanjuti terhadap temuan-temuan kami.

Cuma memang sulitnya, ini sudah ditunjuk dan sudah berjalan proyek ini. Kalau pembatalan tender misalnya, itu kan semakin merugikan negara nantinya karena sudah berjalan proyek ini. Sehingga bagaimana pun nanti untuk membenaran terhadap hal ini agar BAKTI membuktikan kepada BPK kalau itu memang tidak terjadi, rekayasa terhadap tendernya.

BTS ini sudah tercantum di renstra dan terkoordinasi dengan program-program lain yang dibangun dengan Kominfo seperti satelit dan Pusat Data Nasional (PDN). Bapak bisa jelaskan?

Ini merupakan program strategis nasional yang sudah disepakati merupakan bagian dari janji nawacita Presiden Jokowi pada saat itu. Waktu itu mereka bikin Palapa Ring barat, timur, dan tengah. Kemudian berikutnya adalah membuat *ground segment*. *Ground segment* itu ada sejumlah BTS-BTS. Bahkan nanti sampai kelurahan bakal menangkap sinyal-sinyal yang akan disiapkan oleh BTS-BTS ini.

Terakhir di bulan April akan ada yang namanya Satelit Indonesia Raya (SATRIA). Sehingga satelit ini diharapkan untuk daerah-daerah 3T, bisa menangkap sinyal, dan bisa menangkap informasi secara *up to date*. Itu adalah tujuan dari pemerintah agar rakyat bisa melek teknologi dan menerima informasi lebih cepat seperti sejumlah rakyat yang ada di kota besar.

Dalam perjalanannya memang yang Palapa Ring berjalan baik. Baik di barat, timur, dan tengah sudah *implemented*. Sudah jalan. Tinggal BTS ini ada permasalahan hukum memang. Seharusnya memang apa yang dibangun untuk SATRIA nanti, terakhir kan SATRIA. Jadi begitu SATRIA ini mengudara, mestinya sejumlah BTS yang dibangun itu bisa *applicable* dengan SATRIA.

Nah temuan BPK memang ada sejumlah alat-alat yang sudah terpasang, yang nantinya kalau SATRIA ini berjalan, artinya *on* mengudara, mereka harus mengganti lagi. Mengganti alat-alatnya karena tidak *applicable* terhadap SATRIA.

Nah hal-hal begini ke depan, ini kan baru 1.900 ya? Ke depan untuk pembangunan sisanya agar BAKTI ini memperhatikan bahwa ini SATRIA sudah pasti ada, ya negara harus menyiapkan kepentingan yang bisa *applicable* dengan SATRIA. Itu disiapkan dengan Kominfo, gitu.

Apa nama alatnya?

Nama alatnya saya enggak tahu. Tapi itu bagian dari penerima sinyal, kira-kira begitu. Itu yang harus diganti dan mestinya disiapkan dari awal, bahwa ini *applicable* dengan SATRIA nanti. Pertimbangan-pertimbangan dari pihak BAKTI pun sudah disampaikan kepada BPK.

Laporan BPK menyebutkan ada ketidaksesuaian dalam anggaran. Bapak bisa menerangkan itu?

Begini, ini masalah perencanaan. Pada saat merencanakan, mereka merencanakan program 7000-an titik ini di atas meja, istilah pemeriksa ya. Artinya tidak turun, tidak survei ke lapangan. Bahwa di sini, titiknya di sini. Sehingga pada saat pembangunan, banyak titik-titik yang mestinya tidak perlu dibangun. Karena *redundant* dengan punyaanya Telkomsel, dengan yang sudah ada. Medannya enggak bisa lah, enggak layak untuk dibangun. Bahkan di situ sudah ada (menara BTS).

Sehingga BPK minta jumlahnya harus dikurangi. Nah dengan jumlah pengurangan itu, tidak lagi 7.000 mestinya. Cukup sekian ribu, dari sejumlah angka yang ditemukan BPK. BAKTI pun menerima hal itu.

Artinya apa? APBN yang disiapkan untuk BTS ini enggak harus 7.000, harus berkurang dari itu. Nah itulah yang saat ini kami minta. Carilah titik yang sesuai. Jadi desanya itu memang sesuai betul, memang butuh itu. Kadang-kadang rakyatnya tidak ada. Gitu loh. Jadi ternyata begitu tim saya turun, ini tidak ada rakyat sama sekali. Terus ini melayani siapa? Akhirnya dibatalkan, dan itu cukup banyak yang begitu. Ya karena tadi perencanaannya tidak dilakukan secara matang.

Disebutkan ada beberapa anggaran pemborosan dalam laporan BPK. Apakah semua sudah terhitung, atau masih ada elemen-elemen lain?

Karena kami ini kan mengambil *random* ya, dan kami tidak (berdasarkan) populasi. Kalau populasi kan ribuan, makanya saya turunkan tim lagi untuk meyakinkan itu. Jadi dengan beberapa *sampling* yang kami lihat. Ya minimal itulah yang terjadi. Potensi lebihnya? Ya potensi lebih karena kami yang ambil ya itulah, kemungkinan terjadi lebih besar ya sangat mungkin.

Jadi BPK tidak memeriksa sampai ribuan titik. Kami ambil mungkin sekitar 700 atau 400. Pokoknya lebih dari 50 persen dan menurut kami itu sudah layak untuk diambil satu kesimpulan. Jadi bukan populasi, tapi kami ambil secara *random sampling*, dan itu di Indonesia Timur semua memang.

Bapak bersedia bicara soal berapa kerugian negara dalam proyek ini?

Mereka meminta perhitungan kerugian negara ini kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tapi dari total saya tidak bisa estimasi. Saya tidak ingin bicara di publik ini. Dari hasil LHP itu kami bisa hitung berapa besar. Itu baru yang kena *random* kan?

Tapi mereka (BAKTI) menerima. Di dalam LHP itu mereka menerima. Mereka akan memperbaiki. Nah sekarang mereka itu cepat sekali memperbaiki. Dalam 3-4 bulan terakhir, terhitung dari bulan September sampai dengan Desember 2022, begitu banyak perubahan yang sudah dilakukan.

Artinya dari yang tidak ada sekarang sudah mereka bangun, yang tadinya kurang mereka sudah,... Mereka cepat menindaklanjuti ini. Nah tinggal nanti tim saya akan turun lagi untuk mengecek. Makanya dua tim saya turunkan. Pertama tim untuk pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) untuk 2022, satu lagi tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk meyakinkan terhadap apa yang dilakukan oleh BAKTI. Apakah sesuai dengan yang kita harapkan?

Nah nanti kami akan koordinasi dengan penyidik, dan koordinasi dengan BPKP yang menghitung kerugian negara. Saya juga sudah sampaikan ke ketua BPKP agar *fair*, menghitungnya juga adil. Hasil BPK itu bisa dikoordinasikan dengan tim penyidik, dan itu pasti dilakukan. Biasanya mereka ini juga tidak sembarangan menentukan itu. Biasanya mereka datang ke kita, berdiskusi, bahkan ekspos. Sehingga rasa keadilan dalam hal melihat kesalahan seseorang itu betul-betul terjadi di sini.

Yang dikejar tim PDTT, apa hanya mencocokkan dengan rencana anggaran proyek, atau jauh lebih dari itu?

Jauh lebih dari itu.

Ada temuan lain, misalnya dugaan-dugaan atau hal lainnya?

Nah itu nanti diskusinya dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK pasti akan berdiskusi juga dengan kita tentang hal itu. Ya biarkan ini jalan dulu. Saya tidak ingin menyampaikan tentang metodologi pemeriksaan, karena itu menjadi domain pemeriksa dan itu tidak boleh diketahui siapa pun.

Tapi yang pasti, kami ingin pemeriksaan ini dilakukan untuk kepentingan penegak hukum. Agar penyidik mendapatkan informasi yang utuh tentang hal ini. Dan mereka betul-betul profesional di sini, antara penyidik dan pemeriksa sudah berkoordinasi.

Terhadap apa temuan kami, itu kan sudah ada fakta-faktanya. Sehingga penyidik berani menetapkan status seseorang. Silakan saja itu, itu kan kewenangan. Kami bukan aparat penegak hukum. Kami ini pemeriksa. Sehingga informasi dari kami itu bisa memperkuat dengan apa yang dibutuhkan oleh mereka.

Penulis: Liberty Jemadu dan Dicky Prastya.

Sumber: <https://liks.suara.com/read/2023/03/20/160500/kisruh-proyek-bts-4g-BAKTI-kominfo-achsanul-qosasi-ini-melayani-siapa>.

SINYAL HILANG, UANG NEGARA MELAYANG

Jaring.id edisi 20 Maret 2023.

Raut wajah Wilibrodus (42) tidak dapat menahan amarah. Bangunan tower Base Transceiver Station (BTS) di Desa Mokol Morid, Kecamatan Kota Komba, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, mangkrak sejak awal Januari 2022 lalu. Akibatnya, pria yang akrab disapa Wili tersebut tidak dapat menggunakan jaringan internet di daerahnya. Tak cuma itu, sumber penghidupannya juga terancam.

“Sebelum adanya tower Telkomsel BAKTI, kami sebagai pengusaha kecil di sini berusaha untuk jual pulsa. Tetapi dengan adanya BAKTI, kami merasa dirugikan. Alasannya, karena kami sebagai pengguna, yang menurut mereka akan terbantu dengan akses internet, ternyata seperti dibodohi dengan adanya tower ini,” ujar Wili saat ditemui tim *Jaring.id*, *Tempo.co*, *DetikX*, *Suara.com*, *Narasi TV*, *Liputan6 SCTV*, dan *Tirto.id* yang tergabung dalam Klub Jurnalis Investigasi (KJI) pada Jumat, 23 Februari 2023.

Sudah dua bulan Wili berharap sinyal dapat kembali hinggap di telepon genggamnya. Selama itu pula ia bersiasat memasang telepon genggam di antara ranting pohon yang tingginya 11 meter. Menurutnya, hanya dengan cara tersebut internet bisa diakses dengan lancar.

“Saya coba dengan dua *handphone*, satunya untuk tangkap sinyal, yang saya naikkan ke pohon dan satu lagi untuk operasi (mengakses) internet. Dengan cara itu kami bisa dapat jaringan,” ujarnya sembari menunjukkan tower BTS BAKTI yang sudah terbangun, tak jauh dari rumahnya.

Kondisi serupa dialami oleh Kinan (28), warga Kampung Komodo, Pulau Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sinyal memburuk setelah BTS yang digagas oleh Badan Akreditasi Komunikasi Internet (BAKTI) berdiri pada November 2020. “Sejak BTS diresmikan, jaringan Telkomsel yang digunakan warga sebelumnya terganggu,” ujarnya saat ditemui tim KJI pada Senin, 27 Februari 2023.

Selain macetnya jaringan Internet, sambungan telepon yang kerap tersendat juga dikeluhkan Kinan. Ia tidak dapat mendengar dengan jelas suara penelpon. "Suara putus-putus. BTS tidak ada gunanya. Bukannya membantu malah menyusahkan," ungkapnya dengan nada meninggi.

Lain Kinan, lain pula dialami oleh Edky (34), guru di salah satu sekolah di Desa Sipi, Elar Selatan, Manggarai Timur, NTT. Kegiatan belajar-mengajar yang biasa dilakukan dengan bantuan sambungan internet terganggu setelah adanya BTS 4G BAKTI. Kondisi semakin runyam lantaran November 2022 anak didiknya harus melakukan ujian nasional sekolah menengah pertama. Ia mesti menyiasatinya dengan membawa anak-didiknya berjalan sekitar 5 kilometer dari sekolah, menuju hutan. Di sana, sinyal internet justru stabil.

"Melaksanakan ujian Asesmen Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di tengah hutan," ujar Edky saat ditemui tim KJI pada Selasa, 22 Februari 2023. Ia kemudian melayangkan pengaduan kepada Kominfo dan direspons dengan kedatangan pihak BAKTI ke Desa Sipi. "Sekarang sudah bisa mengakses internet, YouTube, WhatsApp," katanya.

Cerita lain datang dari Elisabeth, warga Desa Compang Kantar, Manggarai Timur, NTT. Bukan sinyal yang ia keluhkan, tapi duit sewa rumah untuk pekerja proyek



Besi untuk tower pembangunan tower BTS 4G BAKTI tergeletak di tepi jalan di Desa Wangkar Weli, Nusa Tenggara Timur karena pembangunan yang mangkrak. (Foto: Tim KJI).

tower yang masih diutang. Ia baru menerima Rp6 juta dari total Rp13,5 juta untuk biaya menginap 15 pekerja *tower*.

Elisabeth tidak tahu ke mana harus menagih. Maklum, selama ini ia hanya mendapat bayaran melalui perantara kepala desa. Dari total Rp6 juta yang dibayarkan, ia hanya sekali menerima Rp1 juta melalui rekening pribadinya - tanpa tahu siapa yang mentransfer. "Mereka minta saya punya nomor rekening, terus saya kasih. Bulan sembilan, saya tidak ingat tanggal, tapi uang Rp1 juta masuk ke saya," ucap Elisabeth ketika ditemui di rumahnya, Selasa, 14 Maret 2023.

Elisabeth juga mengeluhkan besi-besi *tower* yang terbengkalai di tepi jalan lantaran pembangunan tak kunjung dilakukan. "Sudah sejak sekitar 2021, besinya sampai sekarang belum dibangun. Sudah setahun lebih," ujar Elisabeth.

Pembangunan BTS 4G BAKTI di wilayah NTT dikerjakan oleh PT Sansaine Exindo. Perusahaan ini ditunjuk sebagai sub kontraktor untuk membangun ribuan BTS oleh PT Fiberhome Technologies Indonesia. Sebagai salah satu perusahaan pemenang tender yang tergabung dalam konsorsium, Fiberhome memperoleh kontrak pembangunan 1.435 BTS 4G di wilayah Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Maluku untuk tahap satu. Nilainya mencapai Rp3,7 triliun dari Rp11 triliun yang bersumber dari Rupiah Murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) non Badan Layanan Umum (BLU).

Sebagai subkontraktor, Sansaine tidak mengerjakan sendiri pembangunan BTS. Mereka kembali menunjuk beberapa perusahaan untuk melakukan eksekusi di lapangan. Seorang pengusaha telekomunikasi yang enggan diungkap identitasnya mengungkapkan bahwa Sansaine sempat gagal memenuhi tenggat pembangunan 186 buah BTS yang nilainya ditaksir Rp97 miliar. Walhasil, perusahaan tersebut mesti melakukan peralihan subkontrak hingga 2 kali.

Masalah tak berhenti sampai di situ. Sansaine juga tak kunjung menyelesaikan pembayaran pembangunan BTS yang sudah diselesaikan oleh beberapa perusahaan yang mereka tunjuk. Salah satu pembayaran tertunggak nilainya bahkan mencapai Rp30 miliar. Padahal, sumber KJI mengklaim bahwa *invoice* sudah diajukan berulang kali. "Perencanaan enggak baik. (mulai dari) pengadaan barangnya, distribusi materialnya sehingga tim lapangan harus menunggu," ujar sumber tersebut saat ditemui di kantornya, Kamis, 9 Februari 2023.

Kejanggalan lain yang diungkap sumber KJI adalah dugaan manipulasi data. Sansaine diduga tidak melaporkan kondisi aktual di lapangan dalam berita acara serah terima yang dikirimkan perusahaan tersebut kepada Kominfo. "Dokumen (serah terima) di-submit selesai tapi secara aktual tidak terjadi. Tanda-tandanya adalah kami disuruh mengerjakan pekerjaan dalam waktu lima hari untuk mendukung (berita acara serah terima) itu. Ada dugaan pekerjaan di-submit-nya sudah selesai," ujar sumber KJI.

Kami berupaya untuk menghubungi Direktur Utama PT Sansaine, Jemy Sutjiawan. Ia hanya berkomentar kalau pihaknya akan mengikuti proses hukum yang saat ini masih berlangsung di Kejaksaan Agung. "Mohon maaf sebelumnya kami belum bisa menjawab pertanyaannya," kata Jemy melalui pesan WhatsApp, Jumat, 2 Maret 2023.

Jemy memang sempat dipanggil sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung terkait kasus pembangunan penyediaan infrastruktur (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun 2020-2022. Ia diduga punya hubungan dekat dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.

Menurut tiga sumber KJI, Jemy, Johnny, dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Anang Achmad Latif kerap mengadakan pertemuan di berbagai lokasi. Saat rapat pelaksanaan proyek BTS 4G BAKTI di Bali pada 18 Maret 2022, ketiganya juga duduk semeja. Bahkan mereka sempat terlihat berada dalam satu pesawat yang sama usai melakukan kegiatan di Yogyakarta.

Pertemuan-pertemuan tersebut diduga dilakukan untuk merancang siasat pemenangan tender pembangunan BTS 4G BAKTI yang merupakan proyek strategis nasional Presiden Joko Widodo. "Ke mana-mana menteri (pergi), dia (Jemy) ikut. Rupanya dulu sudah diatur," kata sumber KJI.

Pada 4 Januari 2023, Anang Achmad Latif telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan menara BTS 4G BAKTI. Ia disebut sengaja mengeluarkan peraturan yang bisa menutup peluang para calon peserta lain sehingga tidak terwujud persaingan usaha yang sehat dan kompetitif untuk mendapatkan harga penawaran.

Dalam dokumen prakualifikasi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terkait dengan Proyek Penyediaan Infrastruktur *Base Transceiver Station* (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukungnya pada Oktober 2020 memang disebutkan bahwa salah satu syarat

untuk mengikuti lelang adalah perusahaan mesti memiliki teknologi BTS 4G-LTE (Vendor BTS 4G-LTE). "Jadi, hanya perusahaan besar yang dapat ikut," kata sumber KJI.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2022 justru menemukan bahwa PT Fiberhome Technologies Indonesia sebagai salah satu perusahaan pemenang tender bukanlah pemilik teknologi. Fiberhome hanya melampirkan salinan kontrak pengalaman penggunaan teknologi BTS 4G yang dimiliki perusahaan Datang Mobile Communications Equipment Co., Ltd. (DT) untuk memenuhi persyaratan dokumen prakualifikasi.

Kami mencoba mengonfirmasi temuan ini kepada *Legal Manager* PT Fiberhome Technologies Indonesia, Ronald Samuel Hunga. Ia enggan berkomentar banyak lantaran saat ini pihak perusahaan masih menjadi saksi. "Apabila kami melakukan wawancara dengan pihak lain di luar investigasi Kejaksaan Agung maka itu tidak etis dan tidak patut dilakukan oleh kami. Kami menghormati dengan cara tidak memberikan keterangan apapun di luar keterangan yang telah kami sampaikan kepada Kejaksaan Agung," kata Ronald dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 6 Maret 2023.

Sebagai informasi, PT Fiberhome Technologies Indonesia bersama dengan PT Telkom Infra dan PT Multi Trans Data menjadi pemenang paket 1 dan 2 pengadaan *Base Transceiver Station* (BTS) 4G. Lokasi pengadaan tersebar di Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dengan nilai mencapai Rp9,5 triliun.

Kejanggalan lain yang ditemukan BPK adalah ditetapkannya konsorsium PT Aplikanusa Lintasarta, PT Huawei Tech Investment, dan PT Surya Energi Indotama (SEI) sebagai pemenang tender paket 3 pengadaan BTS 4G BAKTI senilai Rp6,8 triliun. Pasalnya, dokumen salinan kontrak yang dilampirkan untuk memenuhi persyaratan kualifikasi teknis tidak lengkap.

Rincian Biaya Kontrak Pengadaan Proyek BTS dan Infrastruktur Pendukungnya.

PAKET 1	PAKET 2	PAKET 3	PAKET 4	PAKET 5
Sumatera, Nusa Tenggara, dan Kalimantan.	Sulawesi dan Maluku.	Papua Barat dan Papua Bagian Tengah-Barat).	Papua Bagian Tengah-Utara.	Papua Bagian Timur-Selatan.

Sumber: BPK.

Dokumen salinan kontrak yang disampaikan Lintasarta misalnya, sebagian tidak dilengkapi lampiran atau rincian pekerjaan. Sementara itu, pengalaman pembangunan infrastruktur sejenis, pengoperasian dan pemeliharaan, serta penggunaan teknologi BTS yang disampaikan Huawei belum dapat dinilai pemenuhan jumlah *site* dan lingkup pekerjaannya lantaran informasi dalam lampiran dokumen kontrak dirahasiakan. Huawei juga tidak mencantumkan nama kontak dan penghubung kantor sebagaimana disyaratkan dalam dokumen prakualifikasi.

Country PR & Editor in Chief Huawei Indonesia, Damar Harsanto enggan berkomentar banyak soal temuan tersebut. "Saat ini sudah masuk ranah hukum Kejaksaan. Kami tidak bisa melayani permintaan wawancara terkait." kata Damar melalui pesan WhatsApp, Rabu, 8 Maret 2023.

Kami juga berusaha mengonfirmasi temuan BPK ke perusahaan lain pemenang tender seperti PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia, PT Multi Trans Data, PT Lintasarta, PT Surya Energi Indotama, IBS, dan ZTE dengan berkirim surat sejak sepekan lamanya. Namun, hingga naskah ini tayang, surat yang kami layangkan belum berbalas.

Seorang sumber dari kalangan penegak hukum menyebut bahwa sedari awal perencanaan pembangunan BTS 4G BAKTI memang tidak matang. Laporan yang disampaikan selama proses pengerjaan, dinilainya juga tak akuntabel. "Semua sudah diatur (pemenangnya). Kami menemukan *chat handphone* (berisi pengaturan)," ujarnya. Ia menambahkan, berdasarkan hasil penelusuran terungkap bahwa ada pembangunan BTS yang mangkrak, tetapi seolah-olah selesai dikerjakan. "Buktinya kan foto tuh. Tempel foto (di satu laporan), lalu ganti. Tempel lagi, lalu cabut (lagi). Jadi, barangnya sama. Pokoknya asal duit cair, laporan masuk," ungkapinya.

Sementara itu, Auditor BPK, Achsanul Qosasi menyampaikan bahwa temuan BPK menyiratkan adanya tata kelola pengadaan proyek BTS 4G BAKTI yang tidak sesuai ketentuan, mulai dari perencanaan hingga pengerjaan. Lembaganya menemukan bahwa terdapat titik lokasi pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan adanya pembangunan BTS yang dilakukan hingga dua kali. "Begitu tim turun, tidak ada rakyatnya sama sekali (di lokasi rencana pembangunan). Akhirnya dibatalkan karena perencanaan tidak matang," kata Achsanul saat ditemui di kantornya, Senin, 6 Maret 2023.

BPK, menurutnya, bakal melakukan audit lanjutan untuk merespons temuan baru terkait kerugian negara serta laporan keuangan kementerian dan BAKTI. "Kami belum bisa menyampaikan hasilnya karena masih dalam proses audit," ujarnya.

Achsanul menambahkan bahwa sengkabut pembangunan BTS 4G BAKTI bakal berimbas pada rencana peluncuran satelit SATRIA oleh Kemenkominfo pada April 2023. Satelit tersebut diluncurkan untuk mendukung percepatan akses internet ke daerah, dengan BTS sebagai jalur penghubungnya. Namun, dalam penelusuran BPK, BTS 4G BAKTI ternyata tidak menggunakan alat yang dapat menangkap sinyal dari SATRIA. Walhasil, ada potensi satelit tidak dapat dioperasikan atau mengubah pekerjaan BTS yang telah dibangun.

“Mestinya disiapkan dengan awal bahwa akan *applicable* dengan SATRIA,” ujarnya. Dari sekelumit masalah itu, BPK mempersilahkan aparat penegak hukum untuk menggunakan hasil audit yang dilakukan jika dibutuhkan. “Silakan jika APH membutuhkan kami akan memberikan datanya,” ujarnya.

Kepala Sub Direktorat Penyidik Kejaksaan Agung, Haryoko Ari Prabowo menyampaikan bahwa saat ini Kejaksaan Agung masih terus mendalami kasus pengadaan BTS 4G BAKTI. “Proyek berjalan atau enggak? Selesai apa enggak? Ada penyelewengan enggak? itu yang masih kami lengkapi. Kalau jumlahnya berapa, saya belum bisa katakan sekarang. Bukan berarti belum tahu. Kami harus ada bukti yang didapat,” kata Prabowo saat ditemui pada Kamis, 23 Februari 2023.

Kejaksaan Agung telah memanggil Menteri Kominfo, Johnny G. Plate sebagai saksi kasus untuk kali kedua pada Rabu, 15 Maret 2023. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem itu diperiksa selama enam jam dan dicecar 26 pertanyaan. Sebelumnya, Johnny diperiksa pada 14 Februari 2023. Ia diperiksa selama 10 jam dan dicecar 51 pertanyaan ihwal pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan proyek pembangunan BTS 4G BAKTI.

Kejaksaan Agung juga memeriksa Gregorius Alex Plate, adik Johnny Plate. Belakangan, Gregorius mengembalikan uang senilai Rp534 juta ke Kejaksaan Agung. “Yang jelas itu dana dari BAKTI. Bagaimana itu terjadi itu jadi materi kami untuk gelar perkara” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kejaksaan Agung, Kuntadi dalam konferensi pers, Rabu, 15 Maret 2023.

Pada pemeriksaan pertama, Johnny sempat menyampaikan dirinya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan soal dugaan korupsi proyek BTS 4G BAKTI. “Saya telah memberikan keterangan atas pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik. Secara khusus mengenai fungsi kewenangan sebagai Menkominfo,” katanya pada 14 Februari 2023.

Kami mencoba menghubungi Johnny melalui telepon genggamnya untuk melakukan konfirmasi. Namun, nomor telepon yang kami hubungi tidak lagi aktif. Tim KJI juga telah melayangkan surat ke Kominfo pada Senin, 6 Maret 2023, tetapi belum mendapat jawaban hingga naskah ini diterbitkan.

Sementara itu, kuasa hukum Plate, Muhammad Ali Nurdin saat dihubungi melalui pesan Whatsapp hanya membalas pertanyaan tim KJI dengan mengirimkan video memberi santunan kepada sejumlah anak-anak. Dia juga mengirimkan stiker gambar orang tengah berdoa. "Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT," begitu kalimat dalam stiker yang dikirim Ali Nurdin kepada tim KJI melalui WhatsApp pada Sabtu, 18 Maret lalu.

Wakil Ketua Partai NasDem, Ahmad Ali mengaku pernah berbicara langsung dengan Plate terkait kasus proyek BTS. Ia menceritakan ada tiga pertanyaan yang diajukan kepada Plate saat Kejaksaan Agung menetapkan tersangka pada Januari 2023. Pertanyaan pertama, terkait kronologis peristiwa. Lalu soal dugaan keterlibatan Plate. Terakhir, terkait hubungan kasus ini dengan Kominfo.

Menurut Ali, Plate mengaku kasus bahwa kasus BTS tak berhubungan dengan dirinya. Lantaran itu, Ali percaya apa yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem sekaligus Menkominfo tersebut sembari menunggu proses hukum yang sedang berjalan. "Kami percaya bahwa Pak Plate Insya Allah dia tidak punya hubungan," kata Ali kepada tim KJI, Sabtu, 18 Maret 2023.

Ali menyatakan partai Nasdem punya aturan tegas soal korupsi. Ketika salah satu anggotanya terlibat, ia diminta mengundurkan diri. Apabila permintaan diabaikan, maka partai akan melakukan pemecatan. "Apalagi sudah ditetapkan sebagai tersangka, umpamanya, partai akan melaksanakan peraturan internalnya," ungkap Ahmad Ali

Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak menghormati proses hukum dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan BTS 4G BAKTI. "Semua proses hukum kita hormati," ujarnya usai menghadiri pembukaan *Business Matching* Produk Dalam Negeri di Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023.

Redaksi Jaring.Id.

Sumber: <https://jaring.id/sinyal-hilang-uang-negara-melayang/>.

ACHSANUL QOSASI: PEMBANGUNAN BTS 4G TAK LIHAT KONDISI DI LAPANGAN

Jaring.id edisi 20 Maret 2023.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Menemukan sejumlah masalah dalam pembangunan proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukungnya. Proyek strategis Presiden Jokowi ini menelan biaya hingga Rp28 Triliun dengan target 7.200 menara di wilayah Terluar, Terdepan, dan Terpencil (3T).

Dalam audit tujuan tertentu yang dilakukan BPK, masalah ditemukan mulai dari proses perencanaan, prakualifikasi, pengumuman tender, hingga pelaksanaan. Pada tahap pertama pembangunan yang menargetkan 4.200 BTS senilai Rp11 triliun, BTS yang rampung terbangun baru sekitar 2000-an. Tim Klub Jurnalis Investigasi (KJI) yang terdiri dari *Jaring.id*, *Tempo.co*, *DetikX*, *SCTV*, *Tirto.id*, dan *Suara.com* menemui anggota BPK, Achsanul Qosasi pada Maret 2023 untuk mengetahui lebih detail hasil pemeriksaan BPK. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana awal mula BPK melakukan audit terhadap proyek ini?

Saya harus ceritakan BPK memeriksa pada 2021 dan 2022. Untuk BTS ini, ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selesai tahap perencanaan dan pembangunan BTS. Apa yang ada di laporan tidak sesuai target yang disesuaikan. Alasannya covid, ya kami terima. Cuma kan ada beberapa hal yang mestinya diselesaikan.

Dalam audit BPK disebutkan ada beberapa syarat prakualifikasi yang tidak sesuai. Bisa dijelaskan?

Saat tender kami temukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan persyaratan. Penyidik bisa memanfaatkan laporan ini. Para penyidik Kejaksaan Agung sudah koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Kami sampaikan sejumlah temuan kami ke mereka. Dalam proses audit, dalam perjalanannya, ada sejumlah perbaikan yang dilakukan oleh Kominfo.

Ini merupakan program strategis nasional yang sesuai nawacita presiden. Sehingga BAKTI bikin Palapa Ring Barat, Timur, Tengah. Adapun BTS bahkan digunakan untuk menangkap sinyal yang disiapkan BTS ini. Pada April nanti akan ada Satelit SATRIA, diharapkan di daerah 3T bisa menangkap sinyal dan informasi *ter-update*. Itu tujuan pemerintah agar (masyarakat) melek teknologi dan mempercepat akses informasi. Dalam perjalannya Palapa Ring berjalan dan tinggal BTS ini yang ada masalah hukum.

Sejumlah BTS harusnya bisa aplikatif terhadap Satelit SATRIA. Temuan BPK, BTS harus ganti alatnya karena tidak aplikabel terhadap SATRIA. Ke depan pembangunan (BTS) sisanya agar BAKTI memperhatikan. Mestinya disiapkan sejak awal bahwa (BTS) akan aplikabel dengan Satelit SATRIA.

BPK juga menemukan adanya Ketidaksesuaian anggaran. Itu seperti apa?

Ini masalah perencanaan. Pada saat merencanakan 7.000 titik (pembangunan) dilakukan di atas meja. Istilah pemeriksa tidak turun survei ke lapangan. Sehingga mestinya tidak perlu dibangun karena (BTS BAKTI) *redundant* dengan telkomsel. Maka, BPK minta jumlahnya dikurangi. Dengan pengurangan itu mestinya tidak 7.000 titik. Jadi, APBN yang disiapkan untuk BTS ini enggak harus 7000 titik. Harusnya berkurang dari itu. Carilah titik yang sesuai kebutuhan desa. Kadang rakyatnya tidak ada di lokasi pembangunan *tower*. Akhirnya (pembangunan BTS) dibatalkan karena perencanaan tidak matang.

Pembangunan ini juga dinilai melakukan pemborosan. Bisa diperjelas?

Kami ambil sampel *random*. Kami tidak menggunakan sistem populasi. Kan ada ribuan (titik), makanya saya turunkan tim lagi. Dengan beberapa *sampling*, minimal itu yang terjadi. Potensi (kerugian) lebih besar sangat mungkin. Bisa dikatakan BPK tidak memeriksa ribuan titik. Kita ambil lebih dari 50 persen agar layak diambil kesimpulan.

Redaksi Jaring.id.

Sumber: <https://jaring.id/achsanul-qosasi-pembangunan-bts-4g-tak-lihat-kondisi-di-lapangan/>.



NAMA PETINGGI KOMINFO DALAM PUSARAN KORUPSI MENARA SINYAL

Tirto.id edisi 20 Maret 2023.

Proyek Rp28,3 triliun yang seharusnya jadi jalan mengentaskan ketertinggalan di Indonesia diduga dikorup segelintir elite. Menteri Plate disebut terlibat.

Nada bicara Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerdard Plate tak selantang biasanya usai diperiksa Kejaksaan Agung pada 14 Februari malam. Padahal, politikus Partai Nasdem itu terkenal dengan suaranya yang keras dan nyaring sejak duduk di kursi anggota Komisi XI DPR RI. "Terkait dengan permasalahan hukum, pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) 4G pada badan layanan umum BAKTI yang berada di Kominfo sebagai organisasi non-eselon," kata Jhonny.

Ada jeda sekitar satu detik Plate terdiam dan menarik napas sebelum menyebut nama lembaga yang dirinya pimpin. Hari itu, ia diperiksa lebih dari sembilan jam dan

dicecar sebanyak 51 pertanyaan sebagai saksi dalam dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G - proyek lembaganya sendiri - yang sedang diusut Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, ia mangkir saat dipanggil pada 9 Februari karena berdalih menemani Presiden Joko Widodo saat perayaan Hari Pers Nasional di Medan, Sumatera Utara. Belakangan, menteri kelahiran Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur itu hadir di pemanggilan ketiganya pada 15 Maret lalu.

Pemanggilan terhadap Plate dilakukan usai Kejaksaan Agung menetapkan lima orang tersangka dalam dugaan korupsi menara BTS proyek Kementerian Kominfo, yang sedari awal diniatkan untuk penyediaan jaringan sinyal di daerah terdepan, terpencil, dan terluar (3T).

Tiga orang pertama yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) - sebuah badan layanan umum di bawah Kementerian Kominfo - Anang Achmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk (PT Moratelindo), Galumbang Menak Simanjuntak, dan tenaga ahli dari *Human Development* (Hudev) Universitas Indonesia, Yohan Suryanto pada 4 Januari lalu.

Dalam penyidikan Kejaksaan Agung, Anang diduga mengatur sedemikian rupa - salah satunya dengan menekan aturan teknis - agar *vendor* tertentu bisa memenangkan proyek pembangunan BTS 4G. Dalam manuver tersebut, Anang mendapat masukan dari Galumbang - pemimpin salah satu perusahaan penyedia perangkat proyek BTS. Sedangkan Yohan, diduga merekayasa kajian teknisnya. Apa yang mereka lakukan adalah patgulipat menutup kesempatan perusahaan lain untuk bersaing secara sehat.

Pada 25 Januari lalu, orang keempat yang ditetapkan tersangka adalah Direktur Akuntansi PT Huawei Tech Investment (PT HWI), Mukti Ali. Ia diduga berkongkalikong dengan Anang - saat perencanaan hingga penawaran harga - sampai akhirnya PT HWI dinyatakan menang tender. Sedangkan tersangka kelima - yang ditetapkan pada 7 Februari - adalah Komisaris PT Solitechmedia Synergy (PT SES), Irwan Herawan, yang diduga juga berkongkalikong dengan Anang untuk mengarahkan ke perusahaan tertentu menjadi pemenang tender di semua paket proyek.

Demi Sinyal Senilai Puluhan Triliun

Proyek pengadaan menara BTS 4G ini memang lahan basah yang rentan terjadi penyelewengan. Selama hampir tiga bulan terakhir, kami dari Klub Jurnalis

Investigasi (KJI) - koalisi sejumlah media yang terdiri dari *Tempo.co*, *Liputan6*, *SCTV*, *Narasi TV*, *Suara.com*, *Jaring.id*, *Detik.com*, termasuk juga *Tirto* - menelusuri lebih detail bagaimana proyek yang seharusnya bisa mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan lewat amanat hak atas informasi justru diduga jadi bancakan segelintir orang rakus.

Membangun menara BTS 4G awalnya adalah proyek Kementerian Kominfo yang digarap oleh BAKTI. Dalam Rencana Strategis 2020-2024, targetnya tak main-main: pembangunan 9.583 unit menara BTS 4G hingga 2023. Pada 2020, pembangunannya sudah mencapai 1.679 unit. Belakangan, tersisa 7.904 unit yang akan dibangun sepanjang 2021-2023.

Total angka proyeknya mencapai Rp28,3 triliun, yang berasal dari tiga sumber: *Universal Service Obligation (USO)*, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan anggaran Kementerian Kominfo. Besaran angka ini diakui sendiri oleh Plate. Rencananya, semua unit BTS yang dibangun tersebut akan disewakan ke dua operator di Indonesia: Telkomsel dan XL.

Untuk membangun itu semua, proyek dibagi menjadi dua tahap: 4.200 unit pada 2021 dan sisanya pada 2022. Dalam dokumen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kami terima, diketahui pembangunan tahap satu itu - yang angkanya mencapai Rp11 triliun - kemudian dipecah menjadi lima paket berbeda sesuai pembagian wilayah, yang dikerjakan oleh tiga konsorsium perusahaan berbeda.

Untuk Paket I, rencananya pembangunan unit berada di 725 desa yang tersebar di Sumatera, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Angkanya masih dipecah menjadi dua tahap: 417 desa senilai Rp1,2 triliun untuk tahap satu dan 308 desa senilai Rp874 miliar untuk tahap dua.

Sedangkan Paket II, rencana pembangunan unit berada di 710 desa yang tersebar di Sulawesi dan Maluku. Angkanya masih dipecah menjadi dua tahap: 409 desa senilai Rp983 miliar untuk tahap satu dan 301 desa senilai Rp720 miliar untuk tahap dua. Kedua paket itu digarap oleh konsorsium tiga perusahaan: PT Fiberhome Technologies Indonesia (PT FTI), PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom Infra), dan PT Multi Trans Data (MTD) - berikutnya akan disebut konsorsium FTM.

Untuk Paket III, rencananya pembangunan unit berada di 954 desa yang tersebar di Papua Barat dan Papua Bagian Tengah-Barat. Angkanya masih dipecah menjadi dua tahap: 549 desa senilai Rp1,4 triliun untuk tahap satu dan 405 desa senilai Rp1,3 triliun untuk tahap dua.

Paket itu juga digarap oleh konsorsium tiga perusahaan: PT Aplikasinusa Lintasarta (PT AL), PT Huawei Tech Investment (PT HWI), dan PT Surya Energi Indotama (PT SEI) - berikutnya akan disebut konsorsium LHS. Salah seorang petinggi PT HWI, Mukti Ali, menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini karena ikut kongkalikong dengan pihak BAKTI dalam memenangkan tender.

Bergeser ke Paket IV, rencananya pembangunan unit berada di 966 desa yang tersebar di Papua Bagian Tengah-Utara. Angkanya masih dipecah menjadi dua tahap: 556 desa senilai Rp1,2 triliun untuk tahap satu dan 410 desa senilai Rp1 triliun untuk tahap dua.

Dan terakhir untuk Paket V, rencana pembangunan unit berada di 845 desa yang tersebar di Papua Bagian Timur Selatan. Angkanya masih dipecah menjadi dua tahap: 486 desa senilai Rp1,1 triliun untuk tahap satu dan 359 desa senilai Rp965 miliar untuk tahap dua. Agak berbeda dengan dua konsorsium lainnya, konsorsium yang menggarap Paket IV dan Paket V hanya terdiri dari dua perusahaan: PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS) dan PT ZTE Indonesia (PT ZTEI) - berikutnya akan disebut konsorsium IBS-ZTE.



PROYEK SINYAL JUMBO BUNG JOHNNY

TARGET 2020 - 2024

- 9.583 unit BTS - 1 unit/desa wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).
- Total proyek mencapai **Rp28,3 triliun**.
- Rencana disewakan ke 2 operator: **Telkomsel & XL**.

PEMBANGUNAN TAHAP 1 (2021) MELIBATKAN 3 KONSORSIUM

Konsorsium FTM

- PT Fiberhome Technologies Indonesia.
- PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia.
- PT Multi Trans Data.

Konsorsium LHS

- PT Aplikasinusa Lintasarta.
- PT Huawei Tech Investment, **petingginya tersangka kasus korupsi**.
- PT Surya Energi Indotama.

Konsorsium IBS-ZTE

- PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera.
- PT ZTE Indonesia.
- PT Surya Energi Indotama.

Infografik Proyek Sinyal Jumbo Bung Johnny. tirto.id/Ecun.

Nama Menteri Pencari Dana

Sumber kami di lingkaran aparat penegak hukum yang tahu soal pemeriksaan kasus ini, mengklaim timnya menemukan indikasi awal kongkalikong pengaturan tender pemenang proyek menara BTS oleh BAKTI lewat gawai sejumlah pihak yang sudah ditahan, salah satunya milik Anang. Setelah didalami lebih lanjut, ternyata Galumbang adalah orang yang mengatur semua ketersediaan anggaran BAKTI untuk proyek ini. "Pengadaan, ketersediaan dana anggaran, semua dia yang lobi dan dorong. GLB [Galumbang] pintar cari duit," katanya kepada kami, 16 Februari lalu.

Sepenelusuran sumber kami, Galumbang dibantu sejumlah pihak untuk meyakinkan - sembari menyuap - para pemangku kebijakan bahwa proyek menara BTS ini penting, tapi memerlukan dana yang tak sedikit. Salah seorang yang membantu Galumbang adalah teman dekatnya sendiri, Irwan - tersangka kelima dalam kasus ini.

Irwan inilah, menurut sumber kami, yang diduga bergerilya menemui sejumlah pemangku kebijakan, termasuk ke Menteri Plate. Irwan diduga meminta Plate untuk menjamin ketersediaan dana di BAKTI guna memuluskan proyek ini. Dari sana, Plate melobi ke sejumlah lembaga negara untuk pendanaan proyek ini, termasuk Kementerian Keuangan dan DPR RI.

Tak ada makan siang yang gratis. Plate diduga menerima uang sebesar miliaran rupiah per pekan yang disetor setiap Rabu. Setoran itu diserahkan secara tunai oleh Irwan lewat salah seorang supir pribadi Happy Endah Palupy, Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Kominfo - yang ikut diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung. Supir tersebut biasanya mengambil duit di hotel yang berbeda-beda. "Ya bagaimana? Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tidak bisa mengecek," kata sumber kami itu.

Kepala Subdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Haryoko Ari Prabowo, tak menjawab dengan tegas ketika kami konfirmasi soal sejumlah uang yang diterima oleh Plate. "Segala informasi itu masuk ke kami. Tinggal bagaimana kami membuktikan apakah informasi itu benar atau tidak. Enggak sebatas informasi ini saja. Banyaklah informasi yang lain. Dengan ini, kami masih belum bisa bilang ya atau tidak, tapi kami masih mendalami. Yang didalami tidak hanya informasi ini," katanya kepada kami, 23 Februari lalu.

Soal dugaan aliran dana ini, kami sudah berusaha meminta konfirmasi langsung ke Menteri Plate saat kami datang ke kantor Kementerian Kominfo pada 9 Maret lalu.

Beberapa orang dari tim kami sudah berusaha memanggil dan meminta wawancara saat Plate melewati pintu utama gedung Kementerian Kominfo. Namun, dihalang-halangi oleh penjaga. "Pak Plate, boleh wawancara sebentar, Pak?" "Tidak bisa diwawancara bapak. Enggak bisa, enggak bisa, ada prosedurnya. Nanti kita yang kena."

Kami juga berusaha menghubungi kuasa hukum Menteri Plate, M. Ali Nurdin, untuk bertanya perkara ini. Namun, saat dihubungi via pesan teks WhatsApp pada 18 Maret siang, ia hanya membalas dengan mengirim video dirinya dalam agenda pemberian santunan ke sejumlah anak kecil.

Plate sendiri sebenarnya pernah membantah dugaan keterlibatannya dalam kasus ini ke Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali. Kepada kami, Ahmad Ali mengaku pernah berbicara langsung dengan Plate terkait dugaan korupsi proyek menara BTS 4G pada medio Januari lalu.

Kepada kami, ia bercerita bahwa setelah Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah tersangka pada Januari lalu, dirinya langsung mengajukan tiga pertanyaan kepada Plate: terkait kronologis peristiwa, dugaan keterlibatan Plate, dan terkait hubungan kasus ini dengan Kementerian Kominfo.

Plate, kata Ahmad Ali, menjawab dengan yakin bahwa dia sama sekali tidak terlibat dalam kasus korupsi ini. "Tidak ada hubungannya," kata Plate waktu itu, sepenuturan Ahmad Ali kepada kami, 18 Maret siang. Dengan jawaban seperti itu, partai memilih untuk mempercayai bahwa Plate tidak terlibat dalam kasus ini. Namun demikian, Ahmad Ali menyebut partainya tetap bakal menghormati proses penegakan hukum yang tengah berlangsung. Apabila nantinya, dalam proses penyidikan ditemukan fakta-fakta bahwa Plate terlibat, maka Partai NasDem siap mengambil langkah tegas.

Aturan internal Partai NasDem, lanjut Ahmad Ali, tegas menyebut bahwa siapapun kader partai yang terlibat dalam kasus korupsi bakal dipersilakan untuk segera mengundurkan diri, atau kalau tidak, bakal dipecat. "Apalagi sudah ditetapkan sebagai tersangka, umpamanya, partai akan melaksanakan peraturan internalnya," katanya kepada kami.

Kami telah berupaya mengajukan permohonan wawancara ke semua perusahaan yang disebutkan di atas lewat surat, telepon, dan pesan singkat. Dari 11 perusahaan yang kami minta konfirmasi, hanya empat yang membalas surat, telepon, maupun

pesan singkat kami. Fiberhome, Huawei, Solitech dan Multitrans Data mengaku belum bisa menjawab pertanyaan kami karena masih menunggu proses penegakan hukum yang berjalan.

Belakangan, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Kuntadi menyebut, ada dugaan adik kandung Menteri Plate, Gregorius Alex Plate, menerima dana sebesar Rp534 juta dari BAKTI Kementerian Koinfo. Kuntadi mengklaim pihaknya masih ingin menelusuri dana itu terkait proyek menara BTS 4G atau tidak dalam gelar perkara.

Kuntadi menyebut dana yang diterima itu diduga berkaitan dengan posisi menteri kakaknya. Ia menyebut dugaan informasi itu telah dikonfirmasi langsung ke Plate saat pemeriksaan 15 Maret lalu. "Terkait dengan posisi adiknya, sesuai keterangan masih kami dalam. Yang jelas, tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pekerjaan yang bersangkutan [Alex Plate, swasta]," katanya. "Artinya besar kemungkinan ada kaitannya dengan jabatan saksi [Menteri Plate] yang kami periksa hari ini." "Yang jelas, itu dana dari BAKTI."

Penulis: Haris Prabowo.

Editor: Abdul Aziz.

Sumber: <https://tirto.id/nama-petinggi-koinfo-dalam-pusaran-korupsi-menara-sinyal-gDJF>.



PROYEK BTS RP28 TRILIUN KOMINFO: DEFISIT SINYAL, SURPLUS MASALAH

Tirto.id edisi 21 Maret 2023.

Selain keterlambatan pembangunan, soal sinyal bermasalah yang dialami oleh Willi, Foni, dan Kinan juga disorot oleh BPK.

Mengenakan kaos berwarna dan bawahan kain songket - kain tenun khas masyarakat Manggarai di Pulau Flores, Elisabeth hanya bisa melipat kedua tangannya di depan dada. Tatapannya kosong.

Ada raut kecewa di wajahnya jika harus menceritakan ulang soal pembangunan menara *Base Transceiver Station* (BTS) sinyal 4G yang digarap oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), organisasi non-eselon di bawah Kementerian Kominfo, berlokasi di Desa Compang Kantar, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur.

"Mereka masih utang dengan saya. Total Rp13,5 juta, baru dibayar enam juta rupiah," kata Elisabeth pada 14 Maret lalu kepada kami, Klub Jurnalis Investigasi (KJI) - koalisi sejumlah media terdiri dari *Tempo.co*, *Liputan6* SCTV, *Narasi TV*, *Suara*.

com, Jaring.id, DetikX, termasuk juga *Tirto*. Utang yang dimaksud Elisabeth adalah uang sewa kontrakan rumah dari pemilik proyek yang belum dibayar. Kontrakan rumah itu digunakan untuk para pekerja pembangunan menara BTS itu. Rumah Elisabeth memang tak jauh dari lokasi rencana pembangunan menara BTS.

Ia melihat banyak kejanggalan dari proyek sedari awal diklaim akan mempermudah jaringan internet di desanya. Selain utangnya yang tak kunjung dibayar, menara BTS yang ada di dekat rumahnya juga tak kunjung rampung alias mangkrak sejak 2021. "Itu besi-besi tower yang belum dibangun. Buat menara. Sejak awal 2021. Padahal sudah lima kali pengerjaan dari lima perusahaan berbeda, tapi enggak jadi-jadi," kata Elisabeth.

Morat-marit Proyek Sinyal Rp28 Triliun

Lokasi besi-besi menara BTS 4G mangkrak yang diperlihatkan Elisabeth kepada kami adalah bagian dari proyek strategis nasional Kementerian Kominfo yang diikhtirakan untuk memenuhi hak atas informasi di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Targetnya tak main-main: pembangunan 9.583 unit menara BTS 4G hingga 2023. Pada 2020, pembangunannya sudah mencapai 1.679 unit. Belakangan, tersisa 7.904 unit yang akan dibangun sepanjang 2021-2023.

Total angka proyeknya mencapai Rp28,3 triliun, yang berasal dari tiga sumber: *Universal Service Obligation (USO)*, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan anggaran Kementerian Kominfo. Besaran angka ini diakui sendiri oleh Plate. Rencananya, semua unit BTS yang dibangun tersebut akan disewakan ke dua operator di Indonesia: Telkomsel dan XL.

Untuk membangun itu semua, proyek dibagi menjadi dua tahap: 4.200 unit pada 2021 dan sisanya pada 2022. Dalam dokumen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kami terima, diketahui pembangunan tahap satu itu - yang angkanya mencapai Rp11 triliun - kemudian dipecah menjadi lima paket berbeda sesuai pembagian wilayah, yang dikerjakan oleh tiga konsorsium perusahaan yang berbeda.

Untuk Paket I, rencananya pembangunan unit berada di 725 desa yang tersebar di Sumatera, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Angkanya masih dipecah menjadi dua tahap: 417 desa senilai Rp1,2 triliun untuk tahap satu dan 308 desa senilai Rp874 miliar untuk tahap dua. Desa Mokol Morid dan Kampung Komodo masuk ke dalam paket ini.

Sedangkan Paket II, rencana pembangunan unit berada di 710 desa yang tersebar di Sulawesi dan Maluku. Angkanya masih dipecah menjadi dua tahap: 409 desa

senilai Rp983 miliar untuk tahap satu dan 301 desa senilai Rp720 miliar untuk tahap dua. Kedua paket itu digarap oleh konsorsium tiga perusahaan: PT Fiberhome Technologies Indonesia (PT FTI), PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom Infra), dan PT Multi Trans Data (MTD) - berikutnya akan disebut konsorsium FTM.

Untuk Paket III, rencananya pembangunan unit berada di 954 desa yang tersebar di Papua Barat dan Papua Bagian Tengah-Barat. Angkanya masih dipecah menjadi dua tahap: 549 desa senilai Rp1,4 triliun untuk tahap satu dan 405 desa senilai Rp1,3 triliun untuk tahap dua. Paket itu juga digarap oleh konsorsium tiga perusahaan: PT Aplikasinusa Lintasarta (PT AL), PT Huawei Tech Investment (PT HWI), dan PT Surya Energi Indotama (PT SEI) - berikutnya akan disebut konsorsium LHS.

Bergeser ke Paket IV, rencananya pembangunan unit berada di 966 desa yang tersebar di Papua Bagian Tengah-Utara. Angkanya masih dipecah menjadi dua tahap: 556 desa senilai Rp1,2 triliun untuk tahap satu dan 410 desa senilai Rp1 triliun untuk tahap dua.

Dan terakhir untuk Paket V, rencana pembangunan unit berada di 845 desa yang tersebar di Papua Bagian Timur Selatan. Angkanya masih dipecah menjadi dua tahap: 486 desa senilai Rp1,1 triliun untuk tahap satu dan 359 desa senilai Rp965 miliar untuk tahap dua. Agak berbeda dengan dua konsorsium lainnya, konsorsium yang menggarap Paket IV dan Paket V hanya terdiri dari dua perusahaan: PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS) dan PT ZTE Indonesia (PT ZTEI) - berikutnya akan disebut konsorsium IBS-ZTE.

Belakangan, proyek ini dianggap bermasalah secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Ada indikasi korupsi yang besar dilakukan segelintir elite untuk mengambil keuntungan pribadi dari proyek ini. Sejak Januari, Kejaksaan Agung sudah menetapkan lima orang tersangka dalam dugaan korupsi proyek ini.

Tiga orang pertama yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) - sebuah badan layanan umum di bawah Kementerian Kominfo - Anang Achmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk (PT Moratelindo), Galumbang Menak Simanjuntak, dan tenaga ahli dari *Human Development* (Hudev) Universitas Indonesia, Yohan Suryanto pada 4 Januari lalu.

Dalam penyidikan Kejaksaan Agung, Anang diduga mengatur sedemikian rupa - salah satunya dengan menekan aturan teknis - agar *vendor* tertentu bisa memenangkan proyek pembangunan BTS 4G. Dalam manuver tersebut, Anang

mendapat masukan dari Galumbang - pemimpin salah satu perusahaan penyedia perangkat proyek BTS. Sedangkan Yohan, diduga merekayasa kajian teknisnya. Apa yang mereka lakukan adalah patgulipat menutup kesempatan perusahaan lain untuk bersaing secara sehat.

Pada 25 Januari lalu, orang keempat yang ditetapkan tersangka adalah Direktur Akuntansi PT Huawei Tech Investment (PT HWI), Mukti Ali. Ia diduga berkongkalikong dengan Anang - saat perencanaan hingga penawaran harga - sampai akhirnya PT HWI dinyatakan menang tender. PT HWI adalah salah satu dari konsorsium LHS yang menggarap proyek ini.

Sedangkan tersangka kelima - yang ditetapkan pada 7 Februari - adalah Komisaris PT Solitechmedia Synergy (PT SES), Irwan Herawan, yang diduga juga berkongkalikong dengan Anang untuk mengarahkan ke perusahaan tertentu menjadi pemenang tender di semua paket proyek.

Belakangan, Menteri Koinfo Johnny Gerald Plate juga ikut diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung. Ia dipanggil sebanyak tiga kali, namun hanya hadir di pemanggilan kedua dan ketiga. Plate mangkir dari pemanggilan pertamanya dengan dalih menemani Presiden ke acara Hari Pers Nasional di Medan.

Keterlambatan pembangunan menara BTS 4G yang terjadi di dekat rumah Elisabeth disorot Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam dokumen BPK terbitan Januari 2022 untuk Kementerian Koinfo - salah satunya memeriksa proyek pembangunan menara BTS 4G tahap satu sepanjang 2021 - yang kami terima, lembaga itu menemukan ada keterlambatan pembangunan menara BTS 4G dari lima paket tersebut.

Menurut BPK, hingga 31 Oktober 2021, Paket I dan Paket II baru selesai 63 persen dari targetnya sebesar 93 persen. Hal serupa terjadi di Paket III, yang baru rampung 79 persen dari targetnya sebesar 86 persen. Keterlambatan juga ada di Paket IV dan V yang baru selesai 59 persen dari targetnya sebesar 84 persen. "Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa proyek BTS 4G pada 4.200 desa pada TA 2021 kemungkinan besar akan mengalami keterlambatan dari jadwal yang tertera dalam kontrak," tulis BPK dalam laporannya.

Tak Tepat Waktu, Tak Tepat Sasaran

Sembari memantau sinyal gawai di tangan kanannya, tangan kiri Willibrodus mengerek sebuah stoples ke atas pohon menggunakan tali sepanjang belasan



SKANDAL PROYEK SINYAL BUNG JOHNNY

5 TERSANGKA DUGAAN KASUS KORUPSI PROYEK BTW 4G BAKTI KOMINFO

- 1 ANANG ACHMAD LATIF**
Dirut BAKTI Kominfo. Mengatur pemenangan tender proyek.
- 2 GALUMBANG SIMANJUNTAK**
Dirut PT Moratelindo. Membantu Anang memilih vendor.
- 3 YOHAN SURYANTO**
Staf ahli Hudev Universitas Indonesia. Merekayasa kajian teknis terhadap vendor.
- 4 MUKTI ALI**
Direktur Akuntansi PT HWI. Sekongkol dengan Anang untuk memenangkan tender.
- 5 IRWAN HERMAWAN**
Komisaris PT SES. Sekongkol dengan Anang untuk pemenangan tender.

DATA DESA KACAU

- Awalnya **7.904 desa**, tetiba jadi **7.816 desa**.
- Banyak desa justru sudah ada sinyal 4G, bahkan punya 2 menara BTS.



Infografik Skandal Proyek Sinyal Bung Johnny. tirto.id/Ecun.

meter. Di dalam stoples itu ada gawai lainnya yang digunakan untuk penambatan - atau biasa disebut *tethering* - untuk membagi sinyal internet ke gawai yang digenggamnya. "Menurut informasi yang saya dapat, *hotspot* itu jaraknya bisa sampai 11 meter," katanya kepada kami, 23 Februari lalu.

Pria 42 tahun itu tinggal di Desa Mokol Morid, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Desanya menjadi salah satu wilayah yang dibangun menara BTS 4G. Masalahnya, menurut Willi, sinyal internet di desanya malah berantakan sejak adanya menara BTS yang sudah dibangun BAKTI itu. Apalagi, profesi Willi sebagai pengusaha kecil sangat membutuhkan internet untuk berjualan. "Kami merasa dirugikan. Kami seperti dibodohi dengan adanya *tower*

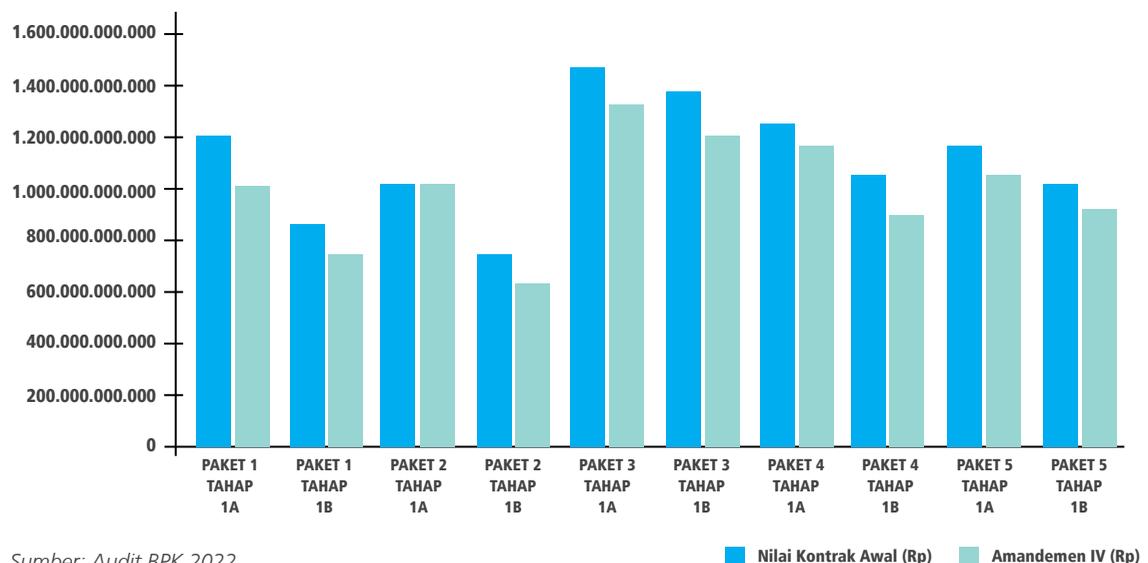
ini,” katanya. “Selama ada tulisan BAKTI Telkomsel [di layar gawai], tidak ada internet.”

Tak hanya Willi, kami juga menemui Foni, 29 tahun, di desa yang sama dan mengeluhkan hal yang sama. Padahal menurutnya, sebelum menara BTS milik BAKTI dibangun, sinyal internet di desanya lancar. Sinyal itu didapat dari menara Paan Leleng milik Telkomsel di desa sebelah - jaraknya sekitar lima kilometer dari Desa Mokol Morid. Foni menunjukkan kepada kami lokasi menara BTS yang selesai dibangun. Ada tulisan “BAKTI” di badan tiang menara tersebut. “Kami juga ada bisnis *online*, jadinya terhambat karena jaringan tidak bagus,” kata Foni.

Di kabupaten sebelah, Manggarai Barat, kami menemukan masalah serupa tepatnya di Kampung Komodo, Pulau Komodo. Sejak menara BTS di sana diresmikan, sinyal yang digunakan warga mulai terganggu. “Internet enggak bisa. Telepon pun suara putus-putus. Tidak ada gunanya. Bukannya membantu, malah menyusahkan,” kata Kinan, 28 tahun, salah satu warga Kampung Komodo kepada kami.

Selain soal keterlambatan pembangunan, soal sinyal bermasalah yang dialami oleh Willi, Foni, dan Kinan juga disorot oleh BPK. Dalam dokumen yang sama, BPK juga menyebut bahwa angka total 7.907 desa yang disasar oleh BAKTI sejak awal didapat dari Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika (Ditdal PPI) Kementerian Kominfo - yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Masalahnya, BPK menemukan bahwa pelaksanaan survei ke lokasi desa-desa dilakukan justru setelah kontrak pembelian sudah diteken. “Namun, dalam proses pelaksanaannya, survei baru

Perubahan Nilai Awal Kontrak dengan Amandemen IV.



dilakukan setelah penandatanganan kontrak pembelian/*purchase order*," tulis BPK. Akhirnya, saat survei dilakukan BAKTI kerap terjadi perubahan lokasi dan spesifikasi yang akan mengubah nilai kontrak. Oleh karena itu, BPK menemukan BAKTI sampai harus mengamandemen kontrakan sebanyak empat kali.

Proses survei yang telat itu akhirnya juga mempengaruhi akurasi data soal desa-desa yang menjadi sasaran pembangunan menara BTS 4G. Dalam laporan BPK, ditemukan banyak desa yang menjadi sasaran justru dibangun hingga dua buah BTS. Padahal konsep awal proyek yang digarap BAKTI adalah "Satu Desa Satu BTS".

Ketika dimintai keterangan soal itu oleh BPK, BAKTI beralasan bahwa beberapa desa yang menjadi sasaran awal ternyata telah terjamah oleh sinyal 4G sehingga harus ditentukan lokasi yang baru. Lokasi-lokasi baru tersebut malah membutuhkan dua unit BTS. Akhirnya, ada perubahan angka yang tadinya 7.904 desa menjadi 7.816 desa.

Masalahnya, menurut BPK, dari angka 7.816 tersebut banyak desa yang belum terjamah sinyal 4G, namun tidak tercantum dalam daftar lokasi awal proyek diteken. "Menggambarkan adanya desa yang belum terlayani sinyal 4G di luar 7.904 desa yang dibangun oleh BAKTI," tulis BPK. "Seharusnya BAKTI lebih mengutamakan desa-desa tersebut dibandingkan dengan membangun dua BTS pada satu desa."

Kepada kami, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi menegaskan kembali soal proyek ini. Kata dia, proyek ini tidak direncanakan berdasarkan data empiris di lapangan. Achsanul menilai, BAKTI saat merancang ribuan unit hanya berdasarkan data dari atas meja. "Bahwa di sini, sehingga pada saat pembangunan banyak titik-titik yang mestinya tidak perlu dibangun," katanya kepada kami, 6 Maret lalu. "Dan enggak bisalah, enggak layak untuk dibangun."

Kami telah berupaya mengajukan permohonan wawancara ke semua perusahaan yang disebutkan di atas lewat surat, telepon, dan pesan singkat. Dari 11 perusahaan yang kami minta konfirmasi, hanya empat yang membalas surat, telepon, maupun pesan singkat kami. Fiberhome, Huawei, Solitech dan Multitrans Data mengaku belum bisa menjawab pertanyaan kami karena masih menunggu proses penegakan hukum yang berjalan.

Penulis: Haris Prabowo.

Editor: Abdul Aziz.

Sumber: <https://tirto.id/proyek-bts-rp28-triliun-kominfo-defisit-sinyal-surplus-masalah-gDJH>.

RENOVASI CAK DURASIM DIKEBUN SAAT PANDEMI MENINGGI, ADA AP

Perusahaan yang memenangkan tender perencanaan, konstruksi, dan pengawasan Gedung Kesenian Cak Durasim tahun 2020 diduga bermasalah. Itu, keputusan Dinas PUPR Jawa Tengah. Proyek pembangunan fisik Gedung Kesenian Cak Durasim di Semarang pada tahun 2020 berpotensi melanggang. Renovasi Gedung Pertunjukan Cak Durasim (UPT) Semarang.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja Virtual dengan Komisi V DPR RI pada 22 April 2020, menyampaikan bahwa Kementerian PUPR melakukan alokasi anggaran utama untuk paket-paket kontrak yang belum dilaksanakan. Hal ini dapat ditunda ke tahun berikutnya.



BAGIAN 2

RASUAH PROYEK INFRASTRUKTUR BERMASALAH

TENDER TAK TERPEKERJA DERMAGA PERIKANAN



Pada awal November 2023, pelabuhan itu sepi. Tak tampak perahu nelayan bersandar di sana, apalagi kapal-kapal pemancing. Semen dan bahan bangunan lainnya sudah lama mangkrak.

Pada awal November 2023 pelabuhan itu sepi. Tak tampak perahu nelayan bersandar di sana, apalagi kapal-kapal pemancing. Semen dan bahan bangunan lainnya sudah lama mangkrak. Pada awal November 2023 pelabuhan itu sepi. Tak tampak perahu nelayan bersandar di sana, apalagi kapal-kapal pemancing. Semen dan bahan bangunan lainnya sudah lama mangkrak. Pada awal November 2023 pelabuhan itu sepi. Tak tampak perahu nelayan bersandar di sana, apalagi kapal-kapal pemancing. Semen dan bahan bangunan lainnya sudah lama mangkrak.

Harapan masyarakat Pulau Kelapa memiliki dermaga modern dan infrastruktur penghubung memadai antar pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta tidak kunjung terwujud. Program pembangunan Dermaga Peri yang sudah dimulai sejak 2020 tidak rampung hingga tiga tahun kemudian.

Kondisi yang sama juga terjadi di proyek dermaga Pulau Pramuka, masih di kawasan Kepulauan Seribu, Jakarta. Hingga Februari 2024, pembangunan dermaga yang semestinya selesai pada awal 2023 itu belum juga selesai, hanya ada 15 tiang pancang calon sandaran kapal yang tampak di sana.

Penelusuran tim Klub Jurnalis Investigasi menemukan sejumlah dugaan pelanggaran yang melatarbelakangi mangkraknya proyek pembangunan dua dermaga bernilai puluhan miliar rupiah itu. Dugaan pelanggaran sudah muncul sejak awal, di proses tender yang tidak transparan.

Seperti di proyek pembangunan dermaga Pulau Kelapa. Pelaksanaan tender proyek ini berjalan berulang-ulang dan tidak ada keterangan yang jelas. Selain itu, PT Rayhan Indah Perkasa yang menjadi pemenang tender tersebut diduga mensubkontrakkan pengerjaan proyek ke PT Cipta Cahaya Aqillah yang sempat menjadi salah satu peserta lelang. Semakin aneh, ternyata PT Rayhan dan PT Cipta Cahaya Aqillah ternyata dipimpin oleh orang yang sama.

Kondisi yang hampir sama juga terjadi pada proyek pembangunan dermaga di Pulau Pramuka. Tender proyek tersebut juga beberapa kali diulang tanpa keterangan yang memadai. PT Masa Metonia Abadi (PT MMA), perusahaan yang memenangkan tender, tidak bisa menyelesaikan pembangunan sesuai dengan target. Belakangan diketahui bahwa pimpinan perusahaan tersebut diduga berkaitan dengan perusahaan lain yang tercatat dalam daftar hitam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dugaan adanya kecurangan dan permainan kontrak juga muncul di proyek pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Maritim Lamongan di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Penelusuran tim liputan mendapatkan sejumlah fakta yang mengarah pada dugaan persengkongkolan pelaksanaan tender. Belakangan, pelaksanaan proyek juga bermasalah, pun kualitas bangunan yang buruk.

Liputan berikutnya adalah tentang proyek renovasi Gedung Kesenian Cak Durasim di Surabaya, Jawa Timur. Proyek yang dijalankan pada 2020 itu penuh kejanggalan. Proyek yang menelan biaya miliaran rupiah itu dijalankan di tengah kondisi ekonomi

nasional sedang terpukul akibat pandemi Covid-19. Saat pemerintah mengurangi alokasi anggaran infrastruktur untuk dialihkan ke penanganan Covid-19, renovasi gedung kesenian itu justru terus berjalan. Lebih janggal lagi, ternyata proyek tersebut dikerjakan oleh perusahaan yang bermasalah dan memiliki rekam jejak buruk.

Penelusuran indikasi pelanggaran di proses tender dalam liputan di atas banyak terbantu oleh penggunaan *platform opentender*. Dari data awal adanya kejanggalkan yang ditemukan menggunakan *opentender*, tim KJI menelusuri dengan melakukan wawancara mendalam, analisa data, serta reportase ke lapangan.

Media Kolaborasi:

Mahasiswaindonesia.id, Idenera.com, Jaring.id, dan Bantennews.co.id



Master Plan yang dapat diakses di DISPENDIK Jawa Timur. Bangunan bertanda merah adalah yang telah rampung.

POTENSI KECURANGAN DAN PERMAINAN KONTRAK DALAM PBJ SMK NEGERI MARITIM LAMONGAN JAWA TIMUR

Mahasiswaindonesia.id edisi 1 Maret 2024.

Sebuah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Lamongan, Jawa Timur baru saja diresmikan pada 10 Februari 2024 oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai. Namun, terdapat kejanggalan yang ditemukan dalam peresmian ini. Jika melihat dari master plan yang ada, pembangunan sekolah tersebut masih jauh dari kata selesai.

Pantauan dari Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Dewan Kota Surabaya (PPMI DK Surabaya) yang bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Surabaya menemukan banyak bangunan yang belum terealisasi.

Gubernur Khofifah menyatakan pembangunan SMK ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi kemaritiman dan memperkuat visi kenusantaraan. "Ini lembaga pendidikan vokasi yang sekaligus menjadi penguatan visi kenusantaraan.

Seluruh aspek yang memperkuat kesusantaraan harus terus disinkronkan. Sekolah ini diharapkan menjadi wakil dari semangat keindonesiaan dan kesusantaraan,” ujarnya.

Kondisi ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen pemerintah dalam mewujudkan SMK Maritim yang berkualitas. Karena kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa janji manis tersebut masih jauh dari harapan. Bahkan masih dapat ditemukan beberapa sarana dan prasarana yang terlihat rusak meski bangunan ini baru berdiri.

Selain itu juga banyak ditemukan barang-barang seperti pintu, meja, kursi, serta lemari yang berada di dalam gedung tersebut sudah rusak. Bahkan cat tembok gedung yang sudah luntur dan mengelupas.



SMK Negeri Maritim Lamongan, Jawa Timur.

Kejanggalan di Tender dan Kontrak

Untuk mencari data awal, tim menelusuri dari data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jawa Timur. Pembangunan SMKN Maritim pertama kali ditenderkan pada 2019 oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp1,4 miliar dan nilai kontrak yang belum ditetapkan. Nama tender tersebut "Pematangan Lahan (pengurukan) dan Pembangunan Pagar USB SMK Maritim Kabupaten Lamongan".

BERANDA		CARI PAKET		REGULASI		KONTEN KHUSUS		DAFTAR HITAM		AMEL		KONTAK KAMI		PENDAFTARAN PENYEDIA		LOGIN	
Tender																	
Non Tender Pencatatan Non Tender Pencatatan Swakelola Pencatatan Pengadaan Darurat																	
Jenis Pengadaan		Semua						Tahun Anggaran		Semua							
Nama K/L/PD/Instansi Lainnya		Semua						Pemenang Berkontrak		Nama Pemenang Berkontrak							
Status Kontrak		Semua						Kontrak		Semua							
Tampilan 25 data Cari: smkn maritim																	
Kode	Nama Paket	K/L/PD/Instansi Lainnya						Tahapan	HPS								
51157015	Konstruksi Pembangunan USB SMKN Maritim Lamongan spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 2.761.926.420,00	Provinsi Jawa Timur						Tender Sudah Selesai	3,8 M								
51051015	Konstruksi Pembangunan USB SMKN Maritim Lamongan Tender Batal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Provinsi Jawa Timur						Tender Batal	3,8 M								
Tampilan 1 sampai 2 dari 2 data (disaring dari 15,693 entri keseluruhan)																	
*) Link Harga Penawaran hanya muncul jika tender tersebut menggunakan metode pascakualifikasi satu file																	
Tampilan 25 data Cari: SMK negeri maritim																	
Kode	Nama Paket	K/L/PD/Instansi Lainnya						Tahapan	HPS								
41196015	Konstruksi Pembangunan SMK Negeri Maritim Kab. Lamongan spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 6.514.128.005,00	Provinsi Jawa Timur						Tender Sudah Selesai	7,1 M								
28338015	Perencanaan Pembangunan USB SMK Negeri Maritim Kab. Lamongan spse 4.3 Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2021 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Rp. 814.858.000,00	Provinsi Jawa Timur						Tender Sudah Selesai	820,2 Jr								
25116015	Pematangan Lahan (pengurukan) dan Pembangunan Pagar USB SMK Negeri Maritim Kab. Lamongan Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Provinsi Jawa Timur						Tender Batal	1,3 M								
25047015	Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor USB SMK Negeri Maritim Kab. Lamongan Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Provinsi Jawa Timur						Tender Batal	2,7 M								
18853015	Pematangan Lahan (pengurukan) dan Pembangunan Pagar USB SMK Negeri Maritim Kab. Lamongan spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Provinsi Jawa Timur						Tender Sudah Selesai	1,4 M								

Kode	Nama Paket	K/L/PD/Instansi Lainnya	Tahapan	HPS
51157015	Konstruksi Pembangunan USB SMKN Maritim Lamongan spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 2.761.926.420,00	Provinsi Jawa Timur	Tender Sudah Selesai	3,8 M
51051015	Konstruksi Pembangunan USB SMKN Maritim Lamongan Tender Batal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Provinsi Jawa Timur	Tender Batal	3,8 M

Tampilan 1 sampai 2 dari 2 data (disaring dari 15,693 entri keseluruhan)

*) Link Harga Penawaran hanya muncul jika tender tersebut menggunakan metode pascakualifikasi satu file

Kode	Nama Paket	K/L/PD/Instansi Lainnya	Tahapan	HPS
41196015	Konstruksi Pembangunan SMK Negeri Maritim Kab. Lamongan spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 6.514.128.005,00	Provinsi Jawa Timur	Tender Sudah Selesai	7,1 M
28338015	Perencanaan Pembangunan USB SMK Negeri Maritim Kab. Lamongan spse 4.3 Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2021 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Rp. 814.858.000,00	Provinsi Jawa Timur	Tender Sudah Selesai	820,2 Jt
25116015	Pematangan Lahan (pengukuran) dan Pembangunan Pagar USB SMK Negeri Maritim Kab. Lamongan Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Provinsi Jawa Timur	Tender Batal	1,3 M
25047015	Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor USB SMK Negeri Maritim Kab. Lamongan Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Provinsi Jawa Timur	Tender Batal	2,7 M
18853015	Pematangan Lahan (pengukuran) dan Pembangunan Pagar USB SMK Negeri Maritim Kab. Lamongan spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Provinsi Jawa Timur	Tender Sudah Selesai	1,4 M

Berikutnya pada 2020 terdapat dua tender batal, masing masing dengan HPS Rp2,7 miliar dan Rp1,3 miliar. Disebutkan alasan pembatalan pertama yaitu dikarenakan “peserta yang lulus evaluasi tidak dapat membuktikan kualifikasi sebagai *lead firm* dan anggota KSO”, dan yang kedua “dalam dokumen pemilihan ditemukan kesalahan yang substansial dan dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang atau jasa pemerintah. Hal ini dikarenakan rincian harga satuan seharusnya bersifat rahasia”.

Namun, temuan lapangan dan hasil wawancara dengan warga setempat mengungkapkan adanya pembangunan gedung laboratorium, praktikum, dan

ruang kelas pada 2020. Nama PT Detiga Inti Teknik Sinergi juga mencuat sebagai pelaksana proyek. “Yang lantai bawah tahun 2020 akhir, yang lantai atas 2022 dan 2023,” ujar Kris selaku warga setempat. “Detiga yang pengerukan, dari 2020,” imbuhnya sambil menunjuk sebuah gedung.

Pihak Dinas Pendidikan (Dispendik) membantah klaim tersebut. Mereka menyatakan bahwa PT Detiga seharusnya hanya bertugas sebagai konsultan perencana pada 2023, bukan pelaksana pembangunan seperti yang dinyatakan oleh warga setempat. “Detiga itu tahun kemarin, dan sebagai konsultan perencana”, ujar staf Dispendik yang tak ingin disebutkan namanya.

Pengakuan ini memang didukung dengan adanya plakat yang ada di lapangan pada 2023. Kendati demikian, tender tersebut tidak tercantum di LPSE Jawa Timur. Sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan jasa dan Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan jasa, pemerintah mewajibkan seluruh pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp200 juta untuk ditender melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan serta mencegah praktik korupsi dan kolusi.



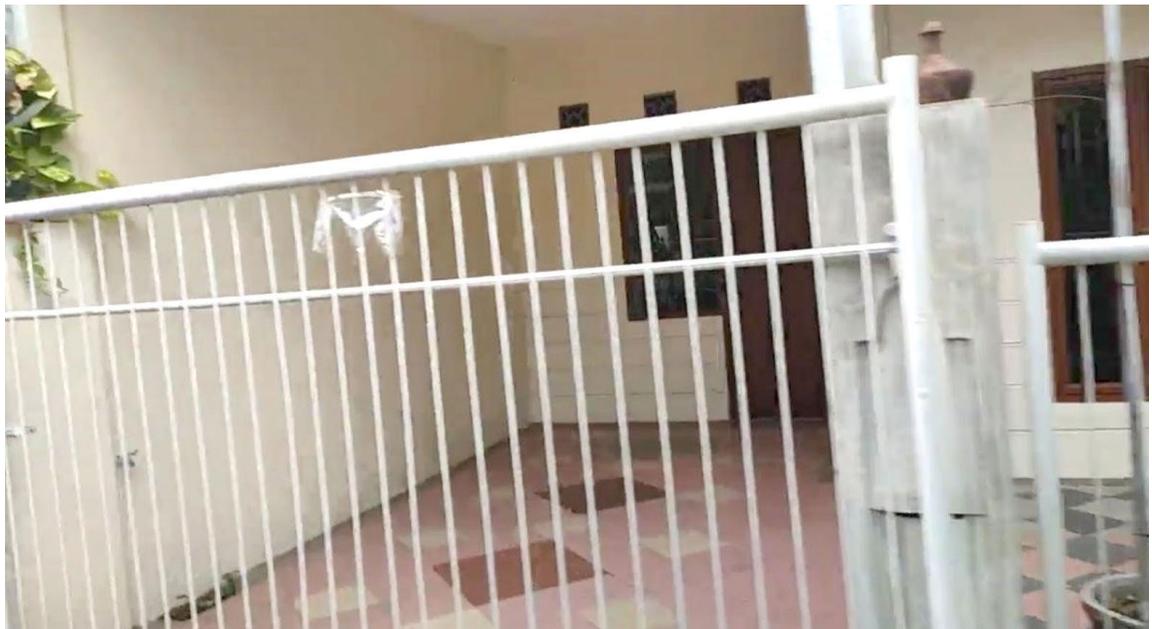
“Lebih dari Rp200 juta ya itu memang wajib dilaksanakan dengan cara pengadaan barang dan jasa, tidak bisa dilakukan secara penunjukan langsung atau swakelola,” tegas Soleh Mohammad selaku staf LBH Surabaya. Hingga saat ini, PT Detiga tidak memberikan tanggapan atau klarifikasi atas pernyataan dan temuan yang telah disampaikan.

Berlanjut pada 2021, tender perencanaan Pembangunan USB SMKN Maritim Lamongan dimenangkan oleh PT Sigma Rekatama Consulindo dengan nilai HPS sebesar Rp820,20 juta. Namun, terjadi ketidakkonsistenan saat melihat siapa yang menjalankan kontrak, di mana CV Mitra Cipta terpilih dengan nilai kontrak sebesar Rp814,858 juta. Kecurigaan muncul terkait perbedaan nilai kontrak yang signifikan dan pemilihan kontraktor yang tidak sesuai dengan pemenang tender.

Ketika tim memeriksa ke lapangan ditemukan fakta yang mengaitkan PT Sigma Rekatama Consulindo dan CV Mitra Cipta. Keduanya ternyata tergabung dalam satu grup yang sama yaitu Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) dan memiliki alamat yang berdekatan.

Ketika tim mendatangi alamat PT Sigma Rekatama Consulindo di Jalan Rajawali No. 34 Ngeni, Kepuh Kiriman, Waru, Kabupaten Sidoarjo, kondisinya senyap dan kosong. Tidak ada aktivitas kantor, motor staf, plakat nama perusahaan, dan sebagainya.

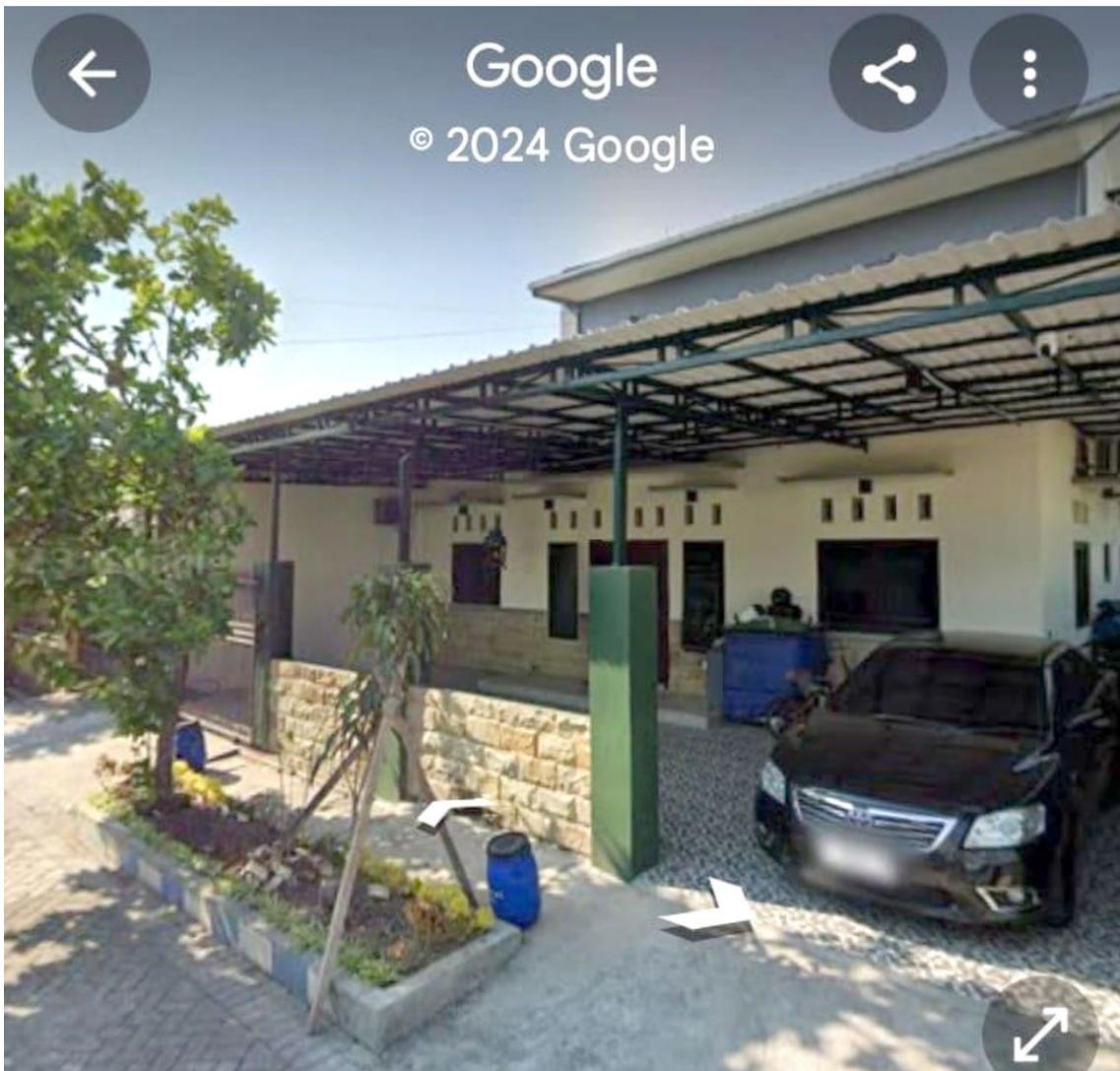
Pemantauan tim juga dilakukan di CV Mitra Cipta yang beralamat di Rajawali VIII Nomor 65 Ngeni, Kepuh Kiriman, Waru, Kabupaten Sidoarjo. Tim melihat plang nama perusahaan, namun tidak menemukan adanya aktivitas meskipun tim melihat



ada kendaraan yang terparkir. Saat tim berusaha untuk masuk dengan memanggil orang dan menelpon nomor yang tertera, tidak ada tanggapan sehingga tidak dapat meminta keterangan.

Pada tahun yang sama juga dibuka tender dengan nama Konstruksi Pembangunan SMK Negeri Maritim Kabupaten Lamongan, yang dimenangkan oleh CV Al-Fath dengan nilai kontrak sebesar Rp6,5 miliar.

Pemantauan pada CV Al-Fath yang beralamat di Griya Permata Gedangan Blok C1 No. 01, Desa Keboan Sikep, RT 07, RW 06, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, tidak ditemukan plang nama CV. Bahkan informasi terkait dengan keberadaan CV Al-Fath banyak tidak diketahui oleh warga sekitar.



Lalu temuan di LPSE Jatim Timur, pada 2022 dengan HPS Rp3,8 miliar yaitu Konstruksi Pembangunan USB SMKN Maritim Lamongan. Tender tersebut dilakukan dua kali, di mana tender yang dimenangkan Dirga Perkasa sebelumnya gagal dengan alasan “Ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya”.

Sementara tender yang dianggap selesai dimenangkan oleh CV Rizky Maulana yang beralamat di Jalan Raya Jatiroto Nomor 79, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang dengan nilai kontrak sebesar Rp2,7 miliar.

Persekongkolan dalam Pelaksanaan Tender Berakibat Rancunya Tanggung Jawab

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Direktur CV Al-Fath, Hermin Sulistyowati menyatakan layanan konsultasi pengelolaan limbah dan perizinan memang langsung dikerjakan oleh CV Al-Fath. Akan tetapi untuk pekerjaan konstruksi memang seringkali diserahkan kepada CV Wahyu Nugroho. “Memang konsentrasi konstruksi itu dikelola oleh adik saya. Segala prosedural masuk ke LPSE mulai pengelolaan tender dan sebagainya itu memang adik saya,” jelas Hermin.

Pelaksanaan dari tender yang dimenangkan oleh CV Al-Fath juga seringkali dilakukan oleh Komisararis CV Al-Fath, yakni Reza sebagai keponakan Hermin sekaligus anak dari Direktur CV Wahyu Nugroho. Ditemukan juga informasi dalam *website* LPSE, selain diikuti oleh CV Al-Fath, CV Wahyu Nugroho juga mendaftar sebagai peserta tender namun sama sekali tidak memasukkan penawaran.

Adanya keterlibatan hubungan keluarga dalam CV Al-Fath dan CV Wahyu Nugroho dalam hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Direktur CV Wahyu Nugroho Hari Wahyudi merupakan adik dari Direktur CV Al-Fath. Hal itu menunjukkan bahwa telah terjadi persengkongkolan dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa proyek SMKN 01 Maritim. CV Al-Fath selaku pemenang tender telah mengalihkan pekerjaan konstruksi kepada CV Wahyu Nugroho untuk menjadi pelaksana. “Kalau yang lebih spesifik karena yang mengerjakan kan keponakan saya (Reza), jadi CV Al-Fath dan CV Wahyu Nugroho ini sama dikelola adik saya khusus untuk yang konstruksi,” jelas Hermin.

Penyedia : CV.WAHYU NUGROHO

Informasi Penyedia

Nama	CV.WAHYU NUGROHO
NPWP	01.681.321.4-609.000

Tender Non Tender Usaha **Pengurus**

Perusahaan	Nama Pengurus	Jabatan	Provinsi	Kabupaten
CV.WAHYU NUGROHO	HARI WAHYUDI	DIREKTUR	Jawa Timur	Surabaya (Kota)
CV.WAHYU NUGROHO	DODIK KURNIAWAN	KOMANDITER	Jawa Timur	Surabaya (Kota)



Sumber: opentender.net

Keberadaan Reza, Komisaris CV Al-Fath sekaligus anak dari Direktur CV Wahyu Nugroho, menjadi jembatan bagi proyek yang dijalankan oleh kedua CV tersebut. Hermin menyebut di CV Wahyu Nugroho, Reza juga berperan sebagai pelaksana teknis. Maka, dalam pelaksanaan pembangunan SMKN 01 Maritim Lamongan, Hermin tidak tahu begitu jelas terkait dengan pembangunan gedung mana dan bagaimana dalam proses pembangunannya dikarenakan semuanya dikerjakan oleh adik dan keponakannya. Meskipun demikian, Hermin menyebut jika terjadi kesalahan dalam proyek konstruksi yang dimenangkannya, tanggung jawab tetap pada CV Al-Fath. Dalam pelaksanaannya pun CV Al-Fath tidak melakukan sub-kontrak atas pelaksanaan pekerjaan oleh CV Wahyu Nugroho, "Memang tidak kami sub kontrak kan," ujar Hermin.

Mohammad Soleh, Kepala Divisi Riset, Pengembangan, dan Kerja Sama Lembaga Bantuan Hukum Surabaya mengatakan terkait subkontrak penyedia semestinya pendaftar pada pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh pelakunya langsung. "Dan melakukan sub kontrak pun itu juga harus sesuai dengan ketentuan perjanjian di awal dengan kuasa pengguna anggarannya," ujarnya. "Jangan kemudian seolah-olah PT yang menang tapi dalam pelaksanaannya kemudian dilaksanakan oleh PT lain tanpa memperhatikan pada perjanjiannya," imbuhnya.

Permainan ini menjadi siasat para penyedia dalam pengadaan barang dan jasa untuk tetap menjadi pelaksana meskipun mulanya hanya menjadi peserta dalam tender. Terlebih hal ini seolah menormalisasi persekongkolan dalam persaingan usaha dan melumrahkan pinjam bendera. Peran kedua CV tersebut tatkala menjadi pelaksana tender dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender.

Kurangnya Pemeliharaan dan Kerugian Negara

Kondisi kurangnya pemeliharaan yang diterapkan oleh pengelola gedung atau kontraktor terhadap sejumlah gedung sekolah SMKN Maritim Lamongan menciptakan serangkaian masalah yang merugikan. Fakta menunjukkan bahwa bangunan gedung yang dibangun pada anggaran 2020 kurang layak digunakan, terutama di gedung praktikum, laboratorium, dan ruang kelas. Dampaknya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki dan memelihara gedung tersebut agar sesuai dengan standar kelayakan.

Masalah pemeliharaan gedung sekolah bukanlah satu-satunya kekhawatiran yang muncul terkait proyek pembangunan. Di lapangan, ditemukan bahwa lokasi yang dipilih untuk pembangunan gedung kelas adalah lahan yang rentan terhadap banjir saat musim penghujan.

Seorang warga sekitar membagikan pengalamannya pada 2021, banjir melanda area tersebut dan bahkan masuk ke dalam ruang kelas, menggenangi kelas hingga setinggi lutut orang dewasa. Akibatnya, kursi, meja, dan lemari di dalam ruang kelas mengalami kerusakan serius karena terendam banjir. "Banjir dari sampai pondasi pagar, masuk ruang-ruang kelas. Rawan banjir kalo hujan," ujar Kris.

Kondisi ini memberikan gambaran akan risiko yang dihadapi oleh gedung sekolah dan para penghuninya. Ancaman banjir tidak hanya mengakibatkan kerusakan fisik pada gedung dan perabotannya, tetapi juga mengganggu proses pembelajaran dan kegiatan sekolah secara keseluruhan. Kris mengingatkan dengan adanya dampak yang serius dari banjir, maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap keamanan dan kelayakan lokasi pembangunan gedung kelas. Langkah-langkah mitigasi perlu diterapkan untuk mengurangi risiko banjir dan melindungi aset sekolah dari kerusakan yang tidak diinginkan.

Dari keterangan yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, terungkap bahwa dalam proses pengadaan konstruksi, jangka waktu pemeliharannya seharusnya selama satu tahun sejak penyelesaian konstruksi. "Pemeliharaan itu 6 bulan sampai 1 tahun, setelah selesai pembangunan" ujar pihak Dispendik.

Dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi, penyedia wajib memberikan jaminan pemeliharaan selama 6 bulan untuk pekerjaan permanen dan 3 bulan untuk pekerjaan semi permanen, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 Tahun 2017 Tentang

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi, serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini diperkuat dengan Lampiran II.B.2.12 dari Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 yang menetapkan jaminan pemeliharaan sebagai jaminan dari penyedia untuk memastikan kebebasan dari cacat dan kinerja yang baik selama masa pemeliharaan.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat mengakibatkan kerugian finansial dan operasional yang signifikan. Misalnya, jika penyedia tidak memberikan jaminan pemeliharaan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan, maka risiko kerusakan dan cacat pada konstruksi menjadi tanggung jawab pemerintah. "Pemenang lelang dia kan tidak mungkin tidak mengambil keuntungan sama sekali, sub kontraktor juga akan mengambil keuntungan. Nah, potensi yang terjadi adalah ketika di atas sudah dipotong, di bawah dipotong lagi, bahkan kalau disubkan lagi gitu kan dipotong lagi. Nah itu potensi untuk tidak sesuai dengan spek besar," tegas Mohammad Soleh.

Dampaknya, negara harus mengeluarkan dana tambahan untuk memperbaiki dan memelihara infrastruktur yang tidak memenuhi standar, termasuk biaya perbaikan, penggantian material yang rusak, dan penyesuaian infrastruktur yang tidak berfungsi sesuai dengan yang diinginkan. Kerugian ini tidak hanya bersifat finansial, namun juga mencakup reputasi dan kepercayaan terhadap pemerintah dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa.

Penyalahgunaan atau kelalaian dalam proses pengadaan dapat merusak integritas pemerintah dan mempengaruhi hubungan dengan penyedia dan masyarakat. Dengan demikian, kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa, termasuk masa pemeliharaan, sangat penting untuk mencegah kerugian negara dan menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan infrastruktur.

Liputan ini merupakan kerjasama Pers Mahasiswa Indonesia Dewan Kota Surabaya, LBH Surabaya dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Penulis: Aisyah Aulia Rahma dan Rifki Iqbal Nizar Zidan. Anggota Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Dewan Kota Surabaya.

Sumber: <https://mahasiswaindonesia.id/potensi-kecurangan-dan-permainan-kontrak-dalam-pbj-smk-negeri-maritim-lamongan-jawa-timur/>.



RENOVASI CAK DURASIM DIKEBUT SAAT PANDEMI MENINGGI, ADA APA?

Idenera.com edisi 12 Februari 2024.

Perusahaan yang memenangkan tender perencanaan, konstruksi, dan pengawasan Gedung Kesenian Cak Durasim tahun 2020 diduga bermasalah. Selain itu, keputusan Dinas PUPR Jawa Timur yang tetap melanjutkan proyek pembangunan fisik di tengah puncak pandemi Covid-19 berpotensi melanggar SKB Mendagri/Menkeu.

Renovasi Gedung Pertunjukan Cak Durasim diajukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa pada Dinas PUPR Jawa Timur pada tahun 2020. Pengajuan tersebut diterima. Pada 30 Januari 2020, Tahap perencanaan dimulai, sedangkan tahap pembangunan fisik dimulai 10 Juli 2020. Di saat bersamaan angka positif Covid-19 di Surabaya mencapai 6.882 kasus.

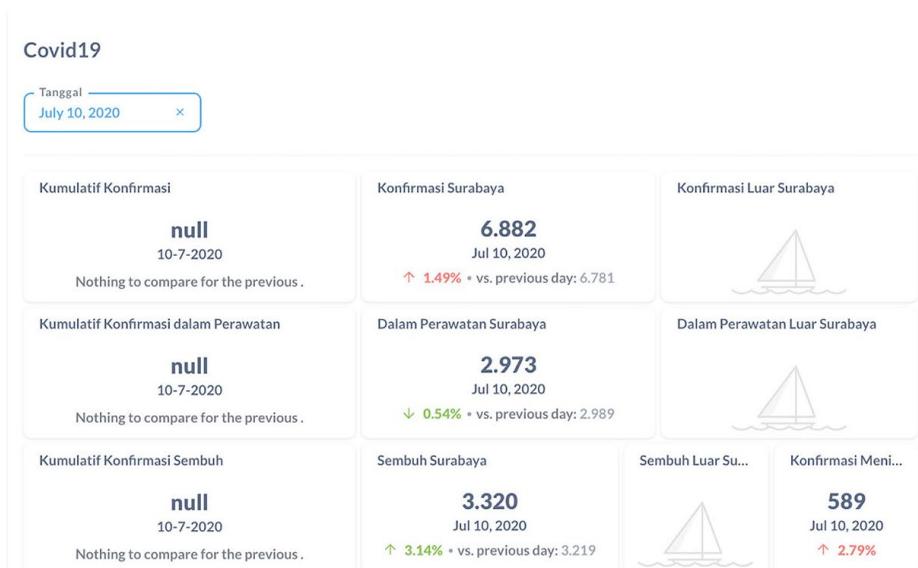
Angka positif Covid-19 di Jawa Timur dan Kota Surabaya pada Juli 2020 masih tinggi. Saat itu, ketersediaan anggaran dan infrastruktur kesehatan belum sepenuhnya

siap menghadapi lonjakan kasus Covid-19. Untuk mengatasi situasi tersebut, pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 14 April 2020, pemerintah membuat kebijakan re-alokasi anggaran belanja pemerintah guna menanggulangi pandemi.

Kebijakan ini dijelaskan dalam Surat Menteri Keuangan No.S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020, yang menetapkan Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2020. Dalam kebijakan tersebut, upaya penghematan anggaran belanja kementerian dan lembaga, dikhususkan pada kegiatan perjalanan dinas, belanja barang, belanja fisik, atau belanja modal yang dianggap tidak prioritas atau bisa ditunda.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja Virtual dengan Komisi V DPR RI pada 22 April 2020, menyampaikan bahwa Kementerian PUPR melakukan alokasi anggaran, terutama untuk paket-paket kontrak yang belum lelang dan pelaksanaannya dapat ditunda ke tahun berikutnya. "Dari besaran awal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR tahun 2020 sebesar Rp120,2 triliun, mengalami re-alokasi anggaran sebesar Rp44,58 triliun. Sehingga DIPA Kementerian PUPR menjadi Rp75,63 triliun," ungkap Basuki. Keputusan ini direspons oleh kementerian serta lembaga dan pemerintah daerah dengan menunda proyek-proyek pembangunan fisik.

Statistik



Jumlah Terpapar Covid-19 di Surabaya pada 10 Juli 2020. Sumber: <https://lawancovid-19.surabaya.go.id/visualisasi/graph>.

Namun, di Surabaya, meskipun pandemi Covid-19 melonjak dan kebijakan penyesuaian belanja diterapkan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PUPR) Jawa Timur tetap melanjutkan renovasi Gedung Pertunjukan Cak Durasim.

Renovasi Dikebut kala Pandemi Melambung Tinggi

Tahapan proyek renovasi Gedung Cak Durasim melalui proses jasa perencanaan dengan kontrak Rp1,01 miliar oleh PT Delta Buana yang dimulai pada 30 Januari 2020, jasa pengawasan dengan kontrak Rp580 juta oleh PT Sigma Rekatama Consulindo yang dimulai pada 8 Juni 2020, dan konstruksi atau renovasi dengan kontrak Rp5,55 miliar oleh PT Elaine Karya Abadi yang dimulai pada 10 Juli 2020. Total anggaran yang dikerjakan untuk tiga proyek itu mencapai Rp7,1 miliar.

Kepala Seksi Dokumentasi dan Publikasi Seni Budaya UPT Taman Budaya Jawa Timur, Bambang Dwi Sumanto menegaskan bahwa alasan pengajuan renovasi tersebut untuk kenyamanan penonton dan pemain. Ia menyebut bagian yang direnovasi adalah bagian depan dan belakang gedung tersebut.

“Kami mengajukan renovasi tahun 2020 yang dikerjakan pada dua bagian. *Pertama*, bagian *lobby* untuk menampung penonton yang baru datang dan mencetak tiket masuk. *Kedua*, bagian *loading* untuk menampung barang-barang pemain sebelum tampil di panggung,” katanya, pada Selasa, 12 Desember 2023.



Bagian depan Gedung Kesenian Cak Durasim, sebelum direnovasi (kiri) dan setelah direnovasi (kanan). Foto: Monumen Surabaya dan Idenera.



Bagian tengah Gedung Kesenian Cak Durasim. Sumber: Dokumen Pribadi.

Padahal dalam Keputusan Kedua, Huruf C, Poin 5 dan 6, Surat Menteri Keuangan No.S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja K/L Tahun Anggaran 2020 menegaskan bahwa adanya rasionalisasi belanja modal sebesar 50 persen dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk pembangunan gedung baru dan pembangunan infrastruktur lainnya yang memungkinkan ditunda tahun berikutnya.

Sementara, kota atau kabupaten dan provinsi lain memutuskan untuk menunda pembangunan, renovasi, dan perbaikan infrastruktur di tahun 2020. Sebab, anggaran itu dialihkan untuk penanganan Covid-19 yang sedang melonjak. Seperti, pada Selasa, 14 April 2020, Pemerintah Kota Malang memutuskan untuk menunda pembangunan *mini block office* di Balai Kota Malang senilai Rp45 miliar.

Selain itu, pada 30 April 2020, pembangunan Bandara Paser di Kalimantan Timur dihentikan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser, Inayatullah mengatakan bahwa pandemi Covid-19 membuat pihaknya menyusun ulang alokasi anggaran untuk penanganan pandemi di wilayah tersebut.

Bambang menegaskan bahwa renovasi Gedung Pertunjukan Cak Durasim sempat tertunda selama beberapa waktu. Namun, dilanjutkan lagi dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Seperti membatasi jumlah pekerja, menjaga jarak agar tidak berkerumun, dan mengenakan alat pelindung diri (APD) saat bekerja.

“Untuk perusahaan atau PT yang mengerjakan, anggaran, instruksi pemerintah pusat untuk menunda, dan lain-lain, itu yang mengetahui PU (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Jawa Timur, *red*). Kalau kami hanya mengajukan permohonan pembangunan,” tuturnya.

Pada Jumat, 12 Januari 2024, *Idenera* berupaya menghubungi Nyoman Gunadi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PUPR) Jawa Timur melalui pesan instan untuk meminta konfirmasi. Namun, ia mengatakan bahwa tidak memiliki wewenang menjawab mengenai itu.

“Terkait dengan hal tersebut kewenangannya tidak di saya. Terkait PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa, *red*) di Biro PBJ (Jawa Timur, *red*),” katanya melalui WhatsApp. Kepada Gunadi, *Idenera* menyampaikan telah bertemu Biro PBJ Jawa Timur, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sehingga, membutuhkan konfirmasi dari Nyoman Gunadi.

Pada Senin, 15 Januari 2024, *Idenera* melalui Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya mengirim Surat Permohonan Wawancara ke email Dinas PUPR Jawa Timur. Juga mengirim melalui pesan instan ke Nyoman Gunadi. Namun, hingga sekarang tidak mendapatkan respons, tanggapan, dan konfirmasi dari keduanya mengenai Jasa Perencanaan, Jasa Pengawasan, dan Konstruksi Gedung Pertunjukan Cak Durasim yang dikerjakan 3 perusahaan ketika kasus positif Covid-19 melonjak di Jawa Timur.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Satib menjelaskan bahwa apabila dibutuhkan pihaknya dapat mengadakan evaluasi bersama dinas-dinas terkait. Sebab, banyak ditemui proyek-proyek yang terlambat, tidak selesai, hingga berbagai pelanggaran lain sehingga diberi sanksi putus kontrak. “Setelah pekerjaan itu, kita sesuai kebutuhan, kalau memang kita butuhkan, kita melakukan pengawasan (evaluasi, *red*) bersama dinas-dinas terkait, kita evaluasi dengan mitra kerja,” katanya di Ruang Kerja Komisi D DPRD Jawa Timur, pada Senin, 15 Januari 2024.

Pada Jumat, 1 Desember 2023, dalam *Multi Stakeholder Meeting* bertema Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang diadakan di Hotel Arcadia Surabaya oleh Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Timur, Jabatan Fungsional Pranata Komputer Biro PJB Jawa Timur, Masodi mengatakan dokumen PBJ yang diminta, sifatnya terbuka dan dapat diakses.

Di dalam pertemuan itu, Masodi mengatakan dapat mengajukan pembuatan akun auditor supaya dapat membuka *Application Programming Interface* (API) untuk

mengakses dokumen PBJ di Jawa Timur. Pada laman itu, pemilik akun auditor dapat membuka Aplikasi Pengaman Dokumen (Apendo) untuk membaca dokumen kontrak proyek.

“Proses PBJ terdapat tahap-tahapnya, jika ingin membuktikan dokumennya, harus dan wajib menyebutkan nama surat. Yang bertanggung jawab pemilik akun auditor. Di situ, semua terbuka, termasuk Apendo yang dapat membuka yaitu auditor, auditor diberikan keluasaan,” katanya.

Atas dasar itu, pada Senin, 11 Desember 2023, tim peneliti kami yang diwakili KPI Jawa Timur mengirim surat permohonan informasi mengenai perusahaan yang terlibat proyek perencanaan, pengawasan, dan konstruksi Gedung Cak Durasim tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 ke Biro PBJ Jawa Timur.

Namun, setelah bertemu Teguh Irianta, Kepala Bagian Pengelolaan Biro PBJ Jawa Timur, sekian minggu kemudian kami mendapatkan email balasan yang menyarankan untuk mengirim surat permohonan informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Jawa Timur.

Awalnya, tim mengurungkan niat mengajukan informasi publik ke PPID Jawa Timur dengan alasan proses akan berlangsung lama. Mulai dari permohonan dan berlanjut menjalani sidang sengketa informasi hingga banding yang memakan waktu sekian bulan, bahkan setahun. Sehingga sampai laporan ini dibuat, informasi kepemilikan perusahaan pemenang tender dan perusahaan lain yang terlibat tidak berhasil didapatkan.

Namun, sesuai rekomendasi Biro PBJ Jawa Timur melalui balasan email yang kami terima itu. Pada Selasa, 23 Januari 2024, kami memutuskan memakai atas nama pribadi mengajukan permohonan informasi terkait dokumen tender proyek Perencanaan, Pengawasan, dan Konstruksi Gedung Kesenian Cak Durasim yang dikerjakan tahun 2020 kepada PPID Jawa Timur.

Pada 29 Januari 2024, kami mendapatkan email tembusan atas Surat Permohonan Informasi tersebut yang dikirim PPID Jawa Timur untuk Biro PBJ Jawa Timur. Namun, hingga kini belum ada balasan email mengenai data yang kami perlukan.

Proyek Dikerjakan Perusahaan Bermasalah.

Berdasarkan penelusuran *Idenera*, salah satu pemenang tender proyek konstruksi Gedung Pertunjukan Cak Durasim adalah PT Elaine Karya Abadi. Pada Laman

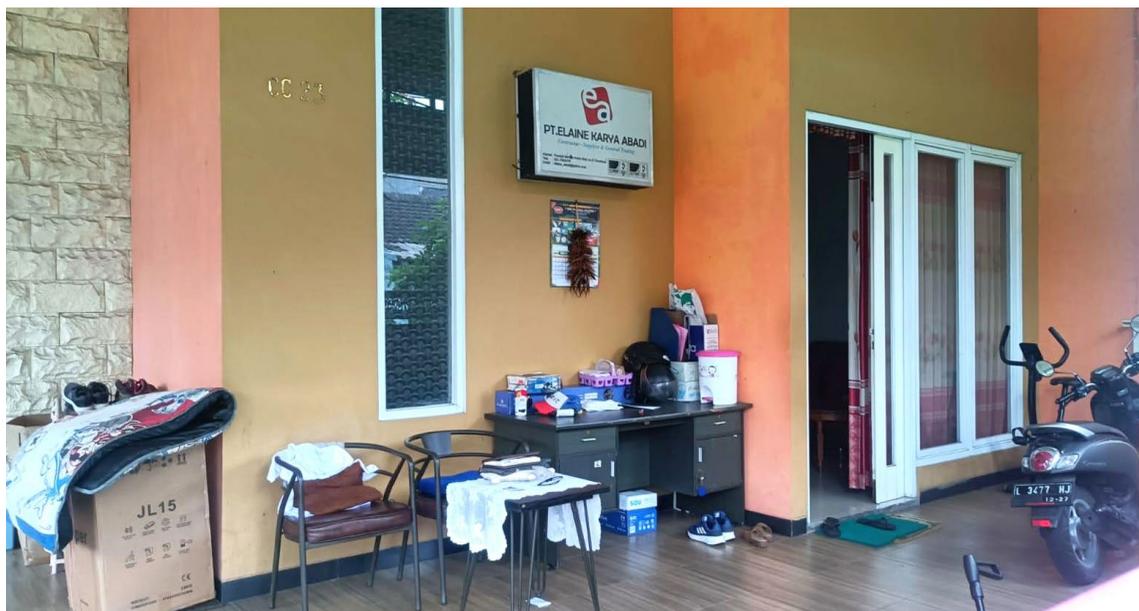
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) perusahaan itu tercatat memiliki alamat di Pondok Maritim Indah Blok CC Nomor 23, Surabaya, Jawa Timur.

Data Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham RI menyebutkan bahwa Direktur Utama PT Elaine Karya Abadi bernama Mochamad Bagus Abadi. Direktur dijabat oleh Adisti Dhita Bintari dan Sholihin Hidayat, serta Moch. Konik selaku Komisaris. Perusahaan dengan NPWP 03.001.877.4-618.000 ini mendapatkan nilai kontrak Rp5,5 miliar untuk mengerjakan bagian depan dan belakang Gedung Pertunjukan Cak Durasim.

Bila melihat pada laman *OpenTender*, proyek yang dikerjakan PT Elaine Karya Abadi itu memiliki nilai 60,71 dengan indikator warna kuning. Itu mengindikasikan perusahaan ini memiliki potensi kecurangan berdasarkan *Potensial Fraud Analysis* (PFA). Ini juga didukung dengan hasil pencarian sumber terbuka di internet. Perusahaan ini memiliki banyak riwayat proyek bermasalah.

Salah satunya, pada tahun 2018, PT Elaine Karya Abadi mengerjakan proyek konstruksi peningkatan dan pengembangan obyek Wisata Ubalan di bawah wewenang Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto dengan pagu anggaran Rp11,3 miliar.

Proyek itu diduga tidak selesai tepat waktu. Proyek tersebut dalam kontrak dijadwalkan selesai pada 29 Agustus 2018. Namun, hingga waktu yang ditentukan, perusahaan tersebut belum memasang papan nama proyek apapun.



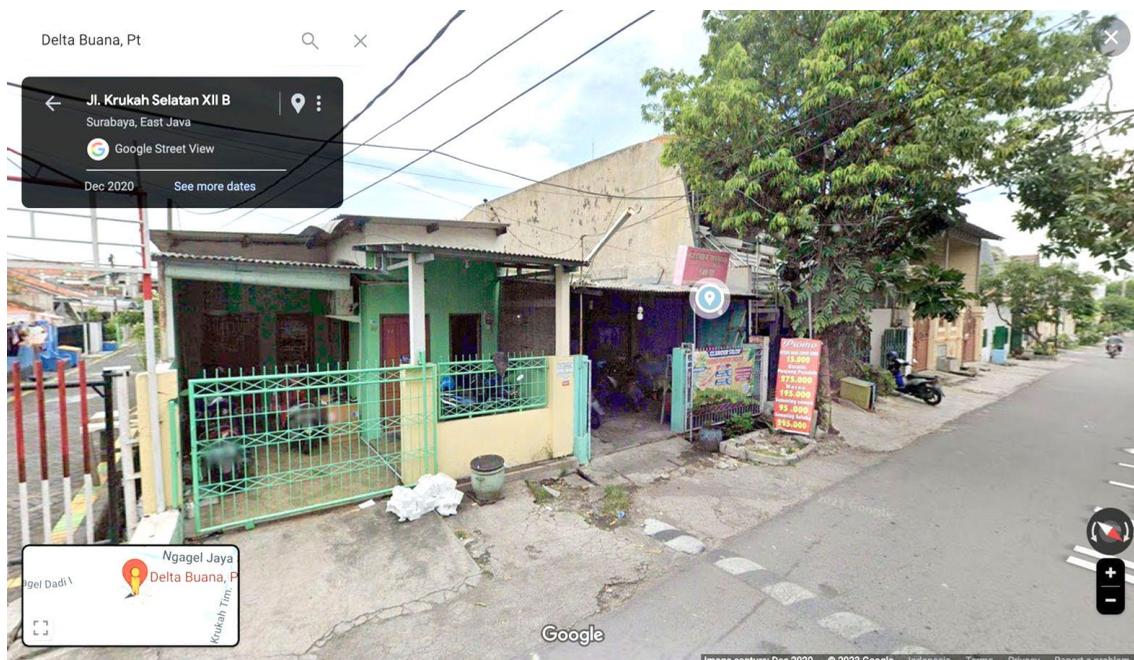
Kantor PT Elaine Karya Abadi di Jalan Pondok Maritim Blok CC Nomor 23, Surabaya. Sumber: Dokumen Pribadi.

Lalu tahun 2018, PT Elaine Karya Abadi mengerjakan proyek gedung penginapan senilai Rp4,5 miliar di Agro Techno Park (ATP) Desa Wakah, Kecamatan Ngrambe, Ngawi. Proyek tersebut sempat mandeg. Proyek Dinas Pangan dan Perikanan yang tersebut baru dikerjakan 65 persen pada 14 Desember 2018. Padahal, menurut kontrak, selesai pada 21 Desember 2018.

Kasus serupa terjadi pada proyek pembangunan gedung baru SMP Negeri 29 Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang yang dikerjakan PT Elaine Karya Abadi. Namun, proyek pembangunan di bawah Satuan Kerja (Satker) Dinas Pendidikan, Kota Malang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2021 senilai Rp9,7 miliar tersebut sempat tidak rampung sesuai waktu yang ditentukan. Dalam kontrak, pengerjaan proyek tersebut dimulai 7 Juni 2021 sampai 29 Desember 2021.

Pada Rabu, 3 Januari 2024, *Idenera* mendatangi kantor PT Elaine Karya Abadi untuk melakukan wawancara dan konfirmasi terkait riwayat pengerjaan proyek yang bermasalah tersebut. Namun, ketika sampai di Pondok Maritim Indah Blok CC 23, Surabaya, rumah tersebut sepi dan tidak ada orang yang menampakan diri. Sehingga, kami urung wawancara dan konfirmasi.

Lalu seminggu kemudian, pada Selasa, 16 Januari 2024, *Idenera* mengirimkan surat permohonan wawancara ke PT Elaine Karya Abadi. Staf yang menerima surat



Penelusuran dengan Google Street kantor PT Delta Buana di Jalan Krukah Selatan Nomor 98, Surabaya. Sumber: Google Map.



tidak berkenan memberi tanda terima. Ia hanya menyampaikan bahwa operasional perusahaan telah beralih ke Kabupaten Kediri. Hingga Rabu, 24 Januari 2024, surat kami belum direspons oleh PT Elaine Karya Abadi.

Idenera juga melakukan penelusuran dengan *Google Street View* pada kantor PT Delta Buana di Jalan Krukah Selatan Nomor 98, Surabaya. Pada titik alamat tersebut terdapat petunjuk dijadikan alamat dua perusahaan. Tepatnya di Jalan Krukah Selatan Nomor 110, Surabaya, pada pagar rumah tersebut tertulis sebagai tempat surat-menyurat PT Duta Rama dan CV Nindira.

Saat melakukan verifikasi lapangan, kami menemukan bahwa papan nama tersebut telah ditutupi cat berwarna putih. Juga tidak ada orang yang keluar dari rumah itu untuk menemui kami. Sehingga, konfirmasi urung dilakukan.

Pada Selasa, 16 Januari 2024, saat mengirimkan surat permohonan wawancara ke alamat PT Delta Buana di Jalan Krukah Selatan Nomor 98 dan Nomor 110, Surabaya, rumah tersebut telah beralih menjadi kos putri.

Lalu, dari warga sekitar didapatkan informasi bahwa PT Delta Buana telah pindah alamat di Jalan Ketintang Baru 2 Kapling 45. Setelah dua kali mendatangi alamat dimaksud, kami mendapat informasi bahwa PT Delta Buana telah pindah kantor ke Jalan Perum PP No. 5, Waru, Sidoarjo.



Kantor PT Delta Buana di Jalan Krukah Selatan Nomor 110, Surabaya yang beralih fungsi menjadi kos putri. Sumber: Dokumen Pribadi.

Penelusuran dengan *Google Maps* alamat PT Delta Buana Konsultan ada di Perum PP Nomor 8, sedangkan di Kop Surat tertulis Perum PP Nomor 5. Namun yang ditemukan di lapangan justru pada alamat tersebut terdapat papan nama PT Sigma Rekatama Consulindo.

Saat mendatangi alamat di Perum PP No. 5, Waru, Sidoarjo, justru ditemukan bahwa PT Sigma Rekatama Consulindo beralamat tidak jauh dari situ, yaitu di Perum PP No. 8, Waru, Sidoarjo. Padahal, dalam data, PT Sigma Rekatama Consulindo beralamat di Jalan Rajawali Nomor 34, Sidoarjo. Lalu kami tetap mendatangi kantor tersebut untuk mengantarkan surat permohonan wawancara.

Staf PT Sigma Rekatama Consulindo mengatakan keberatan memberi pernyataan apapun. Bahkan, tidak berani menerima surat permohonan wawancara. Ia mengatakan bahwa arsitek PT Sigma Rekatama Consulindo berada di Ibu Kota Negara (IKN). Pimpinan PT tidak berkenan memberi pernyataan. Ia hanya mengatakan orang yang memahami proyek Gedung Cak Durasim adalah arsitek mereka yang sekarang berada di IKN.

Lalu setelah bertemu PT Sigma Rekatama Consulindo, kami menuju alamat PT Delta Buana di Jalan Perum PP Nomor 5, Waru, Sidoarjo. Staf yang berada di sana menjelaskan kalau PT Delta Buana menjadi satu dengan PT Sigma Rekatama Consulindo.



Kantor PT Delta Buana yang telah pindah di Jalan Perum PP Nomor 5, Waru, Sidoarjo. Sumber: Dokumen Pribadi.



Kantor PT Sigma Rekatama Consulindo yang telah pindah di Jalan Perum PP Nomor 8, Waru, Sidoarjo. Sumber: Dokumen Pribadi.

Pada 27 Januari 2024, kami mengunjungi lagi kantor PT Delta Buana dan PT Sigma Rekatama Consulindo di Perum PP Nomor 8, Sidoarjo. Sampai di lokasi, kami bertemu staf PT Delta Buana, lantas menjelaskan maksud kedatangan kami untuk mengirim surat permohonan wawancara.

Staf itu menjelaskan bahwa PT Delta Buana yang memenangkan proyek Gedung Kesenian Cak Durasim telah dijual pada tahun 2021 atau 2022, sehingga pemilik dan nama perusahaan berganti menjadi PT Delta Buana Konsultan. Ia menegaskan bahwa pemilik baru tidak mengetahui riwayat proyek di tahun 2020 tersebut.

Sedangkan, papan nama PT Sigma Rekatama Consulindo di Perum PP Nomor 8 yang kami temukan sebelumnya sudah tidak ada. Kata staf tersebut, kantor itu hanya dipakai untuk studio, sedangkan alamat kantor resmi PT Sigma Rekatama Consulindo di Jalan Rajawali Nomor 34, Sidoarjo.

Namun, sekian minggu lalu, ketika mendatangi alamat PT Sigma Rekatama Consulindo di Jalan Rajawali Nomor 34, Sidoarjo, kondisinya begitu senyap. Tidak ada kendaraan, tidak ada papan nama perusahaan, tidak tampak adanya penghuni, dan tidak ada bel yang dapat dibunyikan.

Data Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham RI, menunjukkan PT Delta Buana beralamat di Perum PP Nomor 5, Sidoarjo dengan Surya Hadi Wibowo sebagai Direktur dan Novi Wahyu Saputro sebagai Komisaris. Dokumen Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham RI, menuliskan PT Sigma Rekatama Consulindo beralamat di Jalan Rajawali Nomor 34, Sidoarjo dengan Samsul Amsori sebagai direktur dan Yusuf Efendi sebagai komisaris.



PT Sigma Rekatama Consulindo di Jalan Rajawali Nomor 34, Sidoarjo tampak sepi dan tidak ada penghuni. Sumber: Dokumen Pribadi.

Penelusuran ini menunjukkan, dalam proyek renovasi Gedung Kesenian Cak Durasim, PT Delta Buana Konsultan sebagai pemenang tender Jasa Perencanaan dan PT Sigma Rekatama Consulindo pemenang tender Jasa Pengawasan berkantor pada alamat yang sama. Dan, ketiga perusahaan yang terlibat dalam proyek ini, memiliki alamat yang tidak sesuai dengan dokumen Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham RI.

Potensi Maladministrasi dan Kerugian Negara

Dilansir dari Berita Infrastruktur, selama proses penganggaran renovasi Gedung Pertunjukan Cak Durasim, Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Agatha Retnosari mengatakan bahwa selama berada di bidang perekonomian, tidak ada pembahasan terkait rencana renovasi gedung tersebut. "Selama saya di Komisi B, tidak ada pembahasan terkait renovasi Gedung Pertunjukan Cak Durasim. Saran saya, datang ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jawa Timur. Kalau memang ada potensi pelanggaran, saya sendiri turun ke sana," katanya.

Kepala Divisi Riset Pengembangan dan Kerjasama Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, Moh. Soleh menjelaskan ada sanksi bagi pemerintah daerah (Pemda) yang tetap melanjutkan pembangunan tanpa menghiraukan SKB Mendagri/Menkeu. Hal itu tertera dalam keputusan kedua, huruf C, nomor 4, 5 dan 6, untuk penanganan Covid-19 tahun 2020. Sanksi yang dapat diberikan Kementerian Keuangan kepada Pemda yang melanggar adalah penundaan penyaluran DAU dan atau DBH. "Selain sanksi tersebut SKB tidak mengatur sanksi lain. Kecuali ada dugaan pelanggaran hukum lainnya, maka disanksi sesuai aturan yang diatur. Contoh terjadi korupsi maka disanksi sesuai pelanggaran pasal dalam UU Tipikor," katanya pada Selasa, 19 Desember 2023.

Soleh juga menegaskan bahwa potensi penyalahgunaan anggaran oleh Pemda yang memaksakan pembangunan dan menghiraukan SKB Mendagri/Menkeu sangat besar. "Karena Pemda berani melanggar keputusan pemerintah pusat, patut diduga ada kepentingan yang lebih didahulukan. Apalagi di masa Covid-19 pengawasan terhadap proyek tersebut akan lebih minim karena semua pihak sedang fokus pada penanganan Covid-19," tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa apabila pada UPT atau dinas terkait ditemukan memiliki relasi dengan perusahaan, membuat perusahaan fiktif, atau sengaja memenangkan tender salah satu perusahaan merupakan pelanggaran pidana. "Yang mana penyelenggara PBJ tersebut dapat disanksi administrasi maupun pidana penjara sesuai aturan yang dilanggar. Contohnya, Pasal 263 KUHP terkait Pemalsuan, Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor," tegasnya.

Divisi Pengelolaan Pengetahuan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Kes Tuturoong menegaskan apabila dalam proses tender ada perusahaan yang menyampaikan informasi palsu terkait perusahaannya pada dokumen penawaran, perusahaan tersebut harus dikenakan hukuman daftar hitam sesuai peraturan yang berlaku. "Dalam proses ini, penyelenggara tender juga harus memeriksa informasi perusahaan peserta tender, termasuk memeriksa relasi antara sesama peserta tender untuk mencegah terjadinya persekongkolan horizontal," katanya, pada 3 Februari 2024.

la menambahkan bahwa penyelenggara wajib memeriksa semua informasi perusahaan peserta tender, termasuk juga rekam jejak perusahaan dalam tender yang pernah dimenangkan. Apakah perusahaan tersebut pernah melakukan pelanggaran atau wanprestasi dalam pekerjaan sebelumnya. "Apabila penyelenggara lalai dalam memeriksa rekam jejak perusahaan dan pemenang tender kembali melakukan pelanggaran, besar resikonya PPK dijerat secara hukum atas dasar indikasi *favoritisme* dan persekongkolan vertikal," pungkasnya.

Penulis: Rangga Prasetya Aji Widodo dan Andre Yuris.

***Laporan ini hasil Fellowship Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa (PJB) yang dilaksanakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Timur.**

Sumber: <https://www.idenera.com/renovasi-cak-durasim-dikebut-saat-pandemi-meninggi-ada-apa/>.

TENDER TAK TERPERI DERMAGA PERI

Jaring.id edisi 10 Juli 2024.



Pembangunan Dermaga Peri Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, Jakarta sudah lama mangkrak. Pada awal November 2023 pelabuhan itu sepi. Tak tampak perahu nelayan bersandar di sana, apalagi pengunjung. Dari bibir dermaga hanya terlihat beberapa pemancing. Sementara disekelilingnya terserak bahan bangunan dari proyek jumbo mencapai Rp27,7 miliar. Tak ada atap permanen maupun sementara yang dapat melindungi pengunjung dari panas dan hujan. Ruas jalan menuju dermaga pun masih berupa campuran kerikil dan pasir.

Proyek Dermaga Peri merupakan salah satu paket proyek dari revitalisasi pelabuhan di Kepulauan Seribu. Proyek dilakukan guna meningkatkan standar pelayanan minimum angkutan laut, serta meningkatkan perekonomian masyarakat di Kepulauan Seribu, Khususnya di Pulau Kelapa.

Ali Maulana selaku Ketua RW 04 di Pulau Kelapa menyatakan bahwa sejak dua tahun lalu proses revitalisasi yang dilakukan hanya untuk Dermaga Peri. "Sedangkan untuk pembangunan kantor Dishub di sana saya tidak tahu," ujar Ali, November 2023 lalu.

Proyek pembangunan Dermaga Peri yang dimenangkan oleh PT Rayhan Indah Perkasa (PT RIP) dimulai sejak 2020 hingga 2022. Tapi pengerjaannya molor dari target, sehingga pemda memberikan perpanjangan waktu pengerjaan selama 50 hari atau sampai Februari 2023. Meski begitu, data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DKI Jakarta tidak menampilkan secara rinci pengerjaan revitalisasi di salah satu dermaga yang ada di Pulau Kelapa tersebut.

Dalam data yang sama pelaksanaan tender proyek ini berjalan berulang-ulang dan tidak ada keterangan jelas apakah pengulangan tersebut untuk paket yang sama atau proyek baru. Pun tidak ada penjelasan rinci area pelabuhan mana yang dikerjakan. LPSE hanya memuat keterangan bahwa dermaga berada di Pulau Kelapa, sedangkan pulau tersebut memiliki 4 dermaga, yakni Dermaga Peri, Dermaga Utama, Dermaga Benteng, dan Dermaga Pantura. Judul proyek beberapa tender pun terlihat sama dalam tiga tahun terakhir.

Revitalisasi pelabuhan di Pulau Kelapa dilelang pertama kali pada 27 April 2020. Saat itu, sedikitnya ada 132 perusahaan menjadi peserta lelang. PT Rayhan Indah Perkasa (PT RIP) menjadi pemenang proyek dengan nilai negosiasi Rp42,2 miliar.

Lelang kembali dilakukan setahun berselang. Kali ini lelang diikuti oleh 211 perusahaan. Lagi-lagi PT RIP terpilih sebagai pemenang. Namun, tender kali itu dinyatakan gagal dengan alasan adanya penolakan hasil pemilihan seperti yang tercantum pada laman LPSE. Penolakan itu tertera dalam surat Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah II Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 1577/-1.813.2 tanggal 8 Juni 2021 dan Surat dari Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah II Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 1723/-1.813.2.

Pada 2022, UPPD kembali melelang proyek revitalisasi pelabuhan di Pulau Kelapa. Berbeda dari tahun sebelumnya, tender dua tahun lalu dilakukan sebanyak dua kali dengan nilai HPS Rp27,7 miliar. Tender pertama yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 2022 dinyatakan gagal karena tidak ada perusahaan yang lulus dari evaluasi penawaran.

Selanjutnya pada 20 Juni 2020 dilakukan tender ulang. Saat itu hanya ada tiga peserta yang mengajukan penawaran. Dari ketiga peserta yang mengajukan penawaran, terdapat dua peserta yang memiliki nilai penawaran yang sama, yaitu PT RIP dan PT Jumindo Indah Perkasa. Walaupun memiliki nilai penawaran yang sama, PT RIP kembali menjadi pemenang.

Meski begitu, di lapangan PT RIP kerap kali tidak mengerjakan sendiri proyek tersebut. Proyek pembangunan Dermaga Peri dikerjakan oleh perusahaan lain,

yaitu PT Cipta Cahaya Aqillah (PT CCA)—milik politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sekaligus anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 Muhammad Idris. Berdasarkan dokumen lelang, PT CCA juga menjadi peserta lelang yang diikuti PT RIP, namun tidak pernah mengajukan penawaran. “Setahu saya, yang mengerjakan proyek itu perusahaan milik Haji Idris. Pemenangnya Haji Idris, yang menjalankan anak buahnya, Bang Lukman,” kembali Ali Maulana menjelaskan.

Salah satu pekerja pembongkaran bekas dermaga yang tidak bersedia disebutkan namanya mengiyakan bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh PT CCA. “Proyek ini yang pegang Pak Haji Idris. Dia pemborong di Pulau Seribu. Nama perusahaannya PT CCA,” ungkap dia.

Dalam dokumen yang kami miliki, PT RIP tercatat memiliki hubungan dengan PT CCA. Nama Lukman Hadi yang menjadi direktur di PT RIP pada September 2022 juga tertera sebagai direktur di PT CCA sejak 11 April 2022. Lukman dan Idris sama-sama tercatat sebagai pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu periode 2022-2024.

Perusahaan yang berdiri pada 2009 ini beralamat di Jalan Bougenville II Blok B-3 No 12, Taman Modern, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Dokumen AHU menyatakan bahwa Komisaris Utama serta pemilik saham tertinggi adalah Muhammad Idris.



Potret revitalisasi Dermaga Dishub Pulau Pramuka dari seberang RTH dan sudut Dermaga Utama, Oktober 2023. (Foto: Tim Kolaborasi tahun 2023).

Pada 3 Agustus 2019, tepatnya empat bulan usai pemilihan anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Idris keluar dari daftar direksi PT CCA. Saham yang ia miliki diberikan ke Syamsuddin. Lalu pada 11 April 2022, bersamaan dengan Lukman Hadi masuk sebagai direktur, saham tersebut beralih kepada Hayatullah - adik Muhammad Idris, sekaligus sebagai direktur utama.

Rangkap jabatan yang dilakukan oleh Lukman Hadi sebetulnya bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat. Pasal tersebut berbunyi, *seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam pasar bersangkutan yang sama atau memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*

“Adanya hubungan yang dekat antara peserta tender akan mempermudah koordinasi atau persengkongkolan antar peserta untuk memenangkan peserta tender tertentu. Namun itu tidak cukup, harus dibuktikan adanya koordinasi atau pengaturan antar mereka,” ujar Deswin selaku Kabiro humas LKPP melalui pesan WhatsApp, 27 Maret 2024.

Dua Perusahaan Satu Alamat

Dugaan perkongsian antara PT RIP dan PT CCA terlacak dari alamat kedua perusahaan. Penelusuran tim liputan menemukan bahwa keduanya memiliki alamat kantor yang sama. Dari laman LPSE dan LKPP diketahui bahwa alamat yang tertera adalah Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, Blok B Nomor 2 Lantai 3, Jalan Letjen Suprpto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Di sana, PT RIP berkantor di lantai tiga. Mereka berbagi ruangan dengan PT Integrated Link Creation. Dari luar, tidak ada papan nama yang menunjukkan bahwa PT RIP berkantor di sana.

Setelah naik dan masuk ke ruangan di lantai tiga, baru tampak papan nama PT RIP tertempel di tembok. Tidak ada aktivitas apapun di sana. Hanya tampak satu meja dan satu kursi yang masih terbungkus oleh plastik serta beberapa gulungan karpet.

Menurut data perusahaan PT RIP tertanggal 9 September 2022, pengurus perseroan hanya terdiri dari empat nama, yakni Ahmad sebagai direktur utama, Evy Silviah sebagai komisaris, dan posisi direktur diduduki oleh M. Iqbal, serta Lukman Hadi.

LELANG TENDER REVITALISASI DERMAGA/PELABUHAN DI PULAU KELAPA TAHUN 2020.



Guna keperluan konfirmasi kami sudah mencoba melayangkan permohonan wawancara kepada Direktur PT RIP, M. Iqbal. Di samping berkirim surat elektronik, pesan Whatsapp, kami juga menaruh surat ke kantor PT RIP lewat celah pintu kaca pada pukul 11.49 WIB, Selasa, 16 Januari 2024.

Seorang pegawai yang bekerja pada gudang kosmetik, di lantai satu gedung yang sama, mengatakan bahwa kantor PT RIP jarang buka. “Langsung saja hubungi Pak Iqbal, dia pengawas PT RIP. Biasanya beliau datang ke sini kalau ada rapat saja,” ucapnya, Jumat, 24 November 2023.

Tim liputan lantas menyambangi alamat kedua PT RIP yang terdaftar di dokumen Kementerian Hukum dan HAM sejak 2016. Alamat kedua ini berada tidak jauh dari alamat yang tercantum di LPSE dan LKPP, yaitu di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, Blok E/8, Jalan Letjen Suprpto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Alamat tersebut juga tercantum sebagai alamat PT CCA.

Data dari LPSE menunjukkan PT CCA mengubah alamat kantornya pada tanggal 30 Maret 2015 di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, Blok E1 Nomor 8, Jalan Letjen Suprpto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Namun, saat tiba di lokasi tim liputan tidak menemukan keberadaan PT RIP maupun PT CCA. Kantor di alamat tersebut telah ditempati oleh perusahaan distributor alat kesehatan. “Wah nggak tahu, sekarang ini *mah* kantor tempat saya kerja kalau sebelumnya enggak tahu perusahaan apa,” kata pegawai dari perusahaan baru tersebut.

Seorang staf dari pengelola Ruko Mega Grosir Cempaka Mas menerangkan bahwa bangunan ruko yang beralamatkan pada Blok E1 nomor 8 ini sudah sering kali

berganti pemilik. Penyewa di Ruko Mega Grosir ini sering kali tidak memberikan laporan terkait keluar dan masuknya perusahaan. "Itu kan pernah direnovasi. Cuma sampai saat ini saya belum paham itu. Si pemiliknya itu siapa. Apa disewakan. Apa dijual, karena mereka (perusahaan) nggak pernah laporan," kata staf pengelola yang enggan disebutkan namanya.

Sama seperti PT RIP, PT CCA juga memiliki dua alamat berbeda yang tercantum pada laman LPSE dan LKPP serta pada dokumen Kementerian Hukum dan HAM. Selain di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, PT CCA juga mencantumkan alamat di Jalan Bougenville II Blok B-3 No. 12, Taman Modern, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Tim liputan lantas datang ke alamat tersebut. Alih-alih disuguhi bangunan perkantoran maupun aktivitas perkantoran, tim justru menemukan rumah tinggal mewah dua lantai dan berpagar hitam. Rumah megah yang berdiri di atas lahan 1,5 hektare itu dimiliki oleh Muhammad Idris. Tepat di samping bangunan mewah itu, berdiri rumah bercat putih dengan sejumlah kurungan ayam di depannya yang juga dimiliki Idris.

Seorang perempuan paruh baya yang mengaku sebagai asisten rumah tangga membenarkan bahwa rumah tersebut milik Idris. Namun, majikannya sedang tidak ada di rumah. "Bapak lagi nggak ada," ujar perempuan itu sambil menerima surat permintaan wawancara pada Senin, 16 Januari 2024 pukul 12.09 WIB.

Seminggu setelahnya surat yang telah tim serahkan tak kunjung mendapatkan balasan dari kedua perusahaan tersebut. Tim kembali menghubungi Direktur PT RIP M. Iqbal melalui pesan Whatsapp untuk mengkonfirmasi surat tersebut pada Senin, 22 Januari 2024 pukul 11.31 WIB.

Sementara itu, Direktur PT RIP, Lukman Hadi mengklaim tidak mengetahui soal revitalisasi dermaga di Pulau Kelapa. Sebab saat proyek mulai berjalan, ia sudah tidak berada dalam jajaran direksi perusahaan tersebut. "Ke Pak Iqbal saja karena saya sudah tidak di situ dan saya juga tidak bertanggung jawab terhadap proyek dan perusahaan itu," kata Lukman melalui sambungan telepon pukul 13.48 WIB, Senin, 22 Januari 2024. Ia pun membantah berada di jajaran direksi PT CCA dan PT RIP.

Belakangan pernyataan berbeda disampaikan M. Iqbal. Menurutnya, Lukman adalah orang yang mengetahui proyek tersebut karena menjabat sebagai direktur operasional. Sedangkan dirinya yang hanya direktur keuangan dan pajak mengklaim

tidak mengetahui detail dari proyek tersebut. Menurutnya, tender revitalisasi dermaga di Pulau Kelapa pada 2020 lalu sempat tertunda karena pandemi Covid-19. “Pada 2020 dan 2021 nggak ada kerjaan karena anggaran tidak ada. Pemprov DKI alokasikan untuk Covid,” lanjutnya pada Jumat, 2 Februari 2024.

Iqbal menyatakan tidak tahu ihwal hubungan PT RIP dengan PT CCA. “Kami nggak tahu PT CCA dan tidak pernah KSO dengan perusahaan tersebut. Itu yang saya tahu ya,” ungkap Iqbal.

Terhitung sudah satu bulan sejak pertama kali surat permintaan wawancara dikirimkan, tim kembali mendatangi rumah Muhammad Idris pada 17 Februari 2024 sekira pukul 11.18 WIB. Namun, Idris tetap tidak bisa ditemui. “Bapak masih di pulau,” ujar ujar asisten rumah tangga Idris. “Surat sudah saya sampaikan,” ia menambahkan.

Hal Serupa di Pulau Lain

Berdasarkan dari LPSE, proyek revitalisasi dermaga atau pelabuhan dilakukan secara serentak pada 2020-2023 di tiga pulau di Kepulauan Seribu, yakni Pulau Pramuka, Pulau Kelapa dan Pulau Sebira. Mula-mula pengerjaan proyek dilakukan di Pulau Pramuka dan Sebira. Tender ini dimenangkan PT Linggarjati Perkasa dengan nilai HPS Rp58 miliar. Sedangkan di Pelabuhan Sebira, tender revitalisasi pelabuhan atau dermaga dimenangkan oleh PT Karya Pembangunan Rezki dengan nilai HPS Rp50,8 miliar. Meski begitu nama perusahaan pemenang dan nilai kontrak proyek revitalisasi pelabuhan di kedua pulau tidak tercatat di laman LPSE DKI Jakarta.

Satu tahun kemudian, proyek di Pulau Pramuka dan Pulau Sebira kembali dilelang. Tender di Pulau Pramuka dimenangkan oleh Halim Perdana Jayakarsa dengan nilai HPS Rp73,3 miliar, sedangkan di Pulau Sebira dimenangkan oleh PT Sena Sanjaya Makmur sejahtera dengan nilai HPS Rp64,8 miliar, tapi tender kedua tersebut gagal. Di samping karena pandemi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit Penyelenggara Pelabuhan II tidak kunjung menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

Saat tender dilelang kembali pada 2022, nilai tender revitalisasi dermaga Pulau Pramuka menyusut menjadi Rp33,5 miliar. Tender yang dimenangkan oleh PT Masa Metonia Abadi itu tak hanya untuk dermaga, tapi juga membangun rumah dinas Dishub.

LELANG TENDER REVITALISASI PELABUHAN

TAHUN	PULAU PRAMUKA	PULAU SEBIRA
2020	<ul style="list-style-type: none"> • 19 Maret tender mulai dilelang dengan nilai HPS 58 miliar. • Tender diikuti 132 peserta dan dimenangkan oleh PT Linggarjati Perkasa. • Tender selesai. 	<ul style="list-style-type: none"> • 27 April tender mulai dilelang dengan nilai HPS 50,8 miliar. • Tender diikuti 135 peserta dan dimenangkan oleh PT Karya Pembangunan Rezki. • Tender selesai.
2021	<ul style="list-style-type: none"> • 10 Mei tender mulai dilelang dengan nilai HPS 73,3 miliar. • Tender diikuti 172 peserta dan dimenangkan oleh PT Halim Perdana Jayakarta. • Tender gagal. 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 April tender mulai dilelang dengan nilai HPS 64,8 miliar. • Tender diikuti 176 peserta dan dimenangkan oleh PT Sena Sanjaya Makmur Sejahtera. • Tender gagal.
2022	<ul style="list-style-type: none"> • 20 Juni tender mulai dilelang dengan nilai HPS 33,5 miliar. • Tender diikuti 120 peserta dan dimenangkan oleh PT Masa Metonia Abadi. • Tender selesai. 	<ul style="list-style-type: none"> • 21 Juli tender mulai dilelang dengan nilai HPS 44,2 miliar. • Tender diikuti 106 peserta dan dimenangkan oleh PT Pharma Karya Adhimandiri. • Tender selesai.

Sutanto selaku PPK dalam proyek revitalisasi di Pulau Kelapa, Pramuka dan Sebira kemudian mengeluarkan surat pemutusan kontrak dengan PT MMA pada 2 Februari 2024. Perusahaan dianggap gagal memperbaiki kinerja setelah diberikan kesempatan kedua dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya.

Tim liputan berupaya melakukan konfirmasi ke Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang berkaitan dengan proses lelang pengadaan dan pengawasan revitalisasi pelabuhan di Pulau Kelapa, yakni Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan UPPD, yang mana semula terdapat dua UPPD yaitu UPPD I dan II kini telah dilebur menjadi UPPD. Akan tetapi, kedua instansi tersebut enggan berkomentar.

Surat permintaan wawancara pertama dikirim dan ditujukan kepada Syafrin Liputo selaku kepala Dishub pada Kamis, 22 Desember 2023 dan diterima petugas keamanan pukul 12.57 WIB. Lalu pada Jumat, 23 Desember 2023 kami melayangkan surat kedua yang ditujukan kepada kepala UPPD DKI Jakarta. Salah satu staf Dishub kemudian menghubungi kami pada Rabu, 27 Desember 2023 dengan menyatakan

bahwa surat telah didisposisikan ke kepala Dishub dan memberi arahan agar wawancara bersama pihak UPPD. Ia juga memberikan nomor salah satu staff UPPD bernama Riska. Masih di hari yang sama, tim langsung menghubungi Riska melalui pesan Whatsapp. “Besok saya kabari kembali,” balasnya.

Keesokan harinya, 28 Desember 2023, Riska memberikan kabar ihwal wawancara Kepala UPPD, Didi Kurniawan melalui Januar selaku Kasatpel Fasbuh pada Jumat, 29 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB. Namun saat disambangi ke UUPD, Januar tak berada di tempat. Dua orang staf Fasbuh bernama Sadewo dan Doni juga menyatakan tidak memiliki wewenang untuk menjawab pertanyaan terkait revitalisasi dermaga di Kepulauan Seribu. “Kami juga bingung untuk menjawab pertanyaan karena kami tidak tahu persoalannya,” ujar Doni diiyakan Sadewo.

Sadewo menyarankan agar tim menghubungi Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat terkait revitalisasi pelabuhan atau dermaga di Kepulauan Seribu. Sudinhub dinilai lebih mengetahui tentang proyek revitalisasi tersebut.

Tim tetap berupaya melakukan konfirmasi kepada OPD terkait dengan menghubungi Tara Sandoro selaku PIC Sudinhub Kepulauan Seribu. Tara mengatakan revitalisasi pelabuhan atau dermaga di Kepulauan Seribu pada 2022 tidak ada. Sebab Sudinhub baru mengalami pembentukan kembali pada 2023. “Sudinhub Kepulauan Seribu tidak ada kegiatan revitalisasi dermaga di pulau tersebut dan Sudinhub Kepulauan Seribu pun baru kembali dibentuk pada TA 2023,” jawabnya pada Jumat, 29 Desember 2023.

Sementara Riska sempat memberi keterangan setelah tim menagih waktu wawancara Januar pada awal Januari lalu. “Yang saya tahu saat ini, untuk kegiatan di Pulau Sebira pekerjaan sudah selesai. Untuk kegiatan di Pulau Kelapa, pekerjaan sudah selesai. Untuk kegiatan di Pulau Pramuka, sedang tahap penyelesaian. Itu yang kami lihat di lapangan saat kami melakukan *monitoring* kegiatan di UPPD, kebetulan di tahun 2023 menjadi 1 wilayah kerja UPPD Muara Angke,” tulis isi pesan Whatsapp yang diterima pada Selasa, 2 Januari 2024.

Penulis: Valensiya, LPM Progress.

Sumber: <https://jaring.id/tender-tak-terperi-dermaga-peril/>.

DERETAN MASALAH BERLABUH DI PROYEK REVITALISASI DERMAGA PULAU PRAMUKA

Jaring.id edisi 29 Juni 2024.



Sejumlah masalah mencuat dalam proyek revitalisasi pelabuhan di Pulau Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Mulai dari proses tender hingga persoalan di perusahaan pelaksana mengakibatkan proyek tak kunjung rampung.

Tiga operator derek jangkung atau *crane* memindahkan muatan berupa bahan bangunan dari kapal *Landing Craft Transport* (LCT) di dermaga Pulau Pramuka, Jakarta pada Oktober 2023. Tak jauh dari dermaga tampak sejumlah pekerja hilir mudik di lokasi proyek revitalisasi salah satu pelabuhan di Kepulauan Seribu.

Revitalisasi dermaga di Pulau Pramuka yang merupakan gugusan Pulau Seribu pada awalnya dimasukkan ke dalam Daftar Kegiatan Strategis Daerah (KSD) DKI Jakarta 2019. Hal itu diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 1107 Tahun 2019. Tiga tahun

berselang statusnya naik menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) lewat Permenko 21/2022. Dalam aturan tersebut, Pulau Seribu menjadi satu-satunya wilayah yang menjadi lokasi PSN di sektor pariwisata.

Di balik status menterengnya, proyek ini ditengarai menyimpan sejumlah persoalan. Mulai dari proses tender dan pelaksanaan pembangunan, hingga minimnya pelibatan warga dan dampak buruknya terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan laman LPSE DKI Jakarta, terdapat enam tender terkait pembangunan atau revitalisasi dermaga Pulau Pramuka yang dilakukan pada periode 2020-2024. Tidak terdapat penjelasan rinci mengenai proyek, khususnya soal lokasi dermaga yang bakal direvitalisasi. Padahal, di Pulau Pramuka terdapat empat dermaga.

Tender pertama diumumkan pada 19 Maret 2020 dan diikuti oleh 132 peserta. PT Linggarjati Perkasa yang mengajukan harga penawaran Rp53,58 miliar ditetapkan sebagai pemenang. Namun, laman LPSE tak mencatat informasi soal adanya penandatanganan kontrak untuk proyek ini. Bahkan, dalam perubahan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 yang diteken pada 9 Oktober 2020, pagu kegiatan Revitalisasi Dermaga/Pelabuhan di Pulau Pramuka yang semula dianggarkan Rp70 miliar, dinolkan.



Setelahnya, terdapat empat tender dengan nama identik “Revitalisasi Pelabuhan Pulau Pramuka (Fisik)” pada 2021-2022. Tiga tender pertama dinyatakan gagal, sedangkan tender keempat dimenangkan oleh PT Masa Metonia Abadi (PT MMA). Dari pagu proyek senilai Rp76,8 miliar, perusahaan tersebut menjadi penawar terendah dengan nilai Rp26,8 miliar. Berdasarkan data di laman LPSE DKI Jakarta, penandatanganan kontrak dilakukan pada Juni-Juli 2022.

Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bergerak cepat. Mereka menyosialisasikan proyek tersebut pada Agustus 2022. Namun, tidak semua warga diikutsertakan. Ketua RW 04 Pulau Pramuka, Titin adalah satu dari warga yang diundang. Meski begitu, ia mengaku tidak mendapatkan penjelasan yang cukup saat sosialisasi. “Untuk pekerjaan kami kurang tahu. Pokoknya tanggal segini, bulan segini, begitu,” katanya saat ditemui tim liputan.

Sementara itu, Herman, Ketua Smiling Coral Indonesia (SCI) mengaku tidak diikutsertakan dalam sosialisasi. Padahal, lokasi proyek berdekatan dengan area transplantasi terumbu karang yang ia lakukan bersama warga. “Ada warga yang diundang tapi terbatas. Mereka juga nggak bakalan nyari orang yang kritis-kritis gitu, sengaja memang,” ujarnya.

Di Jakarta pada 2022, MMA tidak hanya menggarap proyek revitalisasi pelabuhan Pulau Pramuka. Perusahaan ini juga tercatat sebagai pemenang tender pembangunan rumah pompa PHB CIPA dengan nilai kontrak Rp30,14 miliar. Selain itu, mereka juga menggarap proyek dengan nilai kontrak Rp23,68 miliar untuk pembangunan Waduk Kampung Rambutan, Waduk Cimanggung dan Waduk Sunter Selatan Sisi Timur.

Seturut profil LinkedIn-nya perusahaan ini baru didirikan pada 12 Mei 2020. Berdasarkan Profil Perusahaan yang kami akses melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, perusahaan ini digawangi oleh 6 direktur dan 2 komisaris. Posisi Direktur Utama dijabat oleh Dominggus Allo P. Menariknya, menurut data *opentender.net*, nama yang sama juga tercatat sebagai Direktur Cabang Jakarta PT Satria Lestari Multi (SLM).

Berdasarkan situs *Inaproc*, SLM tercatat dalam daftar hitam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Mereka dilarang mengikuti pengadaan barang dan jasa di seluruh kementerian, lembaga, dan perangkat daerah selama setahun sejak 26 April 2024.



Ruko 2 lantai di Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat yang menjadi kantor PT Masa Metonia Abadi. (Foto: Tim Kolaborasi tahun 2023).

Nama lain yang tercatat sebagai petinggi Masa Metonia Abadi adalah Reinhard Bonggakaraeng yang menjabat sebagai direktur. Ia juga memiliki jabatan pula di PT Sarjis Agung Indrajaya. Perusahaan ini juga masuk daftar hitam dan dikenai sanksi larangan mengikuti tender pemerintah hingga 9 November 2024.

Tim liputan mendatangi kantor MMA di Kembangan, Jakarta Barat untuk melakukan konfirmasi pada 16 Februari 2024. Tak tampak ada aktivitas berarti di kantor tersebut. Setelah menunggu beberapa jam di depan kantor, kami hanya berhasil menemui salah seorang staf untuk menyampaikan surat permintaan wawancara.

Kami juga berusaha menghubungi nomor telepon Direktur Utama PT MMA, Dominggus Allo untuk meminta konfirmasi. Baik surat permintaan wawancara atau panggilan telepon tidak direspons hingga berita ini terbit.

Icam, bukan nama sebenarnya, salah satu warga Pulau Pramuka menyebut bahwa revitalisasi dermaga Pulau Pramuka oleh PT Masa Metonia Abadi, kacau sejak awal. Mulai dari pematangan lahan dan pemotongan pohon-pohon di area dermaga,

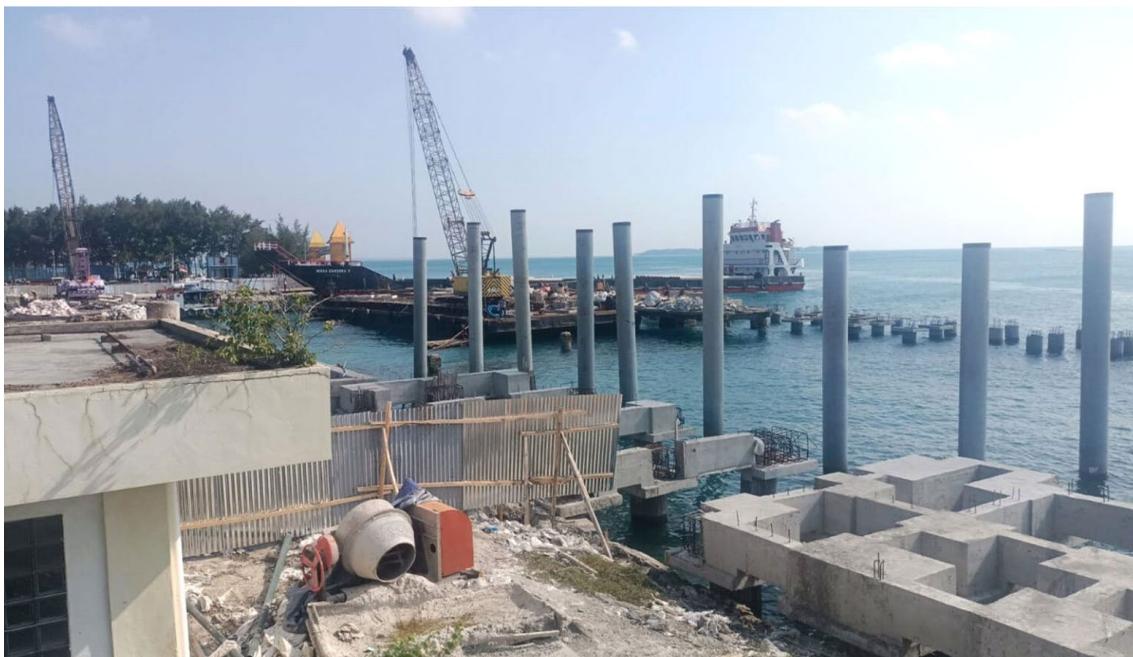
hingga upah pekerja yang tidak dibayar. Walhasil, beberapa pekerja memilih mengundurkan diri. “Padahal itu proyek besar,” ujarnya.

Berdasarkan kontrak, PT MMA diberi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan selama 135 hari sejak 8 Agustus 2022. Artinya, pembangunan mesti rampung pada pertengahan Januari 2023. Namun, berdasarkan informasi di laman LPSE DKI Jakarta, perusahaan tak mampu menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan kedua.

Sutanto, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Revitalisasi Pelabuhan Pulau Kelapa kemudian mengeluarkan surat pemutusan kontrak pada 2 Februari 2024. Di lokasi proyek, hanya tampak 15 tiang pancang calon sandaran kapal yang sempat terbangun.

Di tengah kekusutan proyek, UPPD II DKI Jakarta kembali melelang proyek revitalisasi Dermaga Pulau Pramuka pada 17 Mei 2023. Judul proyeknya sama persis dengan lelang proyek yang dimenangkan PT MMA. Tak jelas apakah tender tersebut merupakan paket yang sama dengan yang dikerjakan PT MMA atau merupakan proyek baru.

PT Aulia Multi Sarana (AMS) ditetapkan sebagai pemenang proyek tersebut dengan nilai kontrak Rp48,82 miliar. Ketika tim liputan menyambangi lokasi proyek para



Tiang pancang dan pondasi yang dikerjakan PT Masa Metonia di Dermaga sandar kapal di Pulau Pramuka terpasang. (Foto: Tim Kolaborasi tahun 2023).

pertengahan Oktober 2023, pembangunan dermaga yang ditinggal PT MMA belum banyak berubah. Kegiatan para pekerja PT AMS difokuskan pada pembangunan gedung terminal penumpang dan rumah dinas untuk Dinas Perhubungan.

Tim kolaborasi telah berupaya mengonfirmasi berbagai permasalahan terkait tender revitalisasi atau pembangunan dermaga Pulau Pramuka kepada Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Permintaan wawancara kami diteruskan kepada Januar Hadi, Kepala Satuan Pelaksana Fasilitas Pelabuhan. Ia kemudian meminta dua orang stafnya, Sadewo dan Doni untuk menjawab pertanyaan kami. "Kami juga tidak tahu mau menjawab bagaimana. Karena kami tidak tahu persoalannya," ujar Doni pada 29 Desember 2023.

Ketua Smiling Coral Indonesia (SCI), Herman menjelaskan bahwa revitalisasi dermaga Pulau Pramuka berdampak pada terumbu karang di sekitarnya. Pasalnya, bahan material dan kotoran dari aktivitas pembangunan itu merusak terumbu karang dan biota laut lainnya.

Area transplantasi terumbu karang yang dikelola SCI hanya berjarak sekitar 150 meter dari proyek revitalisasi dermaga Pulau Pramuka. Sejauh ini, aktivitas yang mereka lakukan telah berhasil memulihkan area terumbu karang seluas 300 meter persegi di perairan Pulau Pramuka.

Hal lain disampaikan Rosadi, anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pulau Pramuka. Semula, ia menyambut baik revitalisasi dermaga lantaran menganggapnya bisa menarik lebih banyak pelancong. Belakangan, Rosadi meradang karena revitalisasi yang dilakukan tidak menyeluruh. Pemerintah tidak memperbaiki sarana dan prasarana pendukung pariwisata lain, seperti kapasitas listrik di Pulau Pramuka. "Tamu banyak yang mengeluhkan fasilitas listrik," ungkapnya.

Penulis: Laras, LPM Progress.

Sebagian besar reportase berita berjudul "Deretan Masalah Berlabuh di Proyek Revitalisasi Dermaga Pulau Pramuka" ini dilakukan pada akhir 2023. Kami telah memperbarui sejumlah informasi dan melakukan upaya konfirmasi sebelum terbit. Ditulis oleh Laras dari Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Progress UNINDRA, cerita ini disunting dan dimuat oleh Jaring.id atas dukungan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Sumber: <https://jaring.id/pembangunan-dermaga-pulau-pramuka/>.

SENGKARUT REVITALISASI DERMAGA KEPULAUAN SERIBU

Bantennews.co.id edisi 3 Juni 2024.



Suasana Dermaga Peri pelabuhan eksisting di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. (Foto: Nindia/Bantennews.co.id).

Suasana di kawasan pembangunan revitalisasi Dermaga Peri, pelabuhan eksisting di Pulau Kelapa, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, DKI Jakarta pada November 2023 lalu tampak lengang. Tidak ada kapal yang bersandar melakukan bongkar-muat barang di sana.

Ruas jalan akses menuju pelabuhan belum teraspal, berkerikil dan digenangi air di beberapa titik. Kantor pelabuhan yang rencananya bakal dibangun juga belum tampak berdiri. Kondisi itu dimanfaatkan sejumlah warga sekitar untuk memancing ikan di pinggir pantai yang sepi. "Lumayan makan waktu juga untuk dermaga," ucap Edi (bukan nama sebenarnya), salah satu pekerja proyek di Pulau Kelapa pada Sabtu, 25 November 2023.

Pembangunan Dermaga Peri merupakan salah satu paket revitalisasi pelabuhan Kepulauan Seribu yang dicanangkan Pemerintah DKI Jakarta. Proyek tersebut semestinya berjalan sejak 2022 sebagai upaya perbaikan standar pelayanan minimum

angkutan laut. Tidak kunjung rampungnya pengerjaan, membuat pelabuhan itu menjadi sorotan publik. Proyek yang dikerjakan oleh PT Rayhan Indah Perkasa itu bahkan bermasalah sejak awal. Mulai dari dugaan adanya persaingan usaha tidak sehat hingga molornya pekerjaan.

<h1>LELANG BERULANG</h1> <h2>REVITALISASI PELABUHAN PULAU KELAPA</h2>		
<p>Dinas Perhubungan (Dishub) dan Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah (UPPD) II DKI Jakarta membuat paket pengadaan revitalisasi dermaga di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu secara berulang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tahun 2020 - 2022.</p>		
		
2020 Revitalisasi Dermaga/ Pelabuhan di Pulau Kelapa.	2021 Revitalisasi Pelabuhan Pulau Kelapa (Fisik).	2022 Revitalisasi Pelabuhan Pulau Kelapa (Fisik).
<ul style="list-style-type: none"> • 27 April. Proyek mulai dilelang dengan nilai Rp43,6 miliar. • Dari 132 perusahaan yang ikut lelang, hanya 2 yang menawar. • PT Rayhan Indah Perkasa menawar sebesar Rp42,2 miliar & PT Cipta Karya Multi Teknik senilai Rp41,4 miliar. • PT Rayhan Indah Perkasa menang dengan harga Rp42,2 miliar. • Meski tender dinyatakan selesai, tidak ada keterangan pemenang & nilai kontrak di LPSE DKI Jakarta. 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 April. Paket kembali dibuat dengan nilai Rp47,9 miliar. • 211 perusahaan ikut lelang, 14 diantaranya melakukan penawaran termasuk PT Rayhan Indah Perkasa. • PT Rayhan Indah Perkasa menang dengan harga Rp40,8 miliar. • Hasil pemilihan pemenang ditolak & tender dinyatakan gagal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Paket kembali dilelang dan dilakukan dua kali dengan nama sama seperti tahun 2021. Nilainya turun menjadi Rp27,7 miliar. • 20 Mei. Tender pertama diikuti 114 perusahaan dan gagal karena tidak ada yang lulus evaluasi penawaran. • 20 Juni. Tender kedua, hanya diikuti 76 perusahaan, 32 diantaranya peserta tender sebelumnya. • 3 perusahaan melakukan penawaran: PT Rayhan Indah Perkasa, PT Jumindo Indah Perkasa, PT Paku Bangun Jaya. • Harga penawaran PT Rayhan Indah Perkasa & PT Jumindo Indah Perkasa sama sebesar Rp22.120.174.672,75. Keduanya tidak memiliki Kerja Sama Operasional (KSO). • 3 Agustus. Pokja lelang menetapkan PT Rayhan Indah Perkasa sebagai pemenang sesuai dengan harga penawaran

Data source: lpse.jakarta.go.id

Paket revitalisasi dermaga di Pulau Kelapa dibuat tahun 2020 hingga 2022 melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Namun, pelaksanaan tender proyek ini berjalan berulang-ulang dan tidak ada keterangan jelas apakah pengulangan tersebut untuk paket yang sama atau proyek baru. Pun tidak ada penjelasan rinci area pelabuhan mana yang dikerjakan padahal di Pulau Kelapa ada empat dermaga.

Selain itu juga ada sejumlah kegagalan lain. PT Rayhan Indah Perkasa yang menjadi pemenang dalam pengulangan tender tersebut diduga mensubkontrakkan pengerjaan proyek itu ke PT Cipta Cahaya Aqillah yang sempat menjadi salah satu peserta lelang. Semakin aneh, ternyata PT Rayhan dan PT Cipta Cahaya Aqillah ternyata dipimpin oleh orang yang sama, Lukman Hadi.

Berdasarkan dokumen Administrasi Hukum Umum (AHU) PT Cipta Cahaya Aqillah, perseroan itu berdiri pada 2009 dan beralamat di Jalan Bougenville II Blok B-3 Nomor 12, Taman Modern, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Komisaris Utama serta pemilik saham tertinggi di perusahaan kala itu adalah Muhammad Idris.

Nama Muhammad Idris cukup masyhur sebagai politisi dan juga pengusaha. Dirinya adalah satu-satunya putra daerah asal Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dari Partai NasDem yang berhasil menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.

Sekitar Agustus 2019, terjadi perubahan direksi dan komisaris serta peralihan hingga penggantian nama pemegang saham di PT Cipta Cahaya Aqillah. Idris keluar dari daftar pengurus PT Cipta Cahaya Aqillah. Saham milik Idris lalu dialihkan ke Syamsuddin.

Kemudian di 11 April 2022, saham milik Syamsuddin itu dialihkan ke Hayatullah yang merupakan adik dari Muhammad Idris. Hayatullah lalu menjadi Direktur Utama dan Lukman Hadi masuk sebagai Direktur PT Cipta Cahaya Aqillah.

Sementara itu berdasarkan data perusahaan PT Rayhan Indah Perkasa tertanggal 9 September 2022 diketahui bahwa nama Lukman Hadi tercatat sebagai salah satu direktur di sana. Jajaran pemimpin lainnya adalah Ahmad sebagai direktur utama PT Rayhan, Evy Silviah sebagai komisaris, dan posisi M. Iqbal sebagai direktur bersama Lukman Hadi.

Salah satu pekerja di Pulau Kelapa yang enggan menyebutkan nama, mengaku hanya mengetahui proyek revitalisasi Dermaga Peri dikerjakan oleh PT Cipta Cahaya

Aqillah. Menurut dia, perusahaan itu adalah milik Muhammad Idris, pemborong di Kepulauan Seribu. “Yang pegang Pak Haji Idris, PT-nya kalau membangun Cahaya Aqillah, dia pemborong di Pulau Seribu,” katanya.

Lukman dan Muhammad Idris adalah kawan dekat. Mereka berada di kepengurusan DPD Partai NasDem Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu periode 2022-2024. Di tempat terpisah, Ketua RW 04 Pulau Kelapa, Ali Maulana mengatakan, saat ini revitalisasi Dermaga Peri sudah selesai dikerjakan dan telah dioperasikan untuk aktivitas naik turun penumpang. Namun, untuk pembangunan kantor pelabuhan memang belum dilakukan. “Pembangunan dermaganya dibangun tahun 2022 kalau enggak salah itu sekitar Agustus, pertengahan tahun lah,” jelas Ali saat ditemui pada Sabtu, 25 November 2023.

Sebelum melakukan revitalisasi, kata Ali, pihak Kelurahan Pulau Kelapa 1 kerap melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sosialisasi dilakukan sekitar 2 bulan sebelum pekerjaan dimulai dan dihadiri oleh RT, RW, hingga tokoh masyarakat setempat.

Mengenai nama dan pemilik perusahaan yang mengerjakan proyek revitalisasi Dermaga Peri, ia hanya sebatas mengetahui pekerjaan itu dikerjakan oleh Muhammad Idris dan Lukman. “Kalau perusahaannya sih enggak tahu saya, yang punya itu Haji Idris. Pemenangnya Haji Idris, beliau menjalani sama anak buahnya, bang Lukman,” ucap Ali.

Dua Perusahaan Satu Alamat

PT Rayhan Indah Perkasa memiliki dua alamat yang berbeda antara yang tercantum di laman LPSE dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan dokumen yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Alamat yang tertera di LKPP dan LPSE berlokasi di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, Blok B Nomor 2 Lantai 3, Jalan Letjen Suprpto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Gedung tiga lantai itu tampak usang dan sepi. Tidak terlihat papan nama PT Rayhan Indah Perkasa di depan bangunan. Ruko yang berisikan 3 perusahaan itu berada di antara bank dan kantor akuntan publik.

Di lantai 1 terlihat tumpukan kardus, rupanya itu adalah gudang perusahaan kosmetik dan di lantai 2 merupakan ruang admin kantor tersebut. Sedangkan, PT Rayhan Indah Perkasa berada di lantai 3 bersama perusahaan kontraktor bernama PT Integrated Link Creation.

LELANG REVITALISASI DERMAGA PULAU KELAPA POTENSI TABRAK UU DAN PERPRES

Koordinator Pengelolaan Pengetahuan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), **Wana Alamsyah** dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), **Deswin Nur** menilai rangkap jabatan hingga adanya peserta lelang menawar dengan harga sama dapat menjadi indikasi awal dugaan pelanggaran **Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**.

PERSEKONGKOLAN

Pasal 22 berbunyi:

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender

Indikasi persekongkolan saat evaluasi dan penetapan pemenang tender/lelang salah satunya yakni para peserta tender/lelang memasukkan harga penawaran yang hampir sama.

“Persekongkolan horizontal dapat merujuk Pedoman Pasal 22. Dijelaskan indikasi persekongkolan saat evaluasi dan penetapan pemenang tender. Hal ini dapat dibuktikan dari harga penawaran milik PT Rayhan Indah Perkasa dan PT Jumindo Indah Perkasa.”



Wana Alamsyah
Koordinator Pengelolaan
Pengetahuan di *Indonesia
Corruption Watch* (ICW)

“Rangkap jabatan antar peserta tender dapat menjadi salah satu indikasi adanya dugaan pelanggaran UU No. 5/1999 karena hubungan yang dekat antar peserta tender, akan mempermudah koordinasi atau persekongkolan antar peserta untuk memenangkan peserta tender tertentu.”



Deswin Nur
Kepala Biro Hubungan
Masyarakat dan Kerja Sama
Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU)

JABATAN RANGKAP

Pasal 26 berbunyi:

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan pada waktu yang bersamaan, dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- a. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama, atau;
- b. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
- c. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

PASAL 78 PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 12 TAHUN 2021

- (1) Dalam hal peserta pemilihan;
 - b. Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. Terindikasi melakukan korupsi, kolusi dan atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia; **peserta pemilihan dikenai sanksi administratif.**
- (3) Dalam hal Penyedia;
 - f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak; **Penyedia dikenai sanksi administratif.**
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
 - f. Ayat (3) huruf f dikenakan **sanksi denda keterlambatan.**

Di lantai 3 itu terlihat ruangan berpintu kaca dengan papan nama PT Rayhan Indah Perkasa terempel di tembok. Tersedia pula 1 meja dan 1 kursi yang masih terbungkus plastik serta beberapa gulungan karpet.

Seorang pegawai yang keluar dari bangunan itu dan tidak mau menyebutkan namanya, mengatakan, kantor PT Rayhan Indah Perkasa memang sepi dan jarang disambangi. "Langsung saja hubungi Pak Iqbal, dia pengawas PT Rayhan. Biasanya beliau datang ke sini kalau ada rapat saja, kantornya yang beroperasi sih katanya di Tanah Abang tapi saya juga enggak tahu," ujarnya.

Kemudian, alamat PT Rayhan Indah Perkasa yang terdaftar di dokumen Kementerian Hukum dan HAM berada di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, Blok E1/8, Jalan Letjen Suprpto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Lokasi ini hanya berjarak sekitar kurang 200 meter dari tempat sebelumnya.

Alamat PT Rayhan Indah Perkasa tersebut nyatanya sama dengan alamat terbaru PT Cipta Cahaya Aqillah. Menurut data yang diperoleh, PT Cipta Cahaya Aqillah mengubah alamat kantornya ke alamat itu pada 30 Maret 2015 dan mencantumkannya di LPSE.

Di lokasi tampak bangunan ruko berwarna silver. Namun, kini gedung itu bukan lagi disewa oleh PT Rayhan Indah Perkasa dan PT Cipta Cahaya Aqillah melainkan perusahaan distributor alat kesehatan.

Saling Lempar

Untuk mengkonfirmasi ihwal temuan, tim mengajukan surat permintaan wawancara yang langsung diantarkan ke alamat PT Rayhan Indah Perkasa di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, Blok B Nomor 2 Lantai 3, Jalan Letjen Suprpto, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Setibanya di lokasi, kantor itu terkunci dan tidak berpenghuni. Akhirnya surat yang ditujukan kepada Direktur PT Rayhan Indah Perkasa, M. Iqbal, diselipkan melalui celah pintu kaca pada pukul 11.49 WIB, Selasa, 16 Januari 2024. Surat itu juga dikirimkan melalui *e-mail* serta pesan WhatsApp M. Iqbal.

Di hari yang sama, tim juga menyerahkan surat permintaan wawancara kepada Muhammad Idris. Surat itu diantarkan langsung ke alamat kantor perusahaan yang berada di Jalan Bougenville II Blok B-3 No. 12, Taman Modern, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Alih-alih menemukan bangunan berupa perkantoran, tim justru menemukan rumah tinggal dua lantai berwarna putih dan berpagar hitam di lahan sekitar 1,5 hektare. Seorang asisten rumah tangga yang tidak mau menyebutkan namanya membenarkan bahwa rumah megah tersebut milik Muhammad Idris. Namun menurut dia, Idris sedang tidak di rumah. "Bapak lagi enggak ada," ucap wanita paruh baya seraya menerima surat permintaan wawancara untuk Idris pada Selasa, 16 Januari 2024 pukul 12.09 WIB.

Hampir satu minggu berlalu sejak surat dikirimkan, kedua perusahaan tidak merespon. Tim kemudian mengirimkan kembali pesan kepada direktur PT Rayhan Indah Perkasa M. Iqbal, Senin, 22 Januari 2024 pukul 11.31 WIB.

M. Iqbal menyebutkan, proyek revitalisasi itu bukan berada di kewenangannya sebagai Direktur Keuangan dan Pajak di PT Rayhan Indah Perkasa. Melainkan, secara teknisnya berada di kewenangan Lukman Hadi selaku Direktur Operasional PT Rayhan Indah Perkasa. "Saya urus keuangan dan pajak, kurang paham saya teknis," ujar Iqbal dalam pesan tersebut, Senin, 22 Januari 2024.

Sementara itu, Direktur Operasional PT Rayhan Indah Perkasa, Lukman Hadi mengklaim juga tidak mengetahui soal revitalisasi dermaga di Pulau Kelapa. Dia beralasan, saat proyek mulai berjalan, dirinya sudah tidak berada dalam jajaran direksi perusahaan tersebut. "Saya juga enggak paham," kata Lukman melalui sambungan telepon pukul 13.48 WIB, Senin, 22 Januari 2024.

Lukman mengaku ia juga tidak bertanggung jawab atas pekerjaan revitalisasi dermaga di Pulau Kelapa. "Saya sudah tidak di situ dan saya juga tidak bertanggung jawab terhadap proyek dan perusahaan itu," ujarnya.

Meski Lukman membantah sudah tidak berada di PT Rayhan Indah Perkasa saat proyek revitalisasi dermaga Pulau Kelapa berjalan, namun jejak keterlibatannya di perusahaan itu juga ditemukan di dokumen lain. Salah satunya adalah dokumen putusan Mahkamah Agung mengenai gugatan yang dilayangkan PT Rayhan Indah Perkasa terhadap PT Buana Pahala Multi Marindo perihal penyewaan kapal keruk yang tak sesuai spesifikasi. Di dokumen itu nama Lukman Hadi saat itu masih tertera sebagai pimpinan PT Rayhan Indah Perkasa.

Toh, Lukman berkukuh tidak terlibat. Dia mengatakan, selain sudah tidak berada di PT Rayhan Indah Perkasa, dirinya juga tidak lagi berstatus sebagai Direktur PT Cipta Cahaya Aqillah. "Saya sudah enggak di dua perusahaan itu (PT Rayhan Indah Perkasa

dan PT Cipta Cahaya Aqillah) sekarang ya, jadi saya belum bisa kasih jawaban apa-apa,” tegasnya.

Tim kolaborasi kembali menghubungi M. Iqbal mengenai dugaan adanya kerja sama operasi (KSO) antara PT Rayhan Indah Perkasa dengan PT Cipta Cahaya Aqillah dalam pengerjaan proyek konstruksi revitalisasi Dermaga Peri di Pulau Kelapa. “Kami enggak tahu PT Cipta Cahaya Aqillah dan tidak pernah KSO dengan PT Cipta (Cipta Cahaya Aqillah). Ini yang saya tahu ya,” ungkap Iqbal melalui pesan singkat pukul 14.49 WIB, Jumat, 2 Februari 2024.

Iqbal menuturkan kegiatan revitalisasi pelabuhan di Pulau Kelapa pada tahun 2022 hanya untuk konstruksi dermaga saja bukan gedung pelabuhan. Namun, ia tidak mengetahui detail waktu dan dermaga mana yang direvitalisasi. “Kalau lokasinya saya cuma tahu di Pulau Kelapa letaknya di mana saya enggak tahu. Kalau enggak salah Juni atau Juli atau Agustus 2022 selesai Desember 2022. Yang di Kelapa selesai dermaganya, hanya dermaga saja pekerjaan tahun 2022, tidak termasuk gedung,” terangnya.

Sedangkan, mengenai proyek revitalisasi dermaga di Pulau Kelapa yang dilelang pada tahun 2020 dan juga dimenangkan PT Rayhan Indah Perkasa, Iqbal menyebutkan tidak ada pekerjaan pada tahun tersebut lantaran pandemi Covid-19 dan seluruh anggaran Pemprov DKI Jakarta dialihkan untuk penanganan Covid-19. “2020 dan 2021 enggak ada kerjaan, anggaran enggak ada, Pemprov DKI alokasikan untuk Covid,” ucapnya.

Sebulan pasca pengantaran surat permohonan wawancara untuk Muhammad Idris, masih juga belum ada respon. Kemudian tim kembali menyambangi alamat PT Cipta Cahaya Aqillah pada 17 Februari 2024 sekira pukul 11.18 WIB, tetapi yang bersangkutan tidak berada di tempat. “Bapak masih di pulau. (Baliknya) enggak tahu kapan. Ini kan lagi ada pemilihan ya,” ujar asisten rumah tangga Idris.

Ia mengatakan bahwa surat itu sudah diberikan kepada majikannya. “Coba nanti kalau sudah pulang saya sampaikan. Suratnya sudah diterima,” katanya. Namun hingga berita ini ditulis, Idris tidak menjawab permintaan wawancara.

Pola Lelang Sama

Berdasarkan data LPSE, Pemprov DKI Jakarta membuat paket pengadaan revitalisasi pelabuhan di Pulau Kelapa, Pramuka, dan Sebira mulai tahun 2020. Adapun

peningkatan dermaga dilakukan dengan mengerjakan beberapa bagian berbeda di setiap pulau.

Di Pulau Pramuka dan Sebira, revitalisasi dermaga juga menggunakan pola lelang yang sama yakni tidak membuat judul paket secara terang dan tidak dijelaskan rinci area pelabuhan mana yang dikerjakan. Untuk di Pulau Pramuka, pada tahun 2020 pengerjaannya dimenangkan oleh PT Linggarjati Perkasa dengan nilai Rp58 miliar dan dinyatakan selesai.

Kemudian tahun 2021, tender revitalisasi pelabuhan Pulau Pramuka (fisik) kembali dilelang dengan nilai Rp73,3 miliar. Namun, paket itu dinyatakan gagal lelang lantaran peserta tidak ada yang memenuhi persyaratan dan PAKPA menolak menetapkan pemenang.

Tender revitalisasi pelabuhan dilelang lagi pada tahun 2022 dengan nama yang sama pada tahun sebelumnya senilai Rp33,5 miliar dan dimenangkan PT Masa Metonia Abadi. Pekerjaan konstruksi itu mencakup pembangunan gedung Dishub dan dermaga. Tetapi pada Desember 2022 pekerjaan dermaga baru sekitar 50% dan akhirnya mangkrak karena pemenang tidak mempunyai modal untuk melanjutkan.

Pada 2 Februari 2024 pukul 04.28, Sutanto selaku PPK dalam proyek revitalisasi di ketiga pulau itu mengeluarkan surat pemutusan kontrak dengan PT Masa Metonia Abadi. Hal itu dikarenakan penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah diberikan kesempatan kedua dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya.

Dishub dan UPPD Jakarta Enggan Berkomentar

Organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan pengadaan revitalisasi pelabuhan di tiga pulau itu yakni Dinas Perhubungan (Dishub) dan Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah (UPPD) DKI Jakarta enggan berkomentar. Hal ini terlihat dari jadwal wawancara yang kerap dibatalkan.

Konfirmasi dilakukan dengan mengirimkan surat permintaan wawancara ke kedua instansi. Surat yang ditujukan untuk Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo diantarkan langsung ke kantornya yang beralamat di Jalan Jati Baru Raya No.1, RT.14/RW.1, Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, pada Kamis, 21 Desember 2023 dan diterima oleh *security* bernama Supriyadi sekira pukul 12.57 WIB.

Selanjutnya, surat untuk Kepala UPPD DKI Jakarta, Didi Kurniawan diantarkan langsung ke kantornya yang berlokasi di Pelabuhan Muara Angke pada Jumat, 22 Desember 2023 dan diterima oleh Rajiman, petugas keamanan.

Selang 6 hari, tim mendapat jadwal wawancara dengan Januar selaku Kasatpel Fasbuh pada Jumat, 29 Desember 2023 pukul 14.00 WIB di UPPD DKI Jakarta. Tim tiba di lokasi pukul 13.29 WIB dan langsung menemui satpam untuk diarahkan ke ruangan Januar. Namun, tim justru diarahkan untuk membuat jadwal baru atau menunggu dikarenakan pejabat tersebut sedang mendadak pergi ke pulau untuk mengontrol proyek pembangunan.

Tim memutuskan untuk menunggu, tapi di pukul 15.37 WIB dikabarkan oleh stafnya jika Januar tidak pulang ke Muara Angke dan diarahkan untuk wawancara pegawai lain di bagian Fasbuh.

Akhirnya tim bertemu dengan dua staf Fasbuh yakni Sadewo dan Doni pukul 16.16 WIB di salah satu ruangan UPPD DKI Jakarta. Kedua pegawai itu kompak tidak bisa memberikan jawaban mengenai revitalisasi pelabuhan di tiga pulau lantaran hanya menerima pelimpahan aset tanpa mengetahui proses pengerjaan proyek di Kepulauan Seribu Utara yang menjadi kewenangan UPPD II. "Kami tidak tahu riwayat dari awalnya, semua dilimpahkan karena digabung UPPD 1 dan UPPD 2," tutur Doni.

Mereka mengarahkan untuk menghubungi Sudin Perhubungan (Sudinhub) Kepulauan Seribu melalui Tara Sandoro. Namun, bagian Sudinhub Kepulauan Seribu mengatakan tidak ada kegiatan revitalisasi yang dilakukan pada tahun 2022 karena mereka baru dibentuk kembali pada tahun 2023.

Tim kembali melayangkan surat untuk permohonan wawancara dengan PPK proyek revitalisasi pelabuhan di tiga pulau itu yaitu Sutanto. Sutanto sendiri saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pelayaran dan Penerbangan Dishub DKI Jakarta. Surat diantarkan langsung ke kantor Dishub dan diterima oleh *security* bernama Eko S. pada Rabu, 3 Januari 2024 pukul 11.09 WIB. Akan tetapi, surat ditolak karena Sutanto sedang umrah dan disarankan untuk menjadwalkan ulang pada akhir Januari 2024.

Surat permohonan wawancara yang kedua kepada Sutanto kembali diserahkan ke kantor Dishub DKI Jakarta pada 31 Januari 2024 dan diterima Jerri Arito selaku satpam pada pukul 14.55 WIB. Dua minggu kemudian, tim mendapat kabar bahwa surat didisposisi ke UPPD dan wawancara dijadwalkan dengan Januar lagi pada Selasa, 20 Februari 2024 pukul 09.00 WIB. Namun, lagi-lagi jadwal wawancara itu kembali dibatalkan dengan alasan pihak terkait sakit.

UPPD akhirnya menjadwalkan ulang pada Rabu, 28 Februari 2024 pukul 10.00 WIB. Akan tetapi, mereka kembali membatalkan. Hingga berita diturunkan, baik pihak Dishub DKI Jakarta dan UPPD tidak memberikan jawaban apapun.

(Nin/Red).

Sumber: <https://www.bantennews.co.id/sengkarut-revitalisasi-dermaga-kepulauan-seribu/>.

CATATAN

DERETAN MASALAH BERLABU DI PROYEK REVITALISASI DER

Sejumlah masalah mencuat dalam proyek revitalisasi pelabuhan di Pulau Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Mulai dari proses tender hingga persoalan di perusahaan pelaksana mengakibatkan proyek tak kunjung rampung.

Berdasarkan laman LPSE DKI Jakarta, terdapat enam tender terkait pembangunan atau revitalisasi dermaga Pulau Pramuka yang dilakukan periode 2020-2024. Tidak terdapat informasi mengenai proyek, khususnya yang bakal direvitalisasi.

JURNALIS INVESTIGASI MELAWAN KORUPSI
SERIES II

**KOMPILASI LIPUTAN
KLUB JURNALIS INVESTIGASI
MENGUNGKAP DUGAAN
KORUPSI DI PROYEK
INFRASTRUKTUR**

MEDIA KOLABORASI

SUARA.COM, JARING.ID, TEMPO, NARASI TV, TIRTO.ID, LIPUTAN 6
SCTV, DETIK, MAHASISWAINONESIA.ID, IDENERA.COM,
BANTENNEWS.CO.ID

PENYUNTING

AGUNG SEDAYU, WANA ALAMSYAH

DIPUBLIKASIKAN OLEH



INDONESIA CORRUPTION WATCH
JALAN KALIBATA TIMUR IV/D NO. 6,
JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA.

2024



TENDER TAK T DERMAGA

n minimum ang... masyarakat
erekonomian... di Pulau Kelapa.
Khususnya di Pulau Kelapa.
etua RW 04 di Pulau K...
iak dua tahun lalu...
an hanya untuk...
nguna...

di Pulau Kelapa,
ah lama mangkrak.
pelabuhan itu sepi. Tak
bersandar di sana, apalagi
bibir dermaga hanya terlihat
ng. Sementara sekelilingnya
bangunan dari proyek jumbo
apai Rp27,7 miliar. Tak ada atap permanen
pun sementara yang dapat melid...